

ISLAM & REALITAS SOSIAL

Jurnal Penelitian

KEMISKINAN DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH
(Literature Review Berbagai Kebijakan Pengentasan Kemiskinan)
(Asyari)

PERSEPSI DOSEN DAN MAHASISWA
TERHADAP PEMBELAJARAN MEMBACA KITAB KUNING (MKK)
DI JURUSAN SYARI'AH STAIN BUKITTINGGI
(Basri Na'ali)

IMPLEMENTASI KOMPETENSI DOSEN DALAM MEWUJUDKAN
AKHLAK MULIA MAHASISWA JURUSAN TARBIAH STAIN BUKITTINGGI
(Darul Ilmi)

STUDI KOMPARASI METODE ARITHMETIC CODING DAN HUFFMAN CODING
DALAM ALGORITMA ENTROPY UNTUK KOMPRESI CITRA DIGITAL
(Hari Antoni Musril)

PERSEPSI DAN HARAPAN WARGA BINAAN NARKOBA
TENTANG PEMBINAAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIB PAYAKUMBUH
DAN IMPLIKASINYA TERHADAP BIMBINGAN DAN KONSELING
(Hidayani Syam)

ANALISIS BISNIS INDUSTRI GARMEN INDONESIA
DALAM KONDISI KRISIS KEUANGAN GLOBAL
(Jon Kenedi)

EFEKTIFITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN
DI PENGADILAN AGAMA BUKITTINGGI
(Nofiardi)



Diterbitkan Oleh :

Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3M)
STAIN SJECH M. DJAMIL DJAMBEK
Bukittinggi

**ISLAM &
REALITAS SOSIAL**
JURNAL PENELITIAN

ISLAM DAN REALITAS SOSIAL

Jurnal Penelitian

ISSN : 1979-2476

Vol. 5, No. 1, Januari-Juni 2012

PEMBINA

Dr. H. Ismail, M.Ag.

TIM AHLI

Dr. Ridha Ahida, M.Hum.

Dr. Lindayati, M.Si.

Novi Hendri, M.Ag.

Prof. Dr. Nusyirwan Efendi, M.A.

Prof. Dr. H. A. Rahman Ritonga,
M.A.

PENANGGUNG JAWAB

Gusril Basir, S.H., M.Hum.

PIMPINAN REDAKSI

Hardi Putra Wirman, S.IP., M.A.

WAKIL PIMPINAN REDAKSI

Arifmiboy, S.Ag., M.Pd.

REDAKTUR PELAKSANA

Syafwan Rozi, M.Ag.

Muhiddinur Kamal, S.Ag., M.Pd.

DEWAN REDAKSI

Iiz Izmuddin, M.A.

Supriadi, S.Ag., M.Pd.

Junaidi, S.Ag., M.Pd.

SEKRETARIAT

Nusyirwan

Risdianto

Marnis Rivai

ALAMAT REDAKSI:

Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M)

STAIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Garegeh Koto Selayan Bukittinggi

Telp. (0752) 33136 Fax. (0752) 22875

PENGANTAR EDITOR

Tuntutan perbaikan nasib bagi para peneliti, akhir-akhir ini kembali lan- tang menggema. Kenaikan besaran gaji dan tunjangan, penyediaan sarana dan fasilitas, hingga komitmen untuk “menghargai” hasil penelitian, merupakan tuntutan yang kerap kali disuarakan, walau juga -pada akhirnya- kembali membentur “tembok tebal” dan tak memiliki imbas hasil apapun. Betul, bebe- rapa saat yang lalu sang pemimpin negeri ini kembali berkomitmen untuk lebih memperhatikan nasib para peneliti. Namun, komitmen itupun lantas tak terdengar “gaung” kelanjutannya dan berakhir seperti fatamorgana harapan semu atas “kemarau” panjang yang dirasakan peneliti.

Sementara, pada sisi yang lain, peneliti -merasa- memiliki tanggung ja- wab untuk turut berkontribusi membawa kemajuan bagi bangsa ini, lewat temuan-temuan yang dihasilkan. Bahkan, seringkali -atas nama nasionalisme- mereka dituntut untuk mendahulukan kepentingan bangsa dan negara, dari pada “berlabuh” di tempat lain -yang lebih bisa menjanjikan perbaikan nasib-. Di atas “mantra sakti” panggilan dan pengabdian terhadap ibu pertiwi, para peneliti acap kali dihadapkan pada tubir dilema, yakni nasionalisme atau se- jahtera.

Maka, situasi ini semestinya menjadi perhatian bagi segenap pihak -khususnya pemangku kebijakan-, untuk lebih menghargai keberadaan pe- neliti dalam segala aspek, demi untuk kepentingan ke depan bangsa ini. Jika tidak, tak patut pula -rasanya- tuduhan tidak nasionalis itu di alamatkan ke- pada mereka yang lebih memilih berkarier di luar. Walau, nasionalisme me- mang tak selalu berbanding lurus dengan kesejahteraan.

Semoga...

DAFTAR ISI

KEMISKINAN DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH
(Literature Review Berbagai Kebijakan Pengentasan Kemiskinan)

Asyari (1)

**PERSEPSI DOSEN DAN MAHASISWA TERHADAP
PEMBELAJARAN MEMBACA KITAB KUNING (MKK) DI JURUSAN
SYARIAH STAIN BUKITTINGGI**

Basri Na'ali (15)

**IMPLEMENTASI KOMPETENSI DOSEN DALAM MEWUJUDKAN
AKHLAK MULIA MAHASISWA JURUSAN TARBIIYAH
STAIN BUKITTINGGI**

Darul Ilmi (35)

**STUDI KOMPARASI
METODE ARITHMETIC CODING DAN HUFFMAN CODING
DALAM ALGORITMA ENTROPY
UNTUK KOMPRESI CITRA DIGITAL**

Hari Antoni Musril (55)

**PERSEPSI DAN HARAPAN WARGA BINAAN NARKOBA
TENTANG PEMBINAAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
KELAS IIB PAYAKUMBUH DAN IMPLIKASINYA TERHADAP
BIMBINGAN DAN KONSELING**

Hidayani Syam (75)

**ANALISIS BISNIS INDUSTRI GARMEN INDONESIA
DALAM KONDISI KRISIS KEUANGAN GLOBAL**

Jon Kenedi (97)

**EFEKTIFITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN
DI PENGADILAN AGAMA BUKITTINGGI**

Nofiardhi (107)

KEMISKINAN DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH

(*Literature Review* Berbagai Kebijakan Pengentasan Kemiskinan)

Asyari*

Abstract: Poverty is crucial problem. Effective poverty alleviation requires serious commitment and concerted action on the part of political leaders. Program and policies that might contribute to alleviating poverty now also require cooperation from political leaders and officials at many level

This paper aims to explore some program alleviation have formulated by Indonesia Government.

Keywords: Poverty and Government Policy

PENGANTAR

Pembangunan kesejahteraan masyarakat Indonesia merupakan amanat UUD 45 dalam merealisasikan cita-cita luhur kemerdekaan. Dalam pencapaian cita-cita luhur ini dituangkan dalam Program Pembangunan Nasional 2000-2004, dan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2004-2009, RPJM 2009-2014 dan MASTERPLAN Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025.

Pemerintah Indonesia telah melaksanakan berbagai program melalui berapa kebijakan untuk pengentasan kemiskinan. Secara umum, terdapat dua bentuk pola program penanggulangan kemiskinan. *Pertama*, program dalam bentuk pemberian bantuan/*charity*; bantuan langsung, *voucher* pelayanan minimum kesehatan dan pendidikan.¹ Program ini memberikan dampak jangka pendek dalam sebagai solusi dalam menurunkan angka kemiskinan). *Kedua*, program pengembangan usaha produktif, bentuk dukungan kelembagaan, pendampingan dan pemberdayaan². Dalam realitanya, program pengentasan kemiskinan tersebut berhasilannya membutuhkan

* Dosen STAIN Sjech. M. Djamil Djambek Bukittinggi

keseriusan dan komitmen pemerintah serta belum dapat memuaskan dalam kaitannya dengan menurunnya angka kemiskinan.

Tulisan berikut ini merupakan sebuah *survey literature* tentang berbagai kebijakan pemerintah berkaitan dengan kebijakan pengentasan kemiskinan serta berbagai pengalaman negara lainnya dalam kebijakan pengentasan kemiskinan. Secara sistematis, tulisan ini diawali dengan bagaimana kemiskinan itu didefinisikan, bagaimana mengukurnya, apa indikatornya, apa penyebabnya dan berbagai kebijakan yang diambil untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia serta pengalaman berbagai negara lain.

KONSEP KEMISKINAN

Definisi Kemiskinan

Masalah kemiskinan pertama kali berkaitan dengan Revolusi Industri di Inggris pada akhir abad 18. Revolusi tersebut melahirkan suatu kelompok yang terpisah dari lainnya. Ciri dari kelompok tersebut adalah menganggur, terpeleceh dalam ekonomi, terpinggirkan dari pelayanan publik sehingga mereka disebut dengan *pauper*³.

Dalam kamus Oxford, kemiskinan yang dalam bahasa Inggris dipakai kata *poverty* memiliki arti, *the state of existing in amounts that are too small; lack, the state of being inferior*.

Kemiskinan diartikan sebagai kesenjangan pendapatan dibanding dengan kebutuhan minimum suatu rumah tangga⁴. BAPPENAS mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar tersebut antara lain, terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik. Bappenas menggunakan beberapa pendekatan untuk menguraikan kemiskinan. Pendekatan kebutuhan dasar (*basic needs approach*), pendekatan pendapatan (*income approach*), pendekatan kemampuan dasar (*human capability approach*) dan pendekatan objektif and subjectif.

Pendekatan kebutuhan dasar, melihat kemiskinan sebagai suatu ketidakmampuan (*lack of capabilities*) seseorang, keluarga dan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan minimum, antara lain pangan, sandang, papan, pela-

yanan kesehatan, pendidikan, penyediaan air bersih dan sanitasi. Menurut pendekatan pendapatan, kemiskinan disebabkan oleh rendahnya penguasaan asset, dan alat- alat produktif seperti tanah dan lahan pertanian atau perkebunan, sehingga secara langsung mempengaruhi pendapatan seseorang dalam masyarakat. Pendekatan kemampuan dasar menilai kemiskinan sebagai keterbatasan kemampuan dasar seperti kemampuan membaca dan menulis untuk menjalankan fungsi minimal dalam masyarakat. Keterbatasan kemampuan ini menyebabkan tertutupnya kemungkinan bagi orang miskin terlibat dalam pengambilan keputusan. Pendekatan obyektif atau sering juga disebut sebagai pendekatan kesejahteraan (*the welfare approach*) menekankan pada penilaian normatif dan syarat yang harus dipenuhi agar keluar dari kemiskinan. Pendekatan subyektif menilai kemiskinan berdasarkan pendapat atau pandangan orang miskin sendiri.

Dalam literatur kajian Islam, kata miskin berasal dari bahasa Arab⁵ yang terdiri dari kata, *s-k-n*. Dari kata ini diturunkan berbagai kata antara lain; *sakana* berarti diam, hening dan damai (*to become still, tranquil, peaceful*), tenang, istirahat dan reses (*to calm down, repose, rest*), tempat tinggal, rumah (*residence, home*).

Dalam al-Quran, kata miskin bentuk jamaknya adalah *masaakiin* digunakan untuk menyebutkan kelompok yang berhak menerima bagian dari zakat (at-Taubah ayat 60) dan berhak pembagian harta warisan secara suka rela jika mereka ini hadir ketika terjadi pembagian harta warisan (an-Nisa' ayat 8). al-Quran memberikan perumpaan miskin adalah orang yang berada dalam kondisi kepapaan yang sangat seperti dalam al-Balad ayat 16. Orang miskin digambarkan sebagai orang yang sengsara sehingga menutup aurat dan mengganjal perutnya dengan debu.

Selanjutnya al-Quran juga mendeskripsikan orang miskin adalah orang yang tak mampu mencukupi kebutuhan hidup yang paling dasar (*basic needs*), yaitu makan (al-Maidah ayat 89, 95), (al-Insan ayat 8) (al-Mujadallah ayat 4), (al- Baqarah ayat 184) dan (al-Haqqah ayat 34).

Berdasarkan term-term kemiskinan dalam literature keislaman dapat dikatakan bahwa al-Qur'an mengemukakan tiga jenis kemiskinan, yaitu: (a) kemiskinan materi, (b). kemiskinan jiwa (rohani) dan (c) kemiskinan dalam arti khusus, yaitu kebutuhan manusia terhadap penciptanya.

Berbagai definisi yang dikemukakan di atas, jelas bahwa kemiskinan merupakan konsep yang bukan sederhana. Kemiskinan merupakan suatu

luas dan multidimensi karena tidak hanya berhubungan dengan kemampuan memenuhi kebutuhan material, tetapi juga sangat berkaitan dengan dimensi kehidupan manusia yang lain.

Garis Kemiskinan

Definisi tentang kemiskinan sangat beragam seperti yang diutarakan di atas. Satu hal yang penting diperhatikan bahwa definisi tersebut belum memberikan informasi jelas bagaimana menentukan orang miskin atau tidak. Maka diperlukan pengukuran yang dinamakan garis kemiskinan (*poverty line*). Ada banyak pendapat dan pandangan tentang garis kemiskinan ini sebagaimana hal beragamnya pendapat tentang definisi kemiskinan.

Menurut Ravallion⁶ terdapat dua teknik utama dalam menentu garis kemiskinan; pendekatan konsumsi atau pengeluaran (*consumption/expenditure approach*) dan biaya kebutuhan pokok (*the cost of basic needs*). Pendekatan pertama menitikberatkan pada jumlah minimum gizi (*nutritional*) yang dibutuhkan setiap hari. Jumlah yang dibutuhkan adalah 2100 kalori. Pendekatan kedua mencoba mengkonversi biaya dari sejumlah gabungan kebutuhan pokok yang mesti dipenuhi oleh rumah tangga (*cost of bundle basic needs*).

Meir dan Rauch⁷ menghitung sebuah keluarga dengan 1ayah dan ibu serta tiga anak biaya minimum yang dibutuhkan untuk dapat menjaga kehidupan secara fisik adalah 21 shilling dan 8 pence. Bank Dunia, sejak tahun 1990, memperkirakan \$ 1.08 sehari.

Di Indonesia, pengukuran garis kemiskinan ini bervariasi. BPS⁷ menggunakan dua macam pendekatan dalam menentukan garis kemiskinan. Pendekatan kebutuhan dasar (*based need approach*) dan pendekatan *headcount index (HCI)*. Namun pendekatan kemiskinan dengan kebutuhan dasar ini dikritik karena terdapat tiga kelemahan pendapat tersebut; *pertama*, bahwa kemiskinan dikonseptualisasikan dengan ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar dan diukur hanya dari sisi pengeluaran *per kapita*. *Kedua*, dari metode pengukuran standar kebutuhan minimum. Metode ini kurang memperhatikan keterbandingan antar wilayah karena standar kebutuhan hidup minimum yang ditetapkan lebih mengutamakan kepentingan untuk dapat semaksimal mungkin mengkomodasi perbedaan pola konsumsi antara wilayah dan dinamika perubahan pola konsumsi antar waktu. *Ketiga*, masih adanya perdebatan tentang pengukuran nilai standar minimum.

Garis kemiskinan lainnya adalah garis kemiskinan Sajogyo. Garis kemiskinan ini didasarkan kepada harga beras dimana garis kemiskinan setara dengan 20 kg beras untuk daerah pedesaan dan 30 kg untuk daerah perkotaan.⁸

PENYEBAB KEMISKINAN

Dalam menjelaskan penyebab kemiskinan, terdapat beberapa teori:⁹

Teori Klasik

Teori ini menyatakan bahwa hubungan antara pendapatan perkapita, kemiskinan dengan jumlah penduduk terhadap tanah yang jumlahnya tidak mengalami peningkatan. Tokoh yang mengusung pendapat ini adalah Malthus dan Ricardo. Esensi Teori Klasik adalah bahwa jumlah penduduk yang bertambah sementara tanah jumlah luasnya tetap maka akan mengakibatkan terjadinya tingkat pengembalian yang semakin berkurang (*diminishing return*). Hal ini akan juga akan berimplikasi kepada menurunnya produksi perkapita

Banyak kritikan yang dialamatkan kepada teori ini, terutama berkaitan dengan menegasikan peran teknologi. Meskipun demikian teori ini masih dipandang *up to date* di sebagian negara berkembang. Kemiskinan disebabkan oleh pertumbuhan penduduk jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan kesempatan kerja di luar sektor pertanian di pedesaan meskipun terjadi kemajuan teknologi. Di Indonesia hal ini terbukti bahwa kemiskinan lebih tinggi pada rumah tangga petani yang mempunyai ukuran tanah yang kecil.

Teori Lingkaran Setan

Teori lingkaran setan kemiskinan dikemukakan oleh ekonom asal Swedia dan penerima Hadiah Nobel ekonomi, Ragnar Nurkse. Teori lingkaran setan ini dapat dilihat dari dua sisi; permintaan dan penawaran. Dari penawaran, pendapatan yang rendah membawa akibat rendahnya permintaan, juga membawa investasi yang rendah. Investasi yang rendah modal akan berkurang dan akhirnya produktivitas rendah. Dari sisi penawaran, kemiskinan berawal dari pendapatan rendah. Kondisi ini membawa simpanan yang rendah, kekurangan modal dan produktivitas yang rendah.

Teori ini juga tak sunyi dari kritik. Salah satu kritik adalah karena teori ini mengenyampingkan peran investasi luar negeri. Menurut Jomo dan

Samsul Bahri (1985) Teori Lingkaran Setan ini merupakan rangka penghubungan khayalan yang menarik tetapi memutarbalikkan hubungan yang sebenarnya yang hanya membawa ke jalan dari segi usaha memahami keterbelakangan.

Teori Produksi

Proses kemiskinan dapat dijelaskan oleh teori produksi yang di tingkat mikro maupun makro ditentukan oleh sumber modal (K), tenaga kerja (L) dan keahlian (S). Secara matematis dapat dituliskan: $Q = f(K,L,S,...)$. Menurut teori ini, kemiskinan disebabkan oleh perbedaan fungsi produksi rumah tangga. Rumah tangga miskin tidak/kurang mempunyai modal, keahlian dan lainnya atau rumah tangga yang menghasilkan barang dan jasa hanya dengan tenaga fisik cenderung tidak kompetitif. Barang dan jasa yang dihasilkan tidak kompetitif maka akan membawa pendapatan rumahtangga yang diterima rendah. Inilah yang kemudian melahirkan kemiskinan. Namun teori ini tidak dapat menjelaskan kenapa terjadi perbedaan kepemilikan faktor-faktor produksi.

Teori Penyingkiran Sosial

Teori penyingkiran sosial ini merupakan teori yang relatif baru. Perkembangan awalnya adalah awalnya berkembang di negara-negara Eropa Barat yang berhubungan dengan masalah sosial. Masalah sosial, seperti pengangguran, muncul karena adanya proses restrukturisasi ekonomi dan institusi di beberapa negara Eropa Barat.

Inti dari teori ini adalah sekelompok masyarakat terpingkirkan oleh proses ekonomi, proses politik dan budaya. Penyingkiran tersebut ada dua macam; permanen dan diciptakan. Pelaku penyingkiran sosial adalah pemerintah, perusahaan, tentara, penguasa lokal, lembaga adat dan elit lokal.

Ibrahim¹⁰, dalam Islam, kemiskinan disebabkan oleh; sebab berkaitan dengan alam, kondisi kemanusiaan dan sebab sosial-kultural. Kemiskinan disebabkan oleh kondisi alam ini dapat dipahami dalam Surat Jatsiyah ayat 13, dinyatakan bahwa alam merupakan sumber daya untuk kepentingan manusia. Pemanfaatan dan pola interaksi manusia dengan alam mesti selalu dalam koridor ilahiyah. Jika tidak maka manusia akan merasakan eksekusi negative dari interaksi tersebut. Bentuk interaksi yang tidak sejalan dengan koridor ilahiyah adalah , interaksi konstruktif, eksploitasi alam tanpa analisa

dampak lingkungan. Pola seperti ini sadar atau tidak akan membawa ke kemiskinan.

Kemiskinan disebabkan oleh kondisi kemanusiaan. Manusia yang memiliki sifat tidak percaya pada kemampuan, keengganan mengaktualisasikan diri dalam bentuk kerja nyata dan kurang memberikan respek pada perputaran waktu (Surat Maryam ayat, 23,24,25). Kemiskinan disebabkan oleh kondisi sosial-kultural, kemiskinan yang disebabkan oleh perilaku masyarakat yang berkaitan dengan harta kekayaan dan keputusan yang melandasi penggunaan harta. Contoh perilaku masyarakat berkaitan dengan terkonsentrasinya harta pada sebagian orang kaya sehingga menyebabkan orang lain, tak punya asset/modal (Surat al-Hasyar, ayat 7).

BEBERAPA BENTUK KEBIJAKAN NEGARA DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN

Model Vietnam

Di era 1980-1988 ekonomi Vietnam berada dalam kondisi yang mengerikan (*dire*). Pendapatan pemerintah turun secara tajam, tingkat inflasi mencapai beberapa ratus persen tiap tahun dengan puncaknya 774.7% di tahun 1986 dan produksi dalam negeri turun serta kelaparan melanda 21 provinsi.¹¹

Pemerintah Vietnam tahun 1989 membuat perubahan signifikan dengan meluncurkan program *doi-moi*. Program ini bertujuan untuk menciptakan kesempatan ekonomi untuk masyarakat miskin dan menjaga stabilitas makro serta memberikan insentif kepada tumbuhnya dunia usaha itu. Pemerintah Vietnam juga meluncurkan program penciptaan lapangan kerja (*job creation*), kredit, pemberantasan buta huruf, pengurangan kematian bayi. Program-program tersebut dilaksanakan oleh badan khusus yang dibentuk dan dibiayai oleh negara dan dari pinjaman (*loan*) badan internasional, seperti ADB.

Dengan program-program di atas dapat telah mendorong pertumbuhan ekonomi dengan pertumbuhan GDP setiap tahunnya 7-8 % dari tahun 1993-2004. Inflasi dapat terkontrol pada level yang rendah, satu digit. Sektor pertanian tumbuh 5.6 % dan Industri 11.2 % per-tahun. Dan juga angka kemiskinan turun dari 58.1% tahun 1993 ke 19.5 % tahun 2004.¹²

Model China

China termasuk salah satu negara di Asia di mana kebijakan pemerintahnya dalam pengentasan kemiskinan cukup cepat akselerasi penurunannya. Menurut Laporan Bank Dunia¹³ selama tahun 1981-2001, China berhasil mengeluarkan rakyatnya dari kemiskinan lebih kurang 402 juta orang (menggunakan ukuran garis kemiskinan internasional 1 \$ per hari).

Wang, et al¹³ menjelaskan bahwa keberhasilan pemerintah China tersebut diperoleh dengan kebijakan pengentasan kemiskinan melalui 4 tahap; (1). Reformasi Pertanian *Desa (The Rural Reform)* tahun 1978-1985, (2) Program Nasional Pengentasan Kemiskinan Tepat Sasaran (*The National Targeted Poverty Reduction Programs*) tahun 1986-1993, (3) The 7-8 Plan Tahun 1994-2000, Reformasi Desa tahun 1978-1984 merupakan program pengentasan kemiskinan yang bertujuan menciptakan sistem insentif ekonomi yang adil dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat miskin desa untuk mengembangkan dan meningkatkan kegiatan produksi pertanian mereka. Dalam penerapannya, program reformasi desa ini memberikan izin dan tanggungjawab ke rumahtangga miskin desa (*household*) untuk memproductifkan tanah (*natural asset*). Pemberian ini berdasarkan ukuran dan jumlah anggota keluarga yang bekerja.

Program Nasional Tepat Sasaran (*The National Targeted Poverty Reduction Programmers*) tahun 1986-1993. Program ini merupakan kelanjutan dari program sebelumnya dengan memperluas dan memperbanyak jenis kegiatan. Untuk kepentingan ini pemerintah membentuk lembaga The State Council's Leading Group untuk program pengentasan kemiskinan dengan tujuan untuk mempercepat pembangunan ekonomi di kawasan miskin.

Untuk mempercepat pembangunan ekonomi tersebut pemerintah memberikan bantuan dana melalui program subsidi kepada rumah tangga dan usaha kecil yang bergerak di bidang inndustri dan pertanian.¹⁴ Hasil program ini dapat menurunkan angka kemiskinan dari 125 juta orang (14,8 %) di tahun 1985 ke 80,1 juta orang (8.8 %) tahun 1992 (SSB, 1980 s/d 2004).

Program The 8-7 Plan Tahun 1994-2000 melanjutkan dua program terdahulu. Program ini diluncurkan dengan tujuan menciptakan kesempatan kepada masyarakat miskin melalui penambahan asset mereka disamping mengintensifkan program reformasi desa di tahun 1980.

Wang et.al¹⁴ menginformasikan bahwa Program 8-7 Plan ini bertujuan; (1). Membantu rumahtangga miskin dengan program peningkatan hasil

pertanian memberikan memperkenalkan, (2) mendukung akses masyarakat ke air minum dan, listrik, (3) melaksanakan program pendidikan dasar dan penyembuhan kesehatan, (4) mengatur ketersediaan dana bagi kegiatan investasi yang dapat mengurangi kemiskinan. Program 8-7 Plan telah menurunkan angka kemiskinan dari 70 juta jiwa (7.6 %) tahun 1994 ke 29,3 juta 3.2% tahun 2001.

Model Indonesia

Selama 30 tahun terakhir, pemerintah Indonesia dengan berbagai era kepemimpinan presiden, telah melakukan berbagai upaya penganggulangan kemiskinan (*poverty reduction*). Upaya penanggulangan kemiskinan tersebut dilakukan dengan pendekatan; pendekatan sektoral, regional dan kelembagaan.¹⁵

Di era kepemimpinan Soekarno, kondisi kemiskinan memperlihatkan wajah yang sangat parah dan serius. Ekonomi di sepanjang masa kepemimpinan Soekarno jatuh ke dalam *a parlous state* (negara yang berbahaya); inflasi yang sangat tinggi (*hyperinflasi*) dan infrastruktur yang sangat buruk.

Di masa presiden Soeharto, melalui Repelita I-IV diluncurkan program Sektoral & Regional dan dilanjutkan Repelita IV-V juga diluncurkan program Inpres Desa Tertinggal, Program Pembangunan Keluarga Sejahtera, Program Kesejahteraan Sosial, Tabungan Sejahtera, Kredit Usaha Keluarga Sejahtera GN-OTA, Kredit Usaha Tani. Rangkaian paket program tersebut merupakan kegiatan pemerintah dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

Dalam kegiatan Inpres Desa Tertinggal/IDT (*Neglected Village Program*) pemerintah menyediakan dana Rp. 20 juta yang penggunaannya diputuskan oleh masyarakat desa dalam rangka membangun infrastruktur desa dan ekonomi berbasis kelompok masyarakat. Di lapangan, kegiatan IDT ini didampingi oleh P3DT (Program Pengembangan Sarana Desa Tertinggal) yang didanai oleh lembaga bantuan Internasional.

Medio tahun 1997, Indonesia dilanda krisis ekonomi dan ini membawa peningkatan angka kemiskinan secara drastis (49 juta orang atau mendekati 24 % dari populasi masyarakat Indonesia). Krisis ekonomi ini telah mengakibatkan kondisi orang miskin semakin parah jika disbanding dengan periode sebelumnya. Sumber *income* berkurang, tingkat kesehatan gizi anak sangat rendah. Kemampuan akses keluarga miskin ke ranah kesehatan dan pendidikan terancam secara serius.

Sebagai respon dari kondisi kemiskinan yang kian parah ini maka pemerintah waktu itu memperkenalkan dan meluncurkan program *social safety net* (Jaringan Pengaman Sosial/JPS). Di antara bidang sasaran program JPS adalah pendidikan, pertanian, usaha kecil menengah kesehatan serta lainnya.

Selain itu, juga diluncurkan program Operasi Pasar Khusus (OPK) (Sri Kumastuti dan Rezki Fillaili, 2007). Tujuan JPS dan OPK adalah untuk meminimalkan dampak krisis ekonomi. Namun dari evaluasi pelaksanaan program, ditemui bahwa terdapat kelemahan dalam bentuk tidak tepatnya kelompok sasaran.

Di samping program di atas, tahun 2005, kembali pemerintah Indonesia meluncurkan paket program baru yang disebut dengan *cash transfer program*. Bentuk program ini adalah kompensasi program kesehatan dan pendidikan, pemberian bantuan operasional sekolah dan asuransi kesehatan miskin dan bantuan langsung tunai/ BLT.

Tahun 2007, pemerintah memperkenalkan program *The National Program fo Cummunity Empowerment/PNPM*. Program ini bertujuan untuk pemberian bantuan langsung kepada *local community* dengan berbasis partisipasi masyarakat dan menghindari adanya campurtangan berbagai lapisan birokrat. Dalam program PNPM tersebut, terintegrasi dua kegiatan; program pengembangan kecematan (PPK) dan Program Penanggulangan Kemiskinan Di Perkotaan (P2KP).¹⁶

Model Afrika¹⁷

Di Afrika program pengentasan kemiskinan oleh pemerintahnya secara garis besarnya dikelompok kepada lima jenis program; (1) *Trickle-down effect*, (2) Penciptaan Lapangan Kerja/*Job Creation* (3) Kebutuhan dasar/*Basic Need* (4) Jaringan Pengaman Sosial/*Social safety Net* (5). Penyebaran asset/*Asset building/redistribution*. Melalui program tersebut angka kemiskinan dapat diturunkan, dari 53.1% tahun 1996 menjadi 50,8% tahun 2000 dan 44.5 % tahun 2005.

Pada program *trickle-down effect* dilaksanakan beberapa kegiatan dalam rangka menjaga stabilitas makroekonomi; pengurangan *budget deficit*, membatasi kebijakan moneter, mengatur liberalisasi perdagangan, stabilisasi harga dan nilai tukar, mengeluarkan regulasi di pasar tenaga kerja dan meningkatkan produksi.

Dalam program *job Creation*, pemerintah Afrika melaksanakan kegiatan; pembangunan sumber daya manusia melalui peningkatan *skill, training* dan pendidikan, dan pendidikan bagi orang dewasa dan kegiatan lainnya pro kepada penyediaan lapangan kerja.

Program *basic needs*, diluncurkan kegiatan; pendidikan dasar, pemeliharaan kesehatan, air dan sanitasi, listrik dan sumber energy alternative. Pada program *safety net*, dilaksanakan kegiatan; asuransi bagi pengangguran, asuransi bagi lansia, dan veteran perang. Serta program *asset building/redistribution* diluncurkan kegiatan reformasi lahan pertanian dan pemberian perumahan (*the delivery of housing*).

KESIMPULAN

1. Definisi, ukuran dan penyebab kemiskinan sangat banyak dan beragam. Hal ini karena kemiskinan merupakan konsep yang multidimensi.
2. Dari berbagai penelitian dan kajian ditemukan beragam kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan. Beragam kebijakan tersebut juga membawa hasil yang beragam pula. []

ENDNOTES

- ¹ Elfiandri, *Makmur Bersama Masjid*, 2009, Jakarta: Baduose
- ² Srikumastuti, *Program Exit Strategies: Experience From Povert Reduction Program Indonesia*, 2007
- ³ *Pauper* adalah kata dengan makna kemiskinan yang dalam bahasa Inggris diungkapkan dengan kata *poverty*
- ⁴ Hendra Esmara, *Perencanaan dan Pembangunan di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia 2006)
- ⁵ Saad Ibrahim. *Kemiskinan dalam Perspektif al-Quran*. (Malang: UIN Malang 2007)
- ⁶ Ravallion, *Poverty Line in Theory and Practice*, (Washington DC: LSMS Working Paper, t.th.) 133.
- ⁷ Meir dan Rauch, *Leading Issue in Economic Develpoment*, (UK: Univercity Oxford 2005)
- ⁸ Sajogya, *Bunga Rampai Pembangunan Desa*, (Jakarta: Yayasan Obor 1982)
- ⁹ Werry Darta Taifur, *Kajian Kemiskinan*, (Bahan Serdos UNAND 2005)
- ¹⁰ Fan.S, Lan et al, *Governement Spending and Poverty Reduction in Vietnam* (t.t.: t.p. 2004)
- ¹¹ *ibid*
- ¹² Wang et al, *The 8-7 National Poverty Reduction Program*, (Chinese: Academy Agricultural Science 2004)

¹³ *Ibid.*,

¹⁴ Chris Manning dan Sudarno Sumarto, *Employment, Living Standard Poverty in Contemporary Indonesia*, (Singapore: ISEAS, 2011)

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ World Bank, *Taking Action to Reduce poverty In Sub-Saharan Africa*; (The World Bank Publication, Washington. 1997)

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Abdin, AZ, 1997, *Zakat and the Alleviation of Poverty in the Muslim World*
Akhmadi, 2004, *Perencanaan dan Penganggaran Strategi Penanggulangan Kemiskinan Di Daerah*, Jakarta: Smeru
- Booth, A., 2000, *Poverty and Equality in The Soeharto Era: An Assessment*, *Buletin of Economic Studies*, 73-104.
- BPS. 2009. *Berita Resmi Statistik* No. 43/07/Th. XII, 1 Juli 2009, Jakarta: Badan Pusat Statistik. Jakarta
- Chris Manning dan Sudarno Sumarto, 2011, *Employment, Living Standard Poverty in Contemporary Indonesia*, 2011, ISEAS, Singapore
- Elfindri, dkk, 2005, *Kajian Kemiskinan di Perkotaan dan Pedesaan Di Sumatera Barat*
-----, 2007, *Makmur Bersama Masjid*, Jakarta: Baduose
- Fan.S, Lan et al, 2004, *Government Spending and Poverty Reduction in Vietnam*
- Karimi, Syarifuddin, 2010, *Manifesto Demokrasi Ekonomi; Sistem Pasar dan Keadilan Sosial*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap Ilmu Ekonomi Unand
- Kuncoro, AS., 2008, *Kemiskinan: Kesenjangan Antar Provinsi*. Project Officer untuk TARGETMDGs (BAPENAS/UNDP). MDGs News, Edisi 01/Julii-September 2008.
- Myrdal,G. 1974, *Growth and Social Justice*, World Development, 119-120
- Minsky, H. 1986, *Stabilizing an Unstable Economy*, New York.McGraw-Hill
- Qardhawi, Yusuf, 1986, *Fiqh Zakat*, Jakarta: Lentara
- Rani, R. Moerdiarta, 2009, *Menciptakan Dunia Tanpa Kemiskinan* (terj), Jakarta: Gramedia
- Saad Ibrahim, 2007, *Kemiskinan Dalam Perspektif al-Quran*, UIN Malang
- Stigler, G. 1952 *The Goal of Economics Policy*, *Journal of Business*, Vol. 31, 169-176
- Seer, D, 1977, *The New Meaning of Development*, *International Development Review*

- Sulekale, DD., (2003). *Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Era Otonomi Daerah*.
- Sumarto, et al, 1997, *Agriculture's Role in Poverty Reduction: Bringing Farmer to the Policy Formulation Process, Agriculture Sector Strategies Review*, Jakarta: Ministry Agriculture of The Republik of Indonesia
- Esamara, H. 1986, *Perencanaan dan Pembangunan di Indoensia*, Jakarta: Gra-media
- Galbraith, JK , 1967, *Economic Development The Cause of Poverty*, Harvard University Press
- Hastuti dan Max Well, 2003, *Beras Untuk Keluarga Miskin, Apakah Berjalan Efektif*, Jakarta: Smeru
- Nguyen dan Chu, 1996, *Economic Policy and Its Role in The Development of Agriculture and Rural Economy*, Hanoi, National Political Publishing House
- Meier dan Rauch, 2005, *Leading Issue in Economic Development*, Oxford University Press
- Todaro, Michael P. dan Stephen C. Smith, 2003, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, Jakarta: Erlangga
- Ravallion, *Poverty Line in Theory and Practice*, LSMS Working Paper, 133. Washington DC. World Bank
- Sajogyo. 1982. *Bunga Rampai Perekonomian Desa*, Yayasan Obor Indonesia.
- Sri Kusumastuti Rahayu dan Rizki Fillaili, 2007, *Program Exit Strategies: Experiences From Poverty Reduction Programs Indonesia*, 2007, Jakarta: SMERU
- Suparlan, Parsudi (Ed), 1993, *Kemiskinan di Perkotaan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta
- Supriatna, Tjahya, 2000, *Strategi Pembangunan Dan Kemiskinan*, Rineka Cipta, Jakarta
- Chen, S. and M. Ravallion, 2007, *Absolute Poverty Measures for the Developing World, 1981-2004*
- Ravallion, M. 2008, *Are There Lessons for Africa from China's Success Against Poverty?*, World Bank Ravallion, M. (2008), Working Paper No. 4463, World
- Wang et al, 2004, *The 8-7 National Poverty Reduction Program*, Chinese Academy Agricultural Science
- World Bank, 1997, *Taking Action to Reduce poverty In Sub-Saharan Africa*; The World Bank Publication, Washington.

Asyari, Kemiskinan dan Kebijakan Pemerintah ...

World Bank, 1996, *Poverty Reduction and the World Bank: Progress and Challenges in 1990s*, The World Bank, Washington.

World Bank, 1993, *Poverty Reduction Handbook*, The World Bank,

World Bank, 1990, *World Development Report 1990: Poverty*, The World Bank. Washington. Washington.

PERSEPSI DOSEN DAN MAHASISWA TERHADAP PEMBELAJARAN MEMBACA KITAB KUNING (MKK) DI JURUSAN SYARIAH STAIN BUKITTINGGI

Basri Na'ali*

***Abstract:** This study discusses the perception of teachers and students towards learning Reading the Standar of Kitab (MKK) in the Department of Syariah STAIN Bukittinggi. This research is kuantitatif research by uncovering and understanding the phenomena that occur in the process of learning to read the yellow book with Sources of data obtained from the lecturer subjects taught Yellow Book Reading (MKK) at the Department of Syariah STAIN Bukittinggi also data obtained from the Student Programs Shari'ah STAIN Bukittinggi who are taking the course. From the results of research in to the interest of students of the Yellow Book according to very low. It is based on a background of students entering the STAIN Bukittinggi not everything from religious education or school. Although it does not guarantee that a religious background will be able to read the Yellow Book well.*

***Keywords:** Perseption and Reading of "Kitab Kuning"*

PENDAHULUAN

Mayoritas umat Islam memandang bahwa pendidikan agama (baca pendidikan Islam) menjadi pendidikan kelas dua. Di sisi lain pendidikan umum di tempatkan pada posisi nomor *wahid*. Hal ini terlihat dari kualitas dan kwantitas serta tamatan pendidikan Islam yang masih dipandang jauh dibawah pendidikan umum. Walaupun hal ini tidak bisa digeneralisasi semua umat Islam berpandangan demikian. Karena sebahagian para orang tua atau masyarakat masih banyak yang mendahulukan pendidikan agama anak-anaknya.¹

* Dosen STAIN Sjech. M. Djamil Djambek Bukittinggi

Ditambah lagi paradigma yang selalu saja tertanam di mata masyarakat atau orang tua bahwa kalau ingin belajar agama bagi anaknya tentu mesti masuk ke sekolah agama seperti Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTsN), Madrasah Aliyah (MA) dan perguruan tinggi agama Islam (PTAI). Kalau ingin masuk belajar umum (baca nonagama) masuk ke Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan perguruan tinggi umum (PTU) baik sekolah agama dan sekolah umum itu swasta maupun negeri.

Seolah-olah sekolah umum tersebut tidak sekolah agama. Begitu juga ketika anak-anak didik sekolah agama melakukan perbuatan tidak terpuji maka penilaian terhadap sekolah agama dan anak-anak didik tersebut langsung negatif, karena sekolah agama. Namun apabila anak didik umum yang melakukan seolah-olah tidak apa-apa. Juga hal ini terjadi terhadap PTU dan PTAI.

Padahal kalau dilihat bahwa mestinya pendidikan tidak memilah dan memilih antara dunia dan akhirat. Bahkan motivasi yang kuat ditanamkan dalam Islam bahwa dunia adalah ladang penanaman untuk persiapan akhirat. "*Siapa yang menanam maka ia yang akan mengetam*". Do'a sapu jagat yang sering kali kita baca dan ucapkan yang intinya memohon kebahagiaan di dunia dan akhirat sekaligus menyelaraskan antara kebahagiaan dunia dan akhirat.

Mengutip apa yang ditulis oleh Abdurrahman Mas'ud dalam bukunya "*Menggagas Format nondikotomok*"² ketika berbicara mengenai ontologi Pendidikan Islam. Dimana sebenarnya Islam tidak mengenal dikotomi. Islam adalah *religion of nature* maka dalam ajaran Islam sudah tentu tidak dikenal adanya dikotomik ini. Bahkan kalau perlu mesti dihindari dikotomi antara sains dan agama. Justru semakin jauh ilmuwan mendalami sains, dia akan memperoleh *wisdom* berupa *philosophic perennis* yang dalam filsafat Islam disebut dengan *transendnce*. Iman tidak akan pernah bertentangan dengan sains karena iman adalah rasio dan rasio adalah alam itu sendiri.³

PROBLEMATIKA TRADISI MEMBACA KITAB KUNING

Pesantren, surau, pondok, suluk, pengajian khusus dan lembaga-lembaga pendidikan lainnya merupakan tempat diskusi dan belajar membaca sekaligus pentelaahan terhadap naskah-naskah atau kitab-kitab klasik. Kitab-kitab ini dikenal di Indonesia sebagai *kitab kuning*.⁴ Bisa dikatakan antara

kitab klasik dengan lembaga pendidikan yang ada waktu itu ibarat dua sisi mata uang yang sulit untuk dipisahkan.

Menurut Azyumardi Azra, kitab kuning adalah kitab-kitab keagamaan berbahasa arab, Melayu, Jawa atau bahasa-bahasa lokal lain di Indonesia dengan menggunakan aksara Arab, yang selain ditulis oleh ulama Timur Tengah, juga ditulis oleh ulama Indonesia sendiri. Pengertian ini merupakan perluasan dari terminology kitab kuning yang selama ini, yaitu kitab-kitab keagamaan berbahasa Arab, menggunakan aksara Arab, yang dihasilkan oleh para ulama dan para pemikir muslim lainnya di masa lampau- khususnya yang berasal dari Timur Tengah. Bagi masyarakat awam bahwa kitab kuning adalah kitab yang ditulis pada kertas yang berwarna kuning sehingga dijuluki menjadi kitab kuning. Dalam dunia pesantren, kitab kuning juga kerap kali disebut dengan kitab klasik atau kitab kuno (*al-kutub al-qadimah*). Kitab kuning juga bisa disebut dengan “kitab gundul”, karena bentuk-bentuk hurufnya kadang tanpa disertakan sandangan (*syakl*).⁵

Salah satu kebanggaan masyarakat memasukkan anaknya ke lembaga pendidikan Islam seperti Thawalib, MTI, Pesantren dan Diniyah adalah supaya punya bekal ilmu agama dan bisa untuk mengkaji ke dalam sumber-sumber asli yang selama ini dipahami yaitu terdapat dalam kitab kuning. Masalahnya kemudian apakah lembaga-lembaga ini sudah berhasil mencetak para siswanya untuk minimal mampu membaca kitab kuning walaupun semua buku pegangan pelajaran agama Islam adalah semua berbahasa Arab.⁶

Berapa persen mereka yang menguasai kitab-kitab klasik setelah lulus dari sekolah masing-masing? Ataukah metoda yang dipakai selama ini untuk mengajarkan menguasai bahasa Arab yang salah. Sejak kecil bahkan mulai Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi Agama Islam yang melanjutkan ke PTAI sudah diajarkan untuk berbahasa Arab namun yang pandai membaca kitab-kitab klasik ini terasa sulit. Tentara Amerika sebelum dikirim ke perang Irak mereka dilatih dulu untuk berbahasa Arab selama hanya setahun. Setahun itu mereka sudah mampu untuk menguasai bahasa Arab. Menguasai bahasa Arab tentunya adalah menulis, membaca, dan berbicara bahasa Arab.

Tidaklah salah kalau akhirnya kitab kuning hanya tinggal cerita lama bagi mereka yang mengecap pendidikan di lembaga-lembaga tadi. Buku nyaris tidak tersentuh lagi. Pada perpustakaan hanya menjadi koleksi saja

tanpa pernah disentuh. Ketika mendengar kitab kuning langsung muncul alergi bagi siswa maupun mahasiswa yang mendengar padahal gudang ilmu terletak pada buku itu. Sehingga pada masa modern ini penguasaan akan naskah-naskah klasik apalagi bagi mahasiswa Perguruan Tinggi Agama Islam sangat jauh tertinggal. Inilah salah satu problem mendasar yang dialami oleh Perguruan Tinggi Agama Islam pada saat ini menurut Abdurrahman Mas'ud.

PROBLEMATIKA KITAB KUNING DI PTAI

Maka tidaklah salah kemudian dalam UU No. 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen disebutkan bahwa salah satu kompetensi yang dipersyaratkan bagi seorang dosen adalah kemampuan berbahasa; Arab atau berbahasa Inggris. Kemampuan ini akan mempermudah dosen untuk mendapatkan input-input keilmuan yang *up to date* dari berbagai media dan sumber. Sehingga akan menghasilkan tenaga-tenaga terdidik dan terampil dan mampu bersaing pada zaman yang sangat kompetitif ini. Dosen yang kompeten dan berkualitas akan dapat menghasilkan anak didik yang kompeten dan berkualitas juga.

Kompetensi berbahasa Arab dan berbahasa Inggris aktif yang diinginkan tidak akan terwujud secara instan dan berkesinambungan melalui pelatihan-pelatihan singkat. Untuk itu diperlukan pelatihan bahasa Arab dan Inggris intensif dan berkesinambungan, terencana dengan instruktur yang berpengalaman. Tentu saja ada halangan dan rintangan yang dihadapinya dalam mendalami dan menyampaikan pembelajaran Membaca Kitab Kuning terhadap mahasiswa. Oleh karenanya penelitian ini juga bisa bermasud selain untuk menyelidiki tentang persoalan yang muncul dari dosen juga persoalan dalam dirinya sendiri.

STAIN Bukittinggi yang merupakan Pendidikan Tinggi Agama Islam Negeri yang ada di Bukittinggi. Dimana pembinaan akademik STAIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi diarahkan kepada pembangunan ilmu-ilmu agama Islam dan pemenuhan tuntutan masyarakat dan bangsa yang sedang membangun terutama di Sumatera Barat. Sistem pendidikan yang dianut adalah yang bersifat fungsional dan profesional dalam kehidupan masyarakat dan bangsa dan juga memenuhi efisien dan efektivitas dalam kerangka Tri Darma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat.⁷

Sebagaimana diketahui visi dari STAIN adalah: Menjadi Perguruan Tinggi Islam yang berkualitas dan berakhlak karimah yang dibutuhkan oleh peminat dan pengguna serta menjadi perguruan tinggi Islam yang mampu bersaing dengan perguruan tinggi lainnya. Sedangkan misi dari STAIN adalah: Menciptakan civitas akademik yang konsisten dalam beramal ilmiah dan berilmu amaliah. Menumbuhkan suasana intelektual yang Islami dalam rangka mewujudkan ketaqwaan yang mendalam. Menjadikan mahasiswa sebagai pelopor pembangunan spiritual di tengah-tengah masyarakatnya berlandaskan kepada Al-Qur'an dan Sunnah.⁸

Dari berbagai permasalahan di atas inilah salah satu problem mendasar yang dialami oleh Perguruan Tinggi Agama Islam pada saat ini menurut Abdurrahman Mas'ud. Dimana lemahnya kompetisi para alumnus ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi pada universitas terkemuka di luar negeri dan juga ketika para alumni berhadapan di tengah-tengah masyarakat. Padahal secara kasat mata paradigma masyarakat selama ini Perguruan Tinggi Islam sudah punya investasi Sumber Daya manusia untuk mampu membaca kitab kuning.

Mudah-mudahan STAIN Bukittinggi sebagai lembaga yang selama ini dipercaya dengan alumninya yang banyak tersebar di berbagai bidang yang salah satunya adalah Peradilan Agama dengan keunggulan mampu memahami kitab kuning dengan baik. Makanya kalau dulu ada tes cakim dari Fak. Syari'ah Bukittinggi banyak yang gamang kalau sudah berhadapan. Namun ternyata sekarang ini kemampuan mahasiswa jauh menurun dan begitu juga dengan input dosen yang mengajar. Walaupun diakui sampai saat ini untuk tes hakim dalam hal membaca kitab kuning STAIN Bukittinggi masih tetap unggul. Namun tentu mesti ada persamaan persepsi di antara dosen dan mahasiswa terkhusus di Fakultas Syari'ah dalam hal pembelajaran Kitab Kuning. Oleh karenanya perlu diadakan penelitian untuk melihat persoalan ini.

TELAAH KEPUSTAKAAN

Sepanjang referensi yang penulis baca dan temukan, penelitian yang secara khusus mengkaji tentang persepsi dosen dan mahasiswa jurusan Syari'ah terhadap pembelajaran kitab kuning di STAIN Bukittinggi belum ada. Namun ada berbagai buku dan penelitian yang dilakukan dan terhadap kitab kuning di berbagai tempat dan relevan dengan penelitian yang akan

dilakukan. Begitu juga penelitian tentang persepsi sudah banyak dilakukan oleh dosen pendidikan dalam berbagai versi yang dikemukakan untuk melihat berbagai persoalan yang ada baik dalam fenomena masyarakat maupun untuk proses pembelajaran.

Beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini seperti buku "*Kitab Kuning*", yang ditulis oleh Martin Van Bruinessen, Penelitian Yanti Elvita berjudul "*Persepsi Siswa dan Keberhasil Belajar*". Penelitian lain juga seperti yang ditulis oleh Marzuki dengan judul "*Pembentukan Kultur Akhlak Mulia Di Kalangan Mahasiswa UNY Melalui Pembelajaran PAI*". Dari berbagai sumber tersebut penulis jadikan sebagai bahan tambahan dalam menulis penelitian ini. Khusus di STAIN Bukittinggi sudah penelitian tentang persepsi yang ditulis oleh Raymond Dantes tentang "*Pembelajaran Bahasa Arab di STAIN Bukittinggi*". Dari semua itu peneliti belum menemukan penelitian yang secara khusus meneliti tentang pembelajaran kitab kuning dari persepsi dosen dan mahasiswa jurusan Syari'ah STAIN Bukittinggi.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, karena penelitian ini hanya menggambarkan dan melukiskan suatu peristiwa tertentu, yang dalam hal ini persepsi dosen dan Mahasiswa mengenai proses pembelajaran Kitab Kuning di STAIN Bukittinggi. Penelitian ini bersifat kualitatif, karena penelitian ini mengungkap dan memahami fenomena yang terjadi dalam proses pembelajaran membaca kitab kuning di STAIN Bukittinggi. Metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme.⁹ Beberapa karakteristik dalam penelitian kualitatif ini menurut David D. Williams, dalam buku karangan Sanapiah Faisal, di antaranya dapat membantu dan membimbing penulis dalam menjawab persoalan yang diangkat.¹⁰

Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan berlokasi di STAIN Bukittinggi lebih khusus di Kampus I Jl. Paninjauan Garegeh Mandiangin Koto Selayan kota Bukittinggi pada Jurusan Syari'ah Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyah, Jinayah Siyasah dan Muamalah STAIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi semester V yang berjumlah 40 orang dengan pengambilan semua mahasiswa yang mengambil mata kuliah MKK pada semester Ganjil Tahun Ajaran 2011-2012 tahun 2011.

Sumber Data Penelitian

Sumber data didapatkan dari para Dosen yang mengampu Mata Kuliah Membaca Kitab Kuning (MKK) pada Jurusan Syari'ah STAIN Bukittinggi yang telah di SK-Kan oleh Jurusan Syari'ah baik dikarenakan senioritas maupun memang berlatar belakang pendidikan Bahasa Arab. Dosen yang mengampu mata kuliah Membaca Kitab Kuning (MKK) juga bisa saja dikarenakan pernah kuliari di Timur Tengah (Lc).

Data juga didapatkan dari Mahasiswa Jurusan Syari'ah STAIN Bukittinggi yang sedang mengambil mata kuliah Membaca Kitab Kuning (MKK) pada Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyah, Jinayah Siyasah dan Muamalah STAIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Mahasiswa yang tersebar di Program Studi yang sedang mengambil mata kuliah Membaca Kitab Kuning (MKK).

Teknik dan Proses Pengumpulan Data

Sesuai dengan sumber data yang telah dipaparkan sebelumnya, sumber data berupa kata-kata dan tindakan, kemudian juga dokumen jurusan yang sedang mengampu Mata Kuliah Membaca Kitab Kuning (MKK). Hal ini sangat diperlukan untuk melihat lebih dekat tentang keberadaan dosen yang mengasuh mata kuliah Membaca Kitab Kuning (MKK).

Sedangkan data primer diperoleh melalui wawancara dengan menyiapkan panduan terstruktur. Sedangkan data sekunder berupa dokumen-dokumen baik yang berhubungan dengan penelitian ini. Konsep sampel dalam penelitian ini berkaitan dengan bagaimana memilih informan atau situasi yang dapat memberikan informasi mantap dan terpercaya mengenai unsur-unsur pusat perhatian penelitian. Pemilihan responden mengikuti pola bola salju (*snow ball sampling*).¹¹

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui angket, wawancara, observasi dan dokumentasi yang diberikan kepada mahasiswa yang mengambil mata kuliah Membaca Kitab Kuning (MKK).

Angket

Angket diedarkan kepada mahasiswa yang mengambil mata Kuliah MKK yang dalam penelitian ini dengan mempergunakan model pertanyaan yang tertutup. Data yang akan di kumpulkan dengan angket atau survey

ini adalah yang berhubungan dengan persepsi mahasiswa STAIN "Syech M.Djamil Djambek" Bukittinggi yang berimplikasi kepada bagaimana pandangan mereka tentang proses pembelajaran dalam membaca kitab kuning yang dilakukan di STAIN Bukittinggi serta saran dan masukan dari mahasiswa yang jawabannya tersebut akan dianggap relevan dengan pokok permasalahan penelitian.

Wawancara

Dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara terstruktur yang bisa secara leluasa melacak keberbagai segi dan arah guna mendapatkan informasi yang selengkap mungkin. Dengan menggunakan pedoman wawancara dalam bentuk pertanyaan *open ended and probing* yaitu menguraikan poin-poin khusus yang penting yang akan didiskusikan dengan informan.¹²

Observasi

Observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi partisipasi (*participation observation*) yang secara terang-terangan (*open observation*). Meskipun demikian peneliti tetap merupakan instrumen utama dalam menghimpun dan mencari data dengan ikut terlibat dalam berbagai kegiatan yang dilakukan oleh objek yang diteliti. Peneliti berusaha untuk membaurkan diri di lokasi penelitian dengan mengamati dan mengikuti segala kegiatan/acara yang dilakukan masyarakat.

Kegiatan observasi ini dilakukan berulang-ulang sampai diperoleh data yang dibutuhkan, metode ini digunakan untuk: (1) mengoptimalkan motif, kepercayaan dan perhatian peneliti, (2) memungkinkan peneliti untuk dapat mengidentifikasi apa yang dirasakan dan dihayati oleh subjek penelitian, (3) memungkinkan pembentukan pengetahuan yang diketahui bersama antara peneliti dengan subjek penelitian.¹³

Dokumentasi

Dalam memperoleh data sekunder, dokumentasi dilakukan terhadap arsip-arsip seperti memo, pengumuman, instruksi dan sebagainya yang diperlukan oleh penulis untuk menunjang penelitian ini. Dokumentasi, yang digunakan sebagai sumber data bagi peneliti dalam hal dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan data-data yang berkaitan dengan fokus penelitian.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis induktif. Teknik analisis induktif ini dilakukan dengan menganalisis permasalahan khusus di sekitar tradisi-tradisi yang berkembang di sekitar pembelajaran MKK untuk selanjutnya ditarik kesimpulan yang bersifat umum dan objektif yang dapat menggambarkan permasalahan yang sebenarnya. Sehingga dapat diketahui bagaimana pandangan dosen dan mahasiswa terhadap proses pembelajaran kitab kuning di STAIN Bukittinggi.

Dalam penelitian ini data yang telah terkumpul dari hasil dokumentasi dan wawancara yang terekam dalam kaset, transkrip, diseleksi dan diklasifikasikan sesuai dengan kebutuhan data dan kemudian dianalisis berdasarkan hasil yang diperoleh di lapangan sesuai dengan metode yang digunakan yaitu metode kualitatif dengan menggunakan unit analisis data secara deskriptif.

HASIL PENELITIAN

Persepsi Dosen Dalam Pembelajaran Kitab Kuning

Dari wawancara yang dilakukan kepada dosen yang mengasuh mata kuliah ini tentang pemahaman mahasiswa tentang apaitu kita kuning ditemukan bahwa rata-rata mahasiswa tahu tentang kitab kuning, hanya sebatas nama saja. Begitu juga minat mahasiswa mengikuti Mata Kuliah Membaca Kitab Kuning rendah, bahkan sebagian hanya terpaksa karena MKK merupakan mata kuliah wajib.

Tentang tingkat pengetahuan mereka tentang Membaca Kitab Kuning sangat yang rendah walaupun mereka berlatarbelakang madrasah Aliyah ataupun Pesantren. Sementara yang berlatarbelakang sekolah umum tidak memadai samasekali, bahkan tidak bersemangat karena basic mereka yang kurang. Mengenai metode yang beliau gunakan adalah membaca teks yang diberikan, tanya jawab dan memberikan tugas. Dalam persoalan referensi yang dipakai dalam pembelajaran kitab kuning ini sudah sesuai atau tidak.

Secara umum referensi yang digunakan cukup memadai, karena disesuaikan dengan prodi masing-masing. AH menggunakan buku yang berkaitan dengan AH, Mu'amalah buku yang berkaitan dengan mu'amalah. Begitupun SJ kitab yang berkaitan dengan jinayah. Tidak banyak referensi karena yang menjadi tujuan adalah kemampuan membaca kitab. Apakah

efektifitas metode tersebut dalam meningkatkan pengetahuan Membaca Kitab Kuning Mahasiswa. Efektifitas tergantung kepada frekuensi dan ke-rajinan mahasiswa dalam mengulang materi-materi yang sudah di ajarkan. Mengenai dalam proses pembelajaran juga di samping mengajar MKK saya mengajar matakuliah lain di antaranya Fiqih Zakat dan Fiqih Jinayah.

Pemahaman Mahasiswa Tentang Kitab Kuning

Sesuai dengan keinginan peneliti tentang persepsi atau pandangan mahasiswa terhadap pembelajaran Membaca Kitab Kuning di STAIN Bukittinggi maka peneliti terlebih dahulu ingin mengetahui tentang sejauh mana pemahaman responden tentang Kitab Kuning itu sendiri. Hal ini mencakup pada pengetahuan tentang kitab kuning, tempat mengetahui dan prosesnya di STAIN Bukittinggi.

Dari pertanyaan tersebut tentang apakah respond dalam hal ini mahasiswa STAIN Bukittinggi sudah mengetahui apa itu Kitab Kuning maka sebanyak 31 responden menjawab sudah mengetahui sebelumnya atau 78 persen. Sedangkan 7 responden belum mengetahui atau 17 persen dan kosong sebanyak 2 responden atau 5 persen. Adapun yang kosong sebenarnya bukanlah disediakan sebelumnya namun karena ada yang tidak menjawab akhirnya dihitung juga dengan istilah kosong. Motifnya mengapa responden tidak mengisi tentunya tidak bisa dilacak lebih jauh.

Mengenai dimana para responden mengetahui tentang Kitab Kuning itu sendiri maka para responden ternyata sudah tahu ketika masih di SLTP/MTSN sebanyak 15 responden atau 38 persen. Sebanyak 6 responden mengetahui ketika masih di SLTA/MAN serta kebanyakan ketika sudah di Perguruan Tinggi atau lebih tepatnya kuliah di STAIN Bukittinggi sebanyak 17 responden atau 42 persen dan ada juga responden yang tidak mau mengisi sebanyak 2 responden atau 5 persen.

Ditanyakan juga kepada responden pada semester berapa mereka mulai belajar Membaca Kitab Kuning di STAIN Bukittinggi atau mengambil mata kuliah MKK ternyata mahasiswa hanya 4 orang atau 10 persen orang yang menjawab pada semester III dan mulai semester IV sebanyak 35 orang atau 88 persen. Hanya satu orang yang menjawab pada semester VII atau 2 persen. Ini menunjukkan pengenalan mahasiswa dengan Mata Kuliah MKK dimulai pada semester IV dengan diberikannya MKK I walaupun persentuhan mahasiswa dengan Kitab Kuning bisa saa pada pelajaran Matrikulasi Bahasa

Arab yang diberikan pada semester I atau juga Mata Kuliah Bahasa Arab yang disampaikan pada mata kuliah regular biasa.

Fungsi dan Motivasi terhadap MKK

Hal ini ditanyakan kepada responden untuk mengetahui apakah Kitab Kuning berfungsi dan punya makna sendiri bagi responden atau tidak. Juga ditanyakan tentang persepsi yang muncul bagi mahasiswa bahwa MKK itu sulit dan motivasi atau yang mendorong untuk belajar kitab kuning itu sendiri.

Mengenai fungsi dan arti kitab kuning bagi mahasiswa semua setuju bahwa kitab kuning punya arti yang sangat cukup signifikan sebagai sumber ilmu. Semua responden sepakat bahwa Kitab Kuning sebagai sumber ilmu dan dijawab responden sebanyak 40 orang mahasiswa atau 100 persen.

Adapun asumsi yang dibangun bahwa mahasiswa sudah mengetahui bahwa MKK itu sulit, juga responden menjawab semua responden tidak tahu atau 100 persen. Ini mungkin karena selama ini bagi yang belajar kitab kuning sebelumnya tidak terasa sulitnya. Namun setelah sampai di STAIN terasa akan sulitnya.

Adakah yang mendorong saudara untuk mempelajari dan Membaca kitab kuning ternyata 28 orang mahasiswa menjawab ada atau 70 persen ada yang mendorong. Sementara 12 orang responden menjawab tidak ada atau 30 persen. Walaupun selanjutnya peneliti tidak menanyakan apa dan siapa yang mendorong untuk mahasiswa mau mempelajari kitab kuning karena mungkin disebabkan kitab kuning sebagai sumber ilmu dan menjadi mata kuliah wajib di STAIN Bukittinggi. Jadi mau atau sepakat tidak sepakat bahwa mahasiswa mesti mengambil mata kuliah ini. Memang MKK di STAIN Bukittinggi diwajibkan atau dimasukkan sebagai SKS dari MKK I sampai dengan MKK IV.

Proses Pembelajaran Kitab Kuning (MKK)

Hal inilah yang menjadi poin penting dari penelitian ini dimana proses yang digunakan dosen dalam pembelajaran Kitab Kuning atau Membaca Kitab Kuning. Hal yang sangat penting adalah metode yang digunakan dalam pembelajaran apakah sudah cocok atau belum. Ini juga akan terlihat nantinya ketika wawancara dilakukan kepada Dosen yang mengasuh mata kuliah ini apakah sudah cocok atau belum metode yang mereka gunakan.

Sesuai juga dengan kerangka teori yang dibuat tentang metode pembelajaran kitab kuning apakah sudah dipakai atau belum. Juga mengenai referensi yang dipakai dalam pembelajaran apakah sudah sesuai dengan bidang keilmuan yang mereka alami. Lebih tepatnya program studi yang mereka ambil seperti Ahwal al-Syakhsiyah, Jinayah Siyasaah dan Muamalah. Karena bagaimanapun nantinya ketika komprehensif kitab-kitab inilah yang kemudian disuruh baca kembali oleh para dosen pengujinya masing-masing dan untuk bekal mereka sesudah tamat referensi ini sangat mendukung.

Begitu juga motivasi yang muncul atau adanya penekanan dari dosen yang mengasuh mata kuliah ini ada tidak belajar bersama untuk membaca kitab kuning ini. Karena bagaimanapun membaca kitab kuning tidak cukup hanya sekali saja tetapi sangat dibutuhkan mengulang dan diskusi secara bersama-sama antara mahasiswa. Juga dengan belajar kelompok atau mengulang akan terbantu bagi mahasiswa yang tingkat kepandaianya rata-rata.

Pertanyaan tentang Metode yang digunakan dalam pembelajaran Membaca Kitab Kuning sudah sesuai menurut saudara di STAIN maka mahasiswa menjawab 16 orang sudah sesuai atau 40 persen dan 24 orang atau 60 persen belum sesuai. Ini mungkin bisa jadi disebabkan oleh persepsi mahasiswa yang tidak tahu metode dalam pembelajaran kitab kuning atau dosen juga tidak berdiskusi akan metode yang akan digunakan dalam pembelajaran kitab kuning tersebut.

Persoalan referensi yang dipakai dalam Membaca Kitab Kuning sudah sesuai dengan bidang keilmuan yang mahasiswa tekuni apakah sudah cocok atau sesuai. 14 orang mahasiswa menjawab sudah atau 35 persen dan setengah 50 persen menjawab kadang-kadang sesuai dan kadang-kadang tentunya tidak sesuai. Enam orang mahasiswa menjawab tidak sesuai dengan bidang keilmuan yang mereka tekuni atau 15 persen.

Persoalan belajar bersama untuk membaca kitab kuning setelah selesai perkuliahan mahasiswa tidak ada yang rutin atau selalu belajar bersama. Hanya 16 orang mahasiswa atau 40 % yang kadang-kadang belajar bersama tentunya kadang-kadang juga tidak. Bahkan 24 orang mahasiswa atau 60 persen tidak melakukan belajar bersama sesudah perkuliahan. Mungkin saja mahasiswa belajar individu di rumah masing-masing.

Nilai Tambah dan Motivasi dari Pembelajaran MKK

Mengenai nilai tambah yang peneliti maksud adalah tentang mahasiswa mengambil mata kuliah ini berefek atau tidaknya kepada yang bersangkutan. Juga dengan Membaca Kitab kuning semakin membantu atau memudahkan tidak dalam mata kuliah lain. Juga peneliti ingin tahu minat dan bakat mahasiswa akan belajar kitab kuning kepada yang lain baik kepada dosen maupun ke pondok atau kepada yang lain.

Dengan membaca kitab kuning ini mendapatkan nilai tambah tidak bagi mahasiswa. Sekitar 21 mahasiswa atau 52 persen menjawab memberikan nilai tambah dengan membaca kitab kuning ini. 15 mahasiswa menjawab tidak punya nilai tambah bagi mahasiswa atau 38 persen. Mahasiswa juga menjawab kosong sebanyak 4 orang atau 10 persen tidak memberikan jawaban terhadap persoalan ini.

Apakah dengan mata kuliah MKK ini membantu sekaligus memudahkan saudara untuk mata kuliah lainnya maka hanya 3 orang mahasiswa yang menjawab selalu membantu atau memudahkan mata kuliah lainnya. Kebanyakan mahasiswa atau 26 orang atau 65 persen menjawab kadang-kadang membantu dan memudahkan untuk mata kuliah lain. 10 orang mahasiswa atau 20 % mengatakan tidak membantu atau memudahkan mata kuliah lainnya. Satu mahasiswa tidak memberikan komentar atau mengosongkan jawabannya.

Dalam persoalan belajar Membaca Kitab Kuning selain di STAIN kepada yang lain. Maka mahasiswa hanya 2 orang atau 4 persen yang melakukan hal ini. Bahkan mayoritas atau 38 orang atau 96 persen tidak ada belajar kitab kuning selain hanya mencukupkan di STAIN Bukittinggi saja.

Kendala Dosen dan Mahasiswa dalam Pembelajaran MKK

Kendala-kendala yang dihadapi Dosen

Mengenai kendala dalam pembelajaran Kitab kuning sesuai dengan wawancara yang dilakukan penulis dengan pengasuh matakuliah MKK di STAIN Bukittinggi adalah pertama kurang motivasi dari mahasiswa, tidak rajin mengulang, kemampuan yang rendah dan kurangnya minat dari mahasiswa.¹⁴

Mengenai saran mereka untuk peningkatan mutu pembelajaran MKK di STAIN Bukittinggi adalah ke depan mata kuliah MKK harus sinergi dengan mata kuliah Bahasa Arab, baik dengan dosennya maupun silabusnya.

Karena secara teori mahasiswa harus diberi pengetahuan dasar bahasa Arab sehingga mereka yang punya dasar bahasa arab bisa di asah untuk MKK

Kendala lain yang dihadapi mahasiswa sebagaimana dikatakan oleh dosen yang lain¹⁵ adalah: Mahasiswa kurang belajar. Belajar hanya dilokal saja. Tugas-tugas yang di berikan hanya copy paste dari teman-teman lain. Disamping itu mereka tidak menguasai ilmu alat. Artinya pondasi tidak kuat.

Kendala-kendala yang Dihadapi Mahasiswa

Dari pertanyaan tentang kendala yang dihadapi mahasiswa dalam mempelajari kitab kuning sebanyak 30 orang responden menjawab ada kendala atau 76 persen terkendala. 7 responden atau 18 persen menjawab kadang-kadang. Hanya seorang responden yang menjawab tidak ada kendala dan 2 responden atau 4 persen tidak mau mengisi apakah terkendala atau tidak.

Adapun penyebab mereka terkendala, karena mereka kurang memahami kaidah dalam kitab kuning itu sendiri atau tata caranya dalam MKK itu. Mereka juga mengatakan kendalanya adalah disebabkan mata kuliah ini baru dipelajari dan sebelumnya belum pernah dipelajari.

Ada mahasiswa yang mengatakan bahwa kendalanya tetap saja di Mufradatnya atau kosa kata bahasa Arab yang kurang dikuasai dan ini akibat tidak mengulang di rumah.

Mahasiswa juga mengatakan bahwa kendalanya adalah karena teks katanya susah dipahami dan malas mengulang. Juga susahnya mengingat dalam membedakan tata bahasa atau guna i'rabnya. Bahkan mahasiswa juga mengatakan bahwa ketika diterangkan oleh Dosen MKK rasanya sudah dapat dikuasai namun ketika disuruh baca hilang sendiri apa yang akan dibaca itu.

Sebahagian mahasiswa yang menyalahkan dosen bahwa katanya cara menerangkan membaca kitab kuning itu yang terbang kemana-mana. Setidaknya diajarkan dulu cara membacanya dan istilah-istilah yang ada. Bukan lansung ke teori ujar mahasiswa ini. Bahkan ada juga mahasiswa yang menyatakan kendala yang dihadapi adalah waktu dan jadwal kuliah yang sangat padat dan kerja yang padat pada mahasiswa itu sendiri.

Dari berbagai kendala yang dihadapi tidak semua mahasiswa mau menyampaikan atau mengisi. Juga jawaban yang diberikan hamper sama baik persoalan mufradat, kaidah, nahu, sharaf dan lain-lainnya. Makanya

tidak semua peneliti muat dalam penelitian ini karena jawabannya hamper sama. Bahkan kendala itu nampaknya ada di mahasiswa itu sendiri.

ANALISA PENULIS

Setelah dijelaskan dari persepsi dosen dan mahasiswa serta kendala-kendala yang dihadapi Dosen dan Mahasiswa dalam pembelajaran Kitab Kuning di STAIN Bukittinggi maka penulis akan memberikan analisa. Analisa ini sangat penting untuk memberikan kesimpulan dan penelitian ini.

Mengenai persepsi dosen dari yang disampaikan oleh dua dosen pengasuh mata kuliah dari hasil wawancara bahwa minat mahasiswa terhadap Kitab Kuning ini menurut sangat yang rendah walaupun mereka berlatarbelakang madrasah Aliyah ataupun Pesantren. Adapun yang berlatarbelakang sekolah umum tidak memadai sama sekali, bahkan tidak bersemangat karena *basic* mereka yang kurang. Mengenai metode yang beliau gunakan adalah membaca teks yang diberikan, tanya jawab dan memberikan tugas. Dalam persoalan referensi yang dipakai dalam pembelajaran kitab kuning ini sudah sesuai atau tidak.

Secara umum referensi yang digunakan cukup memadai, karena di sesuaikan dengan prodi masing-masing. AH menggunakan buku yang berkaitan dengan AH, Mu'amalah buku yang berkaitan dengan mu'amalah. Begitupun SJ kitab yang berkaitan dengan jinayah. Tidak banyak referensi karena yang menjadi tujuan adalah kemampuan membaca kitab.

Apakah efektifitas metode tersebut dalam meningkatkan pengetahuan Membaca Kitab Kuning Mahasiswa. Efektifitas tergantung kepada frekuensi dan kerajinan mahasiswa dalam mengulang materi-materi yang sudah di ajarkan. Mengenai dalam proses pembelajaran juga di samping mengajar MKK saya mengajar mata kuliah lain di antaranya Fiqih Zakat dan Fiqih Jinayah.

Mengenai metode di dalam mengajar para dosen menggunakan metode:

1. Menyuruh Mahasiswa membaca secara bergiliran
2. Membacakan kitab dan mahasiswa harus melihat kepada kitab

Setelah membaca mengulangi kembali qawaid yang sudah pernah di ajarkan untuk melihat penerapan qawaid tersebut di dalam kitab yang dibaca.

Apakah buku yang dipakai terlalu sulit bagi mahasiswa karena buku tersebut di karang oleh ulama klasik yang menggunakan bahasa yang cukup tinggi. Dosen berharap buku yang dipakai tidak terlalu berat bagi mereka.

Adapun persepsi mahasiswa dalam pembelajaran kitab kuning bahwa mayoritas mahasiswa belum mengetahui apa itu kitab kuning sendiri walaupun dari profil responden mereka dari sekolah agama. Hal ini mungkin dikarenakan Cuma dari Pondok Pesantren dan MTI yang akan bersentuhan langsung dengan kitab kuning itu. Mereka juga tidak paham sebelumnya bahwa membaca kitab kuning itu sulit.

Begitu juga dalam proses pembelajaran Kitab Kuning apakah metode yang dipakai sudah sesuai atau belum juga mahasiswa mengatakan mayoritas belum sesuai bahkan referensi yang digunakan kadang-kadang sesuai dan kadang tidak sesuai. Dalam hal belajar bersama pasca perkuliahan mayoritas mahasiswa tidak ada yang melakukan.

Nilai tambah yang didapatkan dari belajar membaca kitab kuning mahasiswa setuju itu ada nilai tambahnya dikarenakan mahasiswa sudah sepakat bahwa kitab kuning sebagai sumber ilmu. Dalam hal membantu mata kuliah lainnya mahasiswa mayoritas menjawab kadang-kadang membantu dan memudahkan dan kadang-kadang tidak. Namun yang sangat disayangkan bahwa mahasiswa tidak punya motivasi untuk belajar membaca kitab kuning selain dari STAIN Bukittinggi.

Kendala-kendala yang dihadapi dosen sesuai dengan yang disampaikan oleh Dosen pengasuh mata kuliah ini adalah pertama kurang motivasi dari mahasiswa, tidak rajin mengulang, kemampuan yang rendah dan kurangnya minat dari mahasiswa dan Mahasiswa kurang belajar. Belajar hanya di lokal saja. Tugas-tugas yang di berikan hanya *copy paste* dari teman-teman lain. Disamping itu mereka tidak menguasai ilmu *alat*. Artinya pondasi tidak kuat.

Adapun kendala dari mahasiswa setidaknya muncul dari person mahasiswa itu sendiri. Seperti kesulitan dalam persoalan qawaid, nahwu, sharaf, istilah-istilah dan lainnya. Juga faktor kemalasan dan tidak mengulang di rumah.

PENUTUP

Kesimpulan

Sesuai dengan permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka temuan penelitian akan dikemukakan berdasarkan permasalahan yang telah disebutkan pada Bab I. Adapun kesimpulan yang dihasilkan:

1. Persepsi dosen dari hasil wawancara bahwa minat mahasiswa terhadap Kitab Kuning ini menurut sangat yang rendah walaupun mereka berlatar belakang madrasah Aliyah ataupun Pesantren. Adapun yang berlatar belakang sekolah umum tidak memadai sama sekali, bahkan tidak bersemangat karena basic mereka yang kurang. Sementara metode yang digunakan adalah membaca teks yang diberikan, tanya jawab dan memberikan tugas. Selain itu menyuruh Mahasiswa membaca secara bergiliran. Membacakan kitab dan mahasiswa harus melihat kepada kitab. Setelah membaca mengulangi kembali *qawaid* yang sudah pernah di ajarkan untuk melihat penerapan *qawaid* tersebut di dalam kitab yang dibaca.
2. Adapun persepsi mahasiswa dalam pembelajaran kitab kuning bahwa mayoritas mahasiswa belum mengetahui apa itu kitab kuning sendiri walaupun dari profil responden mereka dari sekolah agama. Hal ini mungkin dikarenakan cuma dari Pondok Pesantren dan MTI yang akan bersentuhan langsung dengan kitab kuning itu. Mereka juga tidak paham sebelumnya bahwa membaca kitab kuning itu sulit. Begitu juga dalam proses pembelajaran Kitab Kuning apakah metode yang dipakai sudah sesuai atau belum juga mahasiswa mengatakan mayoritas belum sesuai bahkan referensi yang digunakan kadang-kadang sesuai dan kadang tidak sesuai. Dalam hal belajar bersama pasca perkuliahan mayoritas mahasiswa tidak ada yang melakukan.
3. Kendala-kendala yang dihadapi Dosen sesuai dengan yang disampaikan oleh Dosen pengasuh mata kuliah ini adalah pertama kurang motivasi dari mahasiswa, tidak rajin mengulang, kemampuan yang rendah dan kurangnya minat dari mahasiswa dan Mahasiswa kurang belajar. Belajar hanya dilokal saja. Tugas-tugas yang di berikan hanya *copy paste* dari teman-teman lain. Disamping itu mereka tidak menguasai ilmu alat. Artinya pondasi tidak kuat. Adapun kendala dari mahasiswa setidaknya

muncul dari person mahasiswa itu sendiri. Seperti kesulitan dalam persoalan qawaid, nahu, syaraf, istilah-istilah dan lainnya. Juga faktor kemalasan dan tidak mengulang di rumah.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka beberapa saran yang ingin peneliti sampaikan sebagai berikut:

1. Kepada Mahasiswa untuk lebih bergiatan dan tekun dalam Membaca Kitab Kuning dalam proses pembelajaran di Kampus STAIN Bukittinggi.
2. Kepada Dosen STAIN Bukittinggi untuk selalu mengadakan evaluasi terhadap proses pembelajaran baik evaluasi metode maupun referensi yang dipakai dalam mata kuliah MKK tersebut.
3. Kepada pihak STAIN Bukittinggi/pimpinan untuk selalu mengadakan evaluasi serta mengadakan pelatihan bagi dosen-dosen MKK STAIN Bukittinggi. []

ENDNOTES

¹ Lihat Tulisan Adlan Sanur Th, *Nasib Guru Ngaji*, Harian Umun Haluan, Padang, 28 Juli 2008

² Abdurrahman Mas'ud, *Menggagas Format Pendidikan Non Dikotomik*, (Gama Media, Yogyakarta, 2007), Cet. Ke IV hal. 44

³ Lebih jauh hal ini dikutip oleh Adlan Sanur dalam Tulisan opini Adlan Sanur Th, M.Ag, *Nasib PTAI di Era Otoda*, Harian Padang Ekspres, Padang, 20 September 2007

⁴ Martin Van Bruinessen, *Kitab Kuning*, (Bandung: Mizan, 1999), hal.17

⁵ Lihat Opini dalam Tulisan Adlan Sanur Th, *Nasib Kitab Kuning kini*, Harian Singgalang, Padang Sumatera Barat, 11 November 2007

⁶ Lihat Opini dalam Tulisan Adlan Sanur Th, *Rapatka Barisan Menuju UIN*, Harian Singgalang, Padang, 20 Juni 2008

⁷ Lihat Artikel Adlan Sanur Th, *Mau Kemana STAIN Bukittinggi*, Tabloid Al-Itqan, STAIN Bukittinggi, April 2009

⁸ Lihat visi dan Misi STAIN Bukittinggi ini di www.stainbukittinggi.ac.id diakses 28 Oktober 2011

⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Alfabeta, Bandung, 2007), hal.15

¹⁰ Sanapiah Faisal, *Penelitian Kualitatif; Dasar-dasar dan Aplikasi* (Y A 3: Malang 1990) hal 18

¹¹ Mudjia Raharjo, *Sosiologi Pedesaan, Studi Perubahan Sosial*, (Malang: UIN, 2007), Hal.2

¹² Burhan Bungin “*Analisis Data Penelitian Kualitatif*” (PT Raja Grafindo Persada.: Jakarta 2003) h. 67

¹³ Maleong J, Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosda Karya. 1997h 103

¹⁴ Wawancara dengan Zainuddin Tanjung hari Selasa, tanggal 8 November 2011

¹⁵ Wawancara dilakukan dengan Fahmil Samiran, Wawancara dilakukan pada hari Jum’at, tanggal 4 November 2011

DAFTAR PUSTAKA

- Bruinessen, Martin Van, 1999 *Kitab Kuning*, Bandung: Mizan,
- Bungin, Burhan, A 2003 *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, PT Raja Grafindo Persada: Jakarta,
- Elvita, Yanti, 2005 *Persepsi Siswa dan Keberhasilan Belajar*, Analisa, Vol.2 No.1 Januari – Juni 2005
- Faisal, Sanapiah, 1990 *Penelitian Kualitatif ; Dasar-dasar dan Aplikasi*, Y A 3 : Malang
- Irawan, Irawan, 2005 *Evaluasi Proses Belajar Mengajar*, Jakarta: Universitas Terbuka
- Maleong J, Lexy, 1997 *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Margono, S, 1997 *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta: PT. Rineka Cipta,
- Mas’ud, Abdurrahman, 2007 *Menggagas Format Pendidikan Non Dikotomik*, Gama Media, Yogyakarta,
- Nurdin, Roswati 2009 *Faktor-faktor Kesulitan Belajar Mengajar Bahasa Arab pada Mahasiswa Semester II Fakultas Syari’ah Tahun Akademik 2008/2009*, Ambon, Lembaga Penelitian IAIN Ambon
- Rahardjo, Mudjia, 2007 *Sosiologi Pedesaan, Studi Perubahan Sosial*, Malang: UIN,
- Ramly, Nadjamuddin, 2005 *Membangun Pendidikan yang Memberdayakan dan Mencerahkan*, Grafindo, Jakarta
- Rosyid, Abdul, Ketua Forum Mahasiswa Alumni Pesantren Lirboyo (FORMAL) dari skripsi penulis berjudul “*Metode Amtsilati dalam Proses Penerjemahan: Studi Analisis Buku ‘Program Pemula Membaca Kitab Kuning’*”, Karya H. Taufiqul Hakim” di Jurusan Tarjamah Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta
- Salam, Burhanuddin, 2004 *Cara belajar yang Sukses di Perguruan Tinggi*, Jakarta: Rineka Cipta,

- Sanur, Adlan, 2008 *Menuntut Ilmu dan Kemiskinan*, Harian Singgalang, Padang, Minggu 9 Maret 2008
- _____, 2008 *Nasib Guru Ngaji*, Harian Umun Haluan, Padang, 28 Juli 2008
- _____, 2009 *Mau Kemana STAIN Bukittinggi*, Tabloid Al-Itqan, STAIN Bukittinggi, April 2009
- _____, 2007 *Nasib Kitab Kuning kini*, Harian Singgalang, Padang Sumatera Barat, 11 November 2007
- _____, 2007 *Nasib PTAI di Era Otoda*, Harian Padang Ekspres, Padang, 20 September 2007
- _____, 2008 *Rapatkan Barisan Menuju UIN*, Harian Singgalang, Padang, 20 Juni 2008
- Sugiyono, 2007 *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung
- Tim Penyusun Kamus Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, t.th. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka
- Uchayana, Efendi Onong, 1998 *Psikologi Umum*, Jakarta: Bina Aksara
- www.stainbukittinggi.ac.id diakses 28 Oktober 2011
- www.thahiriyyah.com dengan judul Keunikan Kitab Kuning dari yang Gundul sampai tanpa tiada berhenti
- Zainul, Asmawi, 2005 *Penilaian Hasil Belajar*, Universitas Terbuka, Jakarta,
- Yusuf, Tayar 1997 *Metodologi Pengajaran Agama dan Bahasa Arab*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

IMPLEMENTASI KOMPETENSI DOSEN DALAM MEWUJUDKAN AKHLAK MULIA MAHASISWA JURUSAN TARBIYAH STAIN BUKITTINGGI

Darul Ilmi*

***Abstract:** Implementation of Competency Lecturer in Moral Muliah Achieve Student Programs Tarbiyah, motivated by morals charge in the subject faculty who nurtured the tendency is still to be improved. Writing aims to find and describe the implementation of teacher competence in realizing the noble character Bukittinggi students of Department of Tarbiyah STAIN. The approach used is descriptive qualitative with faculty as the object and source of information.*

From the analysis of the data shows that the implementation of teacher competence in achieving better student of noble character is by example, appearance, words and deeds lecturers who praised the spirit for students to emulate. implementation of faculty competence in realizing the noble character of the students are pendemontrasian competencies, cargo noble character becomes an integral part of teaching any subject matter that Amnestied by each lecturer.

The results of the study show that there are differences in the implementation of faculty competence in realizing the noble character Tarbiyah students of Department STAIN Sjech M Djamil Djambek Bukittinggi good pedagogical, personal, social and professional, although they differ in the implementation of competency, but competency lecturers agreed that there should be in charge of noble character of any material presented by the lecturer in instruction

Ideally, teachers in realizing the implementation of competency students are the embodiment of noble character and behavior and personality pendemontrasian faculty to serve as role models for students, on the other hand must synergize faculty competence materialization for moral values to students of any field of study are delivered by faculty must be able to deliver the student has the power of one of the strong moral values in an educational context

Keywords: Competency of Lecturer and Morality

* Dosen STAIN Sjech. M. Djamil Djambek Bukittinggi

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Perguruan tinggi diharapkan dapat melahirkan lulusan yang menguasai keilmuan dan keterampilan sesuai bidang yang ditekuninya sekaligus memiliki akhlak mulia sebagai cerminan dari tercapainya tujuan kognitif (pengetahuan) dan psikomotorik (keterampilan) serta terbentuknya sikap yang baik (afektif) pada diri sarjana atau lulusan perguruan tinggi itu. Harapan tersebut bukanlah harapan yang mengada-ada, karena bagaimanapun hebatnya penguasaan keilmuan dan keterampilan oleh seseorang tanpa dibarengi dengan akhlak yang terpuji justru keilmuan dan ketrampilan yang dimiliki bukan akan membawa manfaat atau kemaslahatan tetapi justru dapat membawa kemudharatan. Buktinya, banyak orang-orang hebat lulusan perguruan tinggi tetapi karena tidak berakhlak mulia justru ia menjadi pelaku korupsi, tidak amanah, tidak menjalankan syari'at agama, melakukan maksiat dan sebagainya. Oleh karena itu mengingat demikian pentingnya akhlak mulia menjadi bagian utama dari kepribadian apalagi bagi seorang sarjana, maka upaya untuk terwujudnya akhlak mulia itu perlu menjadi perhatian utama oleh berbagai pihak yang terkait di perguruan tinggi.

Alih nilai (*transfer of value*) dalam dunia pendidikan seperti di perguruan tinggi pelaku utamanya adalah para dosen dan mahasiswa disamping para pelaku pendidikan lainnya di perguruan tinggi itu. Namun, oleh karena dosen adalah orang yang selalu berhubungan langsung dengan mahasiswa melalui mata kuliah yang diasuhnya maka ia memiliki kesempatan yang luas untuk melakukan alih nilai tersebut kepada mahasiswa. Karena itu, dosen memiliki peranan yang penting untuk terjadinya pembentukan nilai termasuk akhlak mulia pada mahasiswa yang diasuhnya.

Bila akhlak mulia dapat dibentuk mulai dari perguruan tinggi, maka kita akan menyaksikan cikal bakal kepribadian mulia itu tumbuh dan berkembang menjadi kepribadian mahasiswa sebagai cerminan dari keyakinan mahasiswa itu kepada Allah Swt sifat-sifat sebagai *al-khaaliq* tersebut memantul pada akhlak mahasiswa. Dengan demikian akan kelihatan mahasiswa yang sering beribadah di tempat-tempat ibadah kampus, mahasiswa yang selalu menutup auratnya, mahasiswa yang selalu menjaga norma-norma dalam pergaulan antara mahasiswa berbeda jenis, mahasiswa yang memelihara sopan santun dengan para dosennya.

Pembentukan akhlak mulia sebagai salah satu tujuan pendidikan termasuk di perguruan tinggi, tentu tidak akan tercapai begitu saja tanpa adanya upaya yang jelas dan terukur. Dosen sebagai pendidik di perguruan tinggi memerlukan kompetensi (*competency*) yaitu kemampuan yang harus dimiliki untuk melaksanakan tugas-tugas sebagai pendidik di perguruan tinggi.

Kompetensi dosen pada prinsipnya terdiri dari kemampuan dosen mengelola proses pembelajaran (*kompetensi pedagogik*), kemampuan menguasai materi pembelajaran (*kompetensi profesional*), kemampuan kepribadian (*kompetensi personal*), dan kemampuan berinteraksi (*kompetensi sosial*). Dengan mengimplementasikan semua kompetensi itu maka secara teoritis tujuan pembelajaran yang hendak dicapai dosen termasuk muatan akhlak mulia yang diberikan didalamnya akan terwujud sebagai mana diharapkan, karena pada dasarnya hanya dosen-dosen yang memenuhi kompetensi itulah orang-orang yang memenuhi syarat atau mampu melakukan tugasnya secara benar sebagai pendidik di perguruan tinggi.

Dosen perlu mengimplementasikan prinsip-prinsip kompetensi secara benar dan maksimal khususnya dalam mewujudkan muatan akhlak mulia melalui mata kuliah yang diasuhnya. Tanpa cara itu, kemungkinan akhlak mulia belum akan terwujud dikalangan mahasiswa. Misalnya, melalui persiapan pembelajaran dalam bentuk silabus dan rencana pembelajaran harus tergambar muatan-muatan yang akan mewujudkan akhlak mulia. Dosen juga harus bisa menjadi teladan mahasiswa, dan akhirnya menjadi idola mahasiswa (*kompetensi kepribadian*). Dosen betul-betul mampu menjelaskan materi pembelajaran dengan baik (*kompetensi profesional*). Selanjutnya, dosen juga mampu beradaptasi dan bersosialisasi dengan baik dengan pimpinan, sesama dosen dan dengan karyawan, mahasiswa dan masyarakat (*kompetensi sosial*). Demikian seterusnya dosen, harus bisa mengimplementasikan semua item-item dari masing-masing kompetensi itu, terutama yang erat kaitannya untuk mewujudkan akhlak mulia dikalangan mahasiswa.

Jurusan Tarbiyah adalah salah satu jurusan pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Sebagai penyelenggara kegiatan akademik, maka jurusan ini termasuk yang memberikan kontribusi terhadap pengembangan calon-calon tenaga pendidik secara nasional. Lahirnya tenaga-tenaga pendidik yang memiliki keilmuan

yang luas, memiliki keterampilan mendidik yang kuat serta memiliki akhlak yang mulia adalah menjadi salah satu tanggungjawab utama dari jurusan ini. Bila hal ini dapat diwujudkan, tentu Jurusan ini telah memberikan kontribusi yang cukup berarti bagi penembangan tenaga kependidikan Islam kedepan.

Jurusan Tabiyah STAIN Bukittinggi telah memiliki lebih kurang 70 orang dosen tetap beserta dosen luar biasa. Sementara program studi yang telah dimiliki ada 5, dengan jumlah mahasiswa lebih kurang 1200 orang mahasiswa. Jika dosen benar-benar mampu menciptakan mahasiswa yang memiliki keilmuan, keterampilan, dan akhlak mulia yang kuat tentu jurusan ini sangat besar perannya dalam mmenyiapkan tenaga pendidik yang diharapkan.

Namun kalau diperhatikan ada beberapa sinyalemen yang mengkuatirkan apakah jurusan ini mampu melahirkan sosok tenaga pendidik yang diharapkan atau tidak pada masa yang akan datang. Sinyalemen tersebut antara lain seperti yang dikemukakan di bawah ini:

1. Mahasiswa belum tertarik mengunjungi tempat-tempat shalat yang tersedia di lingkungan kampus untuk melakukan shalat ketika waktu shalat masuk.
2. Sebahagian mahasiswa cenderung kurang konsisten dalam berbusana muslimah.
3. Sebahagian mahasiswa ada kecenderungan interaksi yang kurang bagus baik dengan dosen maupun dengan tenaga kependidikan lainnya.
4. Muatan akhlak dalam matakuliah yang diasuh dosen ada kecenderungan masih perlu ditingkatkan.

Beberapa indikasi yang dikemukakan di atas, menunjukkan ada kecenderungan bahwa baik akhlak dengan Allah maupun akhlak dengan sesama manusia, masih perlu ditingkatkan pembinaannya dikalangan mahasiswa Jurusan Tarbiyah STAIN Bukittinggi. Pembinaan akhlak dengan menerapkan kompetensi dosen disinyalir akan dapat memberikan hasil yang lebih baik. Tanpa adanya upaya dan keahlian yang memadai, dikhawatirkan akhlak mahasiswa yang akan menjadi calon tenaga pendidik ini tidak terbentuk sesuai harapan masyarakat, bangsa dan agama.

Menngingat begitu pentingnya impelementasi kompetensi dalam membentuk akhlak mulia mahasiswa penulis tertarik untuk mempelajari,

ke dalam suatu penelitian dengan judul “Impelementasi Kompetensi Dosen dalam Mewujudkan Akhlak Mulia Mahasiswa Jurusan Tarbiyah STAIN Bukittinggi.

FOKUS DAN PERTANYAAN PENELITIAN

Fokus Penelitian

Pelaksanaan kompetensi dosen dalam mewujudkan akhlak mulia mahasiswa Jurusan Tarbiyah STAIN Bukittinggi

Pertanyaan Penelitian:

Bagaimanakah pelaksanaan kompetensi dosen dalam mewujudkan akhlak mulia mahasiswa Jurusan Tarbiyah STAIN Bukittinggi

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan kompetensi dosen dalam mewujudkan akhlak mulia mahasiswa Jurusan Tarbiyah STAIN Bukittinggi
2. Untuk menjelaskan pelaksanaan kompetensi dosen dalam mewujudkan akhlak mulia mahasiswa Jurusan Tarbiyah STAIN Bukittinggi

Manfaat Penelitian

1. Informasi tentang pelaksanaan kompetensi dosen dalam mewujudkan akhlak mulia mahasiswa Jurusan Tarbiyah STAIN Bukittinggi
2. Memperkaya khazanah kemampuan dosen dalam melaksanakan perwujudan akhlak mulia mahasiswa Jurusan Tarbiyah STAIN Bukittinggi
3. Dapat meningkatkan kualitas pelaksanaan kompetensi dosen dalam mewujudkan akhlak mulia mahasiswa Jurusan Tarbiyah STAIN Bukittinggi

LANDASAN TEORITIS

Kompetensi Dosen

Untuk memahami hakikat dari kompetensi dosen, terlebih dahulu perlu dipahami makna dasar dari istilah kompetensi. Pengertian dasar kompetensi (*competency*) adalah kemampuan atau kecakapan. Padanan kata *competency* dalam bahasa Inggris sebenarnya cukup banyak, namun yang lebih relevan menurut Muhibbin Syah¹ adalah kata *proficiency* dan kata *ability* yang memiliki arti kurang lebih sama yaitu kemampuan. Hanya saja kata *proficiency* lebih sering dipakai orang untuk menyatakan kemampuan berperingkat tinggi.

Usman² menjelaskan bahwa kompetensi berarti suatu hal yang menggambarkan kualifikasi atau kemampuan seseorang baik secara kualitatif maupun kuantitatif.

Dalam Undang-undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen dijelaskan ada empat kompetensi yang harus dimiliki oleh dosen antara lain: (1) kompetensi pedagogik, (2) Kompetensi personal, (3) kompetensi profesional dan (4) kompetensi sosial.

1. Kompetensi Pedagogik, Kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran yang dimulai dari persiapan perencanaan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, melaksanakan evaluasi, memahami peserta didik dan mengembangkan potensi peserta didik
2. Kompetensi personal adalah kemampuan kepribadian yang mantap, berakhlak mulia, arif, dan berwibawa serta menjadi teladan bagi peserta didik.
3. Kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi perkuliahan secara luas dan mendalam
4. Kompetensi sosial adalah kemampuan dosen untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien dengan peserta didik, sesama dosen, orang tua mahasiswa dan masyarakat sekitar.

Keempat kompetensi di atas dalam prakteknya merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya sehingga menjadi sebuah pandangan bahwa dosen yang kompeten adalah apabila memiliki kemampuan sebagaimana digambarkan dalam empat kompetensi tersebut.

Konsep Akhlak Mulia dalam Islam

Kata akhlak berasal dari bahasa Arab *al-akhlaq* yang merupakan bentuk jamak dari kata *khuluq* yang berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku, atau tabiat.³ Sinonim dari kata *akhlaq* ini adalah *etika* dan *moral*. Secara terminologis, Ibnu Maskawaih mendefinisikan akhlak sebagai keadaan gerak jiwa yang mendorong ke arah melakukan perbuatan dengan tidak menghajatkan pikiran. Sedang menurut al-Ghazali akhlak adalah suatu sifat yang tetap pada jiwa yang memungkinkan seseorang melakukan perbuatan-perbuatan dengan mudah dan seketika.⁴

Akhlak merupakan salah satu dari tiga kerangka dasar ajaran Islam yang memiliki kedudukan yang sangat penting, di samping dua kerangka dasar la-

innya, yakni aqidah dan syariah. Akhlak (baca: akhlak mulia) merupakan buah yang dihasilkan dari proses penerapan aqidah dan syariah. Ibarat bangunan, akhlak merupakan kesempurnaan dari bangunan tersebut setelah fondasi dan bangunannya kokoh. Jadi, tidak mungkin akhlak ini akan terwujud pada diri seseorang jika tidak memiliki aqidah dan syariah yang memadai. Nabi Muhammad Saw. bersabda dalam salah satu hadis yang berbunyi: “Sesungguhnya aku diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak mulia” (HR. Ahmad). Hadis ini mengisyaratkan bahwa kehadiran Nabi Saw. di muka bumi ini membawa misi pokok untuk menyempurnakan akhlak manusia yang mulia.

Dalam al-Quran ditemukan banyak sekali pokok keutamaan akhlak yang dapat digunakan untuk membedakan perilaku seorang Muslim, seperti perintah berbuat kebajikan (al-birr) (QS. al-Maidah (5): 2), menepati janji (al-wafa) (QS. al-Maidah (5): 1), sabar (QS. al-Baqarah (2): 45), jujur (QS. al-Baqarah (2): 177), takut kepada Allah Swt. (QS. al-Baqarah (2): 189), Ayat-ayat ini merupakan ketetapan dan ketentuan yang mewajibkan pada setiap orang Islam untuk melaksanakan nilai akhlak mulia dalam berbagai aktivitas kehidupannya. Keharusan menjunjung tinggi akhlak mulia lebih dipertegas lagi oleh Nabi Saw. melalui hadis-hadisnya.

Sumber untuk menentukan akhlak dalam Islam, apakah termasuk akhlak mulia atau akhlak tercela adalah al-Quran dan Sunnah (Hadis). Baik dan buruk dalam akhlak, menurut Islam, ukurannya adalah baik dan buruk menurut kedua sumber itu, bukan baik dan buruk menurut ukuran manusia.

Namun demikian, Islam tidak menafikan adanya standar lain selain al-Quran dan Sunnah untuk menentukan baik dan buruk akhlak manusia. Standar tersebut adalah akal dan nurani manusia serta pandangan umum masyarakat (adat/tradisi). Manusia dengan hati nuraninya dapat juga menentukan ukuran baik dan buruk, sebab Allah memberikan potensi dasar kepada manusia berupa tauhid (QS. al-A'raf (7): 172 dan QS. al-Rum (30): 30).⁵ Hati nuraninya selalu mendambakan dan merindukan kebenaran, ingin mengikuti ajaran-ajaran Allah Swt. dan Rasul-Nya karena kebenaran itu tidak akan dicapai kecuali dengan Allah Swt. sebagai sumber kebenaran mutlak. Namun demikian, harus diakui bahwa fitrah manusia tidak selalu dapat berfungsi dengan baik. Pendidikan dan pengalaman manusia dapat mempe-

ngaruhi eksistensi fitrah manusia itu.⁶ Akal pikiran manusia dan tradisi juga sama kedudukannya seperti hati nurani.

Secara umum akhlak Islam dibagi menjadi dua, yaitu akhlak mulia (*al-akhlaq al-mahmudah/al-karimah*) dan akhlak tercela (*al-akhlaq al-madzmumah/alqabihah*). Dilihat dari ruang lingkupnya akhlak Islam dibagi menjadi dua bagian, yaitu akhlak terhadap Khaliq (Allah Swt.) dan akhlak terhadap makhluk (selain Allah Swt.). Akhlak terhadap makhluk masih dirinci lagi menjadi beberapa macam, seperti akhlak terhadap sesama manusia, akhlak terhadap makhluk hidup selain manusia (seperti tumbuhan dan binatang), serta akhlak terhadap benda mati.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yang dalam bidang pendidikan lazim disebut inkuiri naturalistik. Pendekatan ini menurut David D. Williams⁷ bertolak dari paradigma: **pertama**, realitas itu bersifat ganda, hasil konstruksi dan holistik. **Kedua**, hubungan peneliti dengan yang diteliti interaktif dan tak dapat dipisahkan. **Ketiga**, posibilitas generalisasi hanya mungkin dalam ikatan konteks dan waktu. **Keempat**, posibilitas dalam membangun jalinan hubungan kausal mustahil memisahkan sebab-sebab dengan akibatnya pada semua keadaan secara simultan, **Kelima**, tidak bebas nilai.

Dengan mengacu pada paradigma tersebut, maka fokus masalah yang diakumulasikan dari temuan fenomena-fenomena empirik (situasi alamiah) pada penelitian pendahuluan (*grand tour*) tentang implementasi kompetensi dosen dalam mewujudkan akhlak mulia mahasiswa harus dilakukan pemaknaan perilaku dan tindakan orang-orang dalam situasi dan konteks sosialnya.

LOKASI DAN WAKTU PENELITIAN

Penelitian ini akan dilaksanakan terhadap dosen-dosen Jurusan Tarbiyah dalam mengimplementasikan Kompetensi pedagogik, personal, profesional dan sosial dalam mewujudkan akhlak mahasiswa.

Subjek Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian ini yang menjadi informannya adalah (1) dosen Jurusan Tarbiyah (2) mahasiswa. Dari beberapa subjek penelitian

tersebut yang di jadikan Informan kunci adalah dosen, karena dosen adalah pelaksana langsung proses implemmentasi kompetensinya.

Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi dilakukan terhadap guru yang sedang mengajar di dalam kelas, bagaimana guru membangun interaksi di dalam kelas dengan siswa, guru memperlakukan siswa dan juga tentang kondisi siswa di sekolah serta keadaan siswa di luar sekolah, status sosial siswa, keadaan orang tuanya, peneliti akan menggunakan observasi non partisipan, kemudian hasil observasi ini peneliti membuat *field notes*.

2. Wawancara

Untuk memperoleh data yang memadai tentang implementasi kompetensi dosen dalam proses perkuliahan, peneliti juga menggunakan teknik wawancara. Hal ini dilakukan untuk memperoleh informasi yang akurat, implemmentasi kompetensi dosen dalam mewujudkan akhlak mulia mahasiswa Jurusan Tarbiyah STAIN Bukittinggi Wawancara yang dilakukan menggunakan teknik wawancara tidak terstruktur, artinya penulis tidak menggunakan daftar pertanyaan yang telah tersusun, tetapi pertanyaan dikembangkan menurut situasi dan kondisi pada saat wawancara berlangsung dengan tetap mengacu kepada topik permasalahan yang dikaji. Untuk itu wawancara yang akan penulis lakukan adalah secara informal dan ditempat-tempat yang tidak resmi, sehingga pada saat wawancara, hubungan peneliti dengan aktor terjadi dalam suasana alami.

Kedua dengan menggunakan teknik wawancara formal dan terstruktur artinya wawancara dilakukan dengan cara mempersiapkan daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya, dan perlu ada kesepakatan tempat, waktu dan kondisi dengan informen. Pertanyaan ini akan mengacu kepada bagaimana dosen melaksanakan kompetensi pedagogik, personal, profesional dan sosial dalam rangkan mewujudkan akhlak mulia mahasiswa. Dari sisi lain wawancara juga ada dalam bentuk tertutup, dimana yang diwawancarai tidak mengetahui dan tidak menyadari bahwa mereka sedang di wawancarai. Wawancara juga dilakukan melihat pendapat, perasaan terhadap kondisi yang dialami dosen dan mahasiswa. Wawancara ini ditujukan kepada dosen dan mahasiswa Jurusan Tarbiyah STAIN Bukittinggi

3. Field Notes

Disamping alat pengumpulan data di atas peneliti juga menggunakan *field notes* sebagai instrumen yang sangat penting dalam penelitian kualitatif artinya waktu peneliti berada dilapangan, peneliti hanya membuat catatan singkat, kata-kata kunci, bahkan kode-kode, namun setelah kembali dari lapangan, peneliti menyusun catatan lapangan, karena catatan yang dibuat setelah kembali dari lapangan akan berbeda dengan apa yang dicatat di lapangan.

4. Studi Dokumentasi

Menurut Nasution⁸ data dari dokumen termasuk *non human resources* yang dapat dimanfaatkan karena memberi keuntungan dari bahan yang telah ada. Dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk mengungkapkan data yang bersifat administratif, seperti data geografis, struktur organisasi, struktur personalia, denah, RPP, Buku referensi, biografi, foto sketsa.

Teknik Penjaminan Keabsahan Data

Dalam mencermati data yang diperoleh, peneliti menggunakan teknik “triangulasi”, yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu di luar data itu, hal ini dapat dilakukan dengan cara (1) membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara, (2) membandingkan apa dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi, (3) membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu, (4) membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan, (5) membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan (Lexy J. Moleong, 2007:331).

Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan teknik sebagaimana dianjurkan oleh Miles dan Herberman,⁹ yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hal senada juga dikemukakan oleh Bogdan¹⁰ bahwa analisis data merupakan proses mencari dan mengatur secara sistematis hasil temuan. Ia menganjurkan bahwa cara yang lebih efektif dalam menganalisis data, antara lain; (1) mengorganisasikan data; (2)

merumuskan dan menafsirkan data- data yang terkumpul, dan (3) membuat ikhtisar

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendidikan Tinggi Agama Islam merupakan bagian dari pendidikan nasional yang berfungsi membantu terbina tujuan dan fungsi pendidikan nasional. Dalam PP nomor 55 Tahun 2007 tentang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan pasal 2 ayat 1 juga ditegaskan bahwa pendidikan agama berfungsi membnetuk manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia dan mampu menjaga kedamaian dan kerukunan hubungan inter dan antar umat beragama.

Melihat demikian pentingnya pendidikan agama di Sekolah dan di perguruan tinggi, maka pendidikan agama khususnya pendidikan agama Islam berperan penting ikut mewujudkan tujuan pendidikan nasional, terutama mempersiapkan peserta didik dalam memahami ajaran-ajaran agama serta melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari.

Perkuliahan di Jurusan Tarbiyah STAIN Bukittinggi dilaksanakan dengan empat cara yaitu perkuliahan di kelas, kuliah umum, totorial dan pengawasan terhadap perilaku mahasiswa, perkuliahan pokok adalah kegiatan yang dilakukan oleh dosen yang berhadapan langsung dengan mahasiswa di kelas, kuliah umum sering disebut stadium generale juga merupakan bagian perkuliahan yang mendatangkan nara sumber.

Tutorial adalah rangkaian perkuliahan yang dikelola oleh para tutor yang wajib diikuti oleh setiap mahasiswa, program tutorial dalam bentuk praktek dimaksudkan untuk membantu mahasiswa dalam penguasaan metodologi pembelajaran sedangkan bentuk akhir dari perkuliahan adalah pengawasan perilaku mahasiswa baik dalam kampus maupun diluar kampus.

Dari empat bentuk perkuliahan itu, diharapkan dosen menerapkan empat kompetensi pula yang dimilikinya tidak hanya sekedar memberi mahasiswa tentang materi dari pencapaian kognitif tetapi lebih penting dari itu adalah memiliki kompetensi sikap dan perilku serta mengamalkan materi yang telah dipelajarinya.

Gambaran perkuliahan pada Jurusan Tarbiyah terutama pada program studi pendidikan agama Islam melalui jawaban mahasiswa bahwa perkuliahan memberikan manfaat bagi mahasiswa, walaupun jawaban

mereka berbeda-beda, namun sebagian besar (90 %) menyatakan bahwa PAI memberikan tambahan ilmu khususnya tentang keislaman yang belum diperolehnya di jenjang pendidikan dasar dan menengah. Lebih lanjut mahasiswa menyatakan bahwa melalui perkuliahan PAI motivasi untuk beragama semakin bertambah terutama dalam memahami hakikat agama Islam, mahasiswa mulai menyadari betapa pentingnya Islam untuk didalami dan diterapkan dalam kehidupan nyata.

Berdasarkan observasi yang penulis lakukan terhadap mahasiswa di awal-awal perkuliahan sikap dan kebiasaan masih diwarnai oleh sikap dan kebiasaan mereka waktu di SLTA, namun setelah mendapatkan motivasi dan penyajian-penyajian materi oleh dosen mahasiswa mulai mulai merubah kebiasaannya seperti berpakaian, sikap egois.

Semua materi dalam perkuliahan memiliki muatan akhlak mulia karena salah satu tujuan Jurusan Tarbiyah adalah terbentuknya akhlak mulia mahasiswa, hal ini sesuai dengan konsep pendidikan yang digambarkan dalam undang-undang nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional pasal 1 ayat 1 pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritual keagamaa, pengendalian diri, kecerdasan, kepribadian, akhlak mulia dan keterampilan yang diperlukan dirinya masyarakat bangsa dan negara.

Dari pengertian pendidikan di atas seluruh materi yang ada harus mengantarkan mahasiswa memiliki kekuatan spritual keagamaan yang berarti taat dalam menjalankan agama, cerdas, memiliki kepribadian, pengendalian diri dan akhlak mulia, hal ini tergantung kepada kompetensi dosen untuk melaksanakan pembelajaran.

Dosen-dosen pada Jurusan Tarbiyah dalam perkuliahan telah menyelipkan pesan-pesan moral dari materi-materi yang ada seperti dosen meminta mahasiswa untuk mencari satu artikel tentang Islam dari sumber apapun juga, lalu mahasiswa diminta untuk melakukan analisisnya, tugas ini sebenar untuk memotivasi mahasiswa agar tumbuh kesadaran dalam dirinya terkait dengan pesan-pesan moral yang ditangkap dari artikel yang dianalisis, semua dosen pada Jurusan Tarbiyah sepakat bahwa semua materi dalam perkuliahan harus bermuatan akhlak mulia yang terimplementasi dalam kompetensi dosen sebagai amanah dari undang-undang sisdiknas yang tercerimin dalam setiap pembelajaran dari materi dan topik apa saja.

Hal ini berarti perkuliahan bukan hanya pencapaian kompetensi kognitif tetapi juga pencapaian kompetensi afektif bagi mahasiswa, namun perilaku mahasiswa sepenuhnya tercapai.

Dari wawancara yang penulis lakukan dengan dosen-dosen Jurusan tarbiyah STAIN Bukittinggi terkait dengan implementasi kompetensi yang dimiliki dosen dalam mewujudkan akhlak mulia mahasiswa dapat dijelaskan sebagai berikut:

Apa muatan akhlak mulia yang terdapat dalam pelaksanaan kompetensi dosen Jurusan Tarbiyah STAIN Bukittinggi ?

Pertanyaan di atas tergambar dari jawaban dosen melalui kompetensi yang dimilikinya.

Muatan Akhlak Mulia dalam Kompetensi Pedagogik

Kompetensi pedagogik adalah kompetensi yang meliputi pemahaman dosen terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil pembelajaran dan mengaktualisasikan potensi peserta didik.

Memahami peserta didik secara mendalam berarti memahami peserta didik dengan memanfaatkan prinsip-prinsip perkembangan kognitif, prinsip kepribadian dan mengidentifikasi persiapan peserta didik dalam pembelajaran.

Muatan akhlak mulia dalam perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan oleh dosen dengan memasukkan kata religius seperti salam, berdoa dalam satuan acara perkuliahan (SAP) serta mengelaborasi materi perkuliahan dengan menghubungkan dengan penguatan akhlak mulia bagi mahasiswa ini dilakukan oleh seluruh dosen.

Berdasarkan observasi penulis menunjukkan bahwa secara umum dosen mengembangkan prinsip-prinsip pengembangan kognitif melalui metode diskusi dan tanya jawab dalam proses pembelajaran, sehingga mahasiswa diberi kesempatan untuk mengeluarkan pendapat terutama mata kuliah keagamaan, sosial, namun pada mata kuliah eksakta memang lebih banyak dosen menjelaskan materi dan memberikan latihan, tetapi memang lebih sedikit pesan-pesan moral dibanding dengan mata kuliah keagamaan dan materi sosial.

Dosen belum sepenuhnya memahami dan melayani peserta didik sesuai dengan perkembangan peserta didik, hal ini dikarenakan kepribadian

mahasiswa yang berbeda, namun dosen tetap berupaya mengakomodir kebutuhan mahasiswa agar materi pembelajaran dapat dipahami oleh mahasiswa. Pembelajaran yang baik bukan seberapa banyak materi sampai kepada mahasiswa, tetapi seberapa banyak mahasiswa dapat memahami materi perkuliahan tersebut.

Dosen telah melakukan identifikasi bahan ajar awal terhadap mahasiswa seperti memberikan tugas untuk menemukan materi perkuliahan selanjutnya sesuai dengan materi yang ada dalam silabus baik di perpustakaan maupun di internet kemudian mahasiswa menganalisis materi dan disampaikan dalam diskusi kelas. Melalui pembelajaran tersebut dosen mengidentifikasi kepribadian mahasiswa terutama berkaitan dengan akhlak mulia.

Elaborasi materi bagi dosen kependidikan, sosial dan keagamaan lebih banyak melakukan pesan-pesan moral terhadap mahasiswa dibanding dengan dosen materi eksak, termasuk melaksanakan metode pembelajaran yang bersifat inkuiri, diskoveri lebih dikembangkan oleh dosen-dosen non eksakta dibanding dengan dosen eksakta, namun semua dosen memiliki muatan akhlak mulia dalam proses pembelajaran meskipun dengan dimensi dan volume yang berbeda, hal ini terlihat dari jawaban dosen terkait dengan : (1) memulai dan mengakhiri dengan salam dan do'a meskipun tidak semua dosen melaksanakannya, (2) memperhatikan keaktifan mahasiswa dalam mengikuti kuliah, (3) memperhatikan pakaian yang digunakan mahasiswa, (4) mengamati sikap dan perilaku mahasiswa di kelas dan di luar kelas.

Muatan Akhlak Mulia dan Kompetensi Kepribadian

Kompetensi kepribadian merupakan kemampuan personal yang mencerminkan keribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik. Pelaksanaan berkenaan dengan kompetensi ini berkaitan dengan karakteristik masing-masing dosen dan gaya masing-masing dosen, meskipun secara keilmuan mendidik itu bisa sama karena bisa dipelajari, namun menyangkut gaya, performansi dosen tidak sama, ini disebabkan karena manusia itu memiliki dimensi keindividualan, tidak ada manusia itu sama dilahirkan meskipun anak kembar.

Dosen mempedomani peraturan akademik dalam melaksanakan proses perkuliahan, meskipun dipertanyakan tingkat konsistensi dosen

dalam memahami peraturan tersebut, karena masih kelihatan dosen yang terlambat memulai perkuliahan dari waktu yang tersedia.

Muatan Akhlak Mulia dalam Kompetensi Sosial

Kompetensi Sosial adalah kemampuan dosen untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua mahasiswa dan masyarakat sekitar. Kompetensi ini memiliki sub kompetensi (a) mampu berkomunikasi dan bergaul dengan peserta didik secara efektif dan simpatik, (b) mampu berkomunikasi dan bergaul dengan sesama pendidik, (c) mampu berkomunikasi dan bergaul dengan masyarakat sekitar dan dimana mereka berada.

Dosen adalah sosok yang dapat ditiru oleh mahasiswa, baik sikap, perbuatan, tutur kata termasuk performan. Dalam Islam komunikasi digambarkan oleh rasul sebagaimana Rasulullah saw mengajarkan berkomunikasi kepada kita. Misalnya, pertama, *qulil haqqa walaunkana murrn* (katakanlah apa yang benar walaupun pahit) (hadis). Kedua, *falyakul khairan au liyasmut* (katakanlah bila benar kalau tidak bisa, diamlah). Ketiga, *laa takul qabla tafakur* (janganlah berbicara sebelum berpikir terlebih dahulu). Keempat, Nabi menganjurkan berbicara yang baik-baik saja, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya, “*Sebutkanlah apa-apa yang baik mengenai sahabatmu yang tidak hadir dalam pertemuan, terutama hal-hal yang kamu sukai terhadap sahabatmu itu sebagaimana sahabatmu menyampaikan kebaikan dirimu pada saat kamu tidak hadir*”. Kelima, selanjutnya Nabi saw berpesan, “*Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang...yaitu mereka yang menjungkirkan-balikkan fakta (fakta) dengan lidahnya seperti seekor sapi yang mengunyah-ngunyah rumput dengan lidahnya*”. Pesan Nabi saw tersebut bermakna luas bahwa dalam berkomunikasi hendaklah sesuai dengan fakta yang kita lihat, kita dengar, dan kita alami.

Dalam berbagai literatur tentang komunikasi Islam dapat ditemukan setidaknya enam jenis gaya bicara (*qaulan*) yang dikategorikan sebagai kaidah, prinsip, atau etika komunikasi Islam, yakni (1) *Qaulan Sadida*, (2) *Qaulan Baligha*, (3) *Qulan Ma'rufa*, (4) *Qaulan Karima*, (5) *Qaulan Layinan*, dan (6) *Qaulan Maysura*.

Muatan Akhlak Mulia dalam Kompetensi Profesional Dosen

Kompetensi profesional merupakan penguasaan materi pembelajaran secara luas mendalam yang berkenaan dengan materi kuliah yang diampu, sub kompetensinya penguasaan terhadap struktur dan metodologi keilmuan, intinya kompetensi profesional adalah menguasai substansi keilmuan yang terkait dengan bidang yang diampu dosen.

Penguasaan materi secara luas dan mendalam mengacu kepada sebuah pandangan bahwa dosen memiliki (1) pemahaman terhadap karakteristik peserta didik, (2) penguasaan bidang studi baik dari sisi keilmuan maupun kependidikan, (3) kemampuan menyelenggarakan perkuliahan yang mendidik, (4) kemauan dan kemampuan mengembangkan profesionalitas dan kepribadian secara berkelanjutan. Dalam hal ini dosen diberi keleluasaan dan kesempatan mengembangkan, menyusun materi ajar sesuai dengan tujuan dan kebutuhan mahasiswa, pesan-pesan akhlak dapat dirumuskan oleh dosen baik secara tertulis maupun tersembunyi (*hidden curriculum*)

Ketika ditanya kepada dosen apakah Bapak/Ibuk mengaitkan materi perkuliahan dengan kehidupan sehari-hari mahasiswa, responden menjawab saya selalu mengaitkan materi ajar dengan aspek kehidupan mahasiswa, saya menyelipkan pesan-pesan moral dalam materi perkuliahan, Apa bentuk *hidden curriculum* yang Bapak/Ibuk sampaikan? Responden menjawab menyangkut perilaku dan pergaulan mahasiswa baik didalam kampus maupun diluar kampus

PELAKSANAAN KOMPETENSI DOSEN

Sebagai pendidik di perguruan tinggi dosen jelas harus memiliki kompetensi dan mampu mengimplementasikannya dalam proses pembelajaran agar menghasilkan output dan outcome yang diharapkan baik dalam bentuk keilmuan (*kognitif*) maupun sikap (*attitude*) serta keterampilan (*psikomotorik*), namun terbentuknya akhlak mulia, disamping tujuan di atas adalah salah satu tujuan utama harus dicapai melalui proses perkuliahan, sebab tanpa terbentuknya akhlak sebagai calon sarjana termasuk calon guru, maka tidak banyak artinya gelar tersebut. Kesarjanaan mereka akan memiliki nilai tambah bila dibarengi dengan akhlak mulia, oleh karena itu perlu ada upaya khusus oleh dosen melalui mata kuliah yang diampunya.

Pelaksanaan Kompetensi Dosen dalam Mewujudkan Akhlak Mulia

Kompetensi dosen dalam pembelajaran terbagi menjadi dua jenis yaitu kompetensi personal dan kompetensi operasional. Kompetensi personal adalah pengetahuan mengenai sesuatu, sedangkan kompetensi operasional adalah kemampuan untuk mendemonstrasikan sesuatu secara praktis.

Pelaksanaan kompetensi dosen dapat dilihat dalam empat kompetensi (1) kompetensi pedagogik, (2) kompetensi personal, (3) kompetensi sosial, (4) kompetensi profesional.

Ramsden mengungkapkan bahwa kunci pembelajaran efektif dalam menyusun frame kerja validasi kompetensi dosen dalam melaksanakan pembelajaran memiliki beberapa elemen antara lain: (1) ketertarikan terhadap pembelajaran, (2) apresiasi dan respek terhadap siswa dan cara belajarnya, (3) ketepatan melaksanakan *asesment* dan umpan balik, (4) kejelasan tujuan dan minat pada tantangan intelektual, (5) kemandirian, (6) kendali dan pengembangan diri secara aktif.

Untuk menjawab pelaksanaan kompetensi dosen yang lebih baik dalam mewujudkan akhlak mulia mahasiswa terungkap melalui ungkapan mahasiswa pelaksanaan kompetensi dosen yang lebih baik adalah melalui keteladanan, penampilan, tutur kata dan perbuatan dosen yang terpuji menjadi spirit bagi mahasiswa untuk dicontoh.

Ungkapan di atas juga didukung beberapa penelitian bahwa aspek kepribadian dosen dalam pembelajaran memainkan peranan yang sangat penting dalam pembentukan identitas dosen pada profesinya untuk memberikan layanan akademik dan profesional. Aspek kepribadian yang dapat ditirukan seperti empati dan kemampuan untuk meregulasi emosi dalam pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa (*student center learning*), dosen harus mendukung mahasiswa dalam perkembangan mereka sebagai pembelajar aktif dan mandiri yang mampu berfikir kritis, dengan arti kata dosen harus mampu membantu mahasiswa untuk belajar tentang keterampilan yang berkaitan dengan belajar secara mandiri dan berfikir kritis.

Data di lapangan menunjukkan bahwa keberhasilan dan kesuksesan dosen dalam pembelajaran tidak hanya terkait penguasaan terhadap materi ajar, strategi dan metode yang baik, pengukuran hasil belajar mahasiswa, tetapi juga bagaimana tindak lanjut pengamalan ilmu oleh peserta didik dan perilaku terpuji yang ditampilkan oleh mahasiswa melalui peniruan dari kepribadian dosen.

Dari pernyataan di atas terlihat bahwa pelaksanaan kompetensi dosen dalam mewujudkan akhlak mulia mahasiswa adalah pendemonstrasian dari kompetensi yang dimilikinya, muatan akhlak mulia menjadi bagian yang tak terpisahkan dari materi ajar setiap mata kuliah yang diampu oleh masing-masing dosen, hal ini terungkap melalui wawancara penulis dengan responden apakah masalah akhlak mulia merupakan bagian yang tak terpisahkan dari setiap materi yang disampaikan oleh dosen dalam perkuliahan.

Dari jawaban di atas dapat dipahami bahwa terintegrasinya setiap materi dengan nilai atau akhlak mulia adalah sebuah tuntutan dalam proses perkuliahan, artinya apapun materi yang disampaikan dosen mesti terkandung muatan akhlak mulia bagi mahasiswa, hal ini juga diamanahkan dalam undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional ketika mendefinisikan pendidikan yaitu usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritual keagamaan, pengendalian diri, kecerdasan, kepribadian, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan negara.

Pengertian di atas menjelaskan bahwa setiap materi perkuliahan apapun yang diampu oleh dosen mesti mengantarkan peserta didik untuk memiliki kekuatan spritual keagamaan artinya menjalankan ajaran agama secara baik mampu mengendalikan diri, cerdas secara intelektual maupun emosional, memiliki kepribadian yang stabil, akhlak mulia dan keterampilan baik mata kuliah keagamaan maupun mata kuliah umum.

PENUTUP

Hasil kajian menunjukkan bahwa masih terdapat perbedaan pelaksanaan kompetensi dosen dalam mewujudkan akhlak mulia mahasiswa Jurusan Tarbiyah STAIN Sjech M Djamil Djambek Bukittinggi baik kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial dan profesional, meskipun berbeda dalam implementasi kompetensi, namun dosen sepakat bahwa dalam kompetensi mesti ada muatan akhlak mulia dari setiap materi yang disampaikan oleh dosen dalam perkuliahan bukan saja materi-ateri keagamaan tetapi juga materi ajar umum.

Perbedaan pelaksanaan kompetensi dosen kesenjangan antara rencana secara tertulis dengan implementasi di kelas, hal ini terlihat ada yang memuatkan nilai akhlak mulia secara terencana dan ada secara tersembunyi namun dilaksanakan dalam proses pembelajaran.

Secara ideal pelaksanaan kompetensi dosen dalam mewujudkan akhlak mulia mahasiswa adalah perwujudan dan pendemonstrasian perilaku dan kepribadian dosen untuk dijadikan penutan bagi mahasiswa, dilain pihak dosen mesti mensinergikan kompetensi yang dimiliki untuk perwujudan akhlak mulia bagi mahasiswa apapun bidang kajian yang disampaikan oleh dosen harus mampu mengantarkan mahasiswa memiliki kekuatan akhlak mulia salah satu kekuatan dalam konteks pendidikan. []

ENDNOTES

- 1 Muhibbin Syah (2008:229)
- 2 Usman (1994:1)
- 3 Hamzah Ya'qub. *Etika Islam: Pembinaan Akhlaqlkarimah (Suatu Pengantar)*. (Bandung: CV Diponegoro 1988). Cet. IV. p.11
- 4 Alavi, Hamed Reza. 2007. "Al-Ghazali on Moral Education". *Jurnal of Moral Education*. Vol. 36, No. 3, September 2007, pp. 309-319. ISSN 1465-3877 (online)/07/030309-11. (London: Routledge Publisher). p.313
- 5 QS. al-A'raf (7): 172 dan QS. al-Rum (30): 30
- 6 (Ilyas, 2004: 4).
- 7 David D. Williams (1990)
- 8 Nasution, Harun. *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya Jilid I*. (Jakarta: UI Press, Cetakan V. 1985)
- 9 Miles dan Herberman (1992)
- 10 Robert Bogdan, *Introduction to Quality Research Methods*, New York: John Wiley & Sons 1975)

DAFTAR PUSTAKA

- Allen, Mendler N. 2010, *Mendidik dengan Hati*, Bandung: Kaifa Al-Abrasyi, M. Athiyah. 1987. *al-Tarbiyyah al-Islamiyyah -Dasar-dasar Pokok Pendidikan Islam*. Terj. oleh H. Bustami A.Ghani. dan Djohar Bahry. Jakarta: Bulan Bintang.
- Alavi, Hamed Reza. 2007. "Al-Ghazali on Moral Education". *Jurnal of Moral Education*. Vol. 36, No. 3, September 2007, pp. 309-319. ISSN 1465-3877 (online)/07/030309-11. London: Routledge Publisher.

- Al-Faruqi, Isma'il Raji. 1988. *Tawhid: Its Implications for Thought and Life Tauhid. Terjemah oleh Rahmani Astuti*. Bandung: Pustaka. Al-Kutub al-Tis'ah. CDProgram Hadis Nabi Muhammad Saw.
- Al-Quran al-Karim. Depdiknas RI. 2004. *Pengembangan Kultur Sekolah*. Jakarta: Depdiknas RI.
- Djatnika, Rachmat. 1996. *Sistem Etika Islami (Akhlak Mulia)*. Jakarta: Pustaka Panjimas.
- Donald, Ary, 1974, *Instrodution to Research in Education*, Sixth Edition, USA: Wadsworth Thomson Learning
- Bogdan, Robert, 1975, *Introduction to quality research methods*, New York
- Bogan, Biklen, 1982, *Qualitative Research For Education An Introduction to theory and Methods*, Allyn and Bacon Syracuse University
- Bogdan, R.C., & Taylor, S.J, 1975, *Introduction to qualitative Research Methods*, New York: John Wiley & Sons
- Ilmi, Darul, 2009, *Dasar-Dasar Pendidikan dan Pembelajaran*, Pekanbaru: CV. Wisfer Multiguna
- Echols, M. John dan Hassan Shadily. 1995. *Kamus Inggris Indonesia: An English-Indonesian Dictionary*. Jakarta: PT Gramedia. Cet. XXI. Ilyas, Yunahar. 2004. *Kuliah Akhlaq*. Yogyakarta: LPPI UMY. Cet. IV.
- Ensiklopedi Metodologi Al-Quran, Aspek Pendidikan*
- Hamzah, Uno B. 2008, *Profesi Kependidikan*, Jakarta: Bumi Aksara
- Khaoiron, Rosyadi 2004, *Pendidikan Profetik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Mulyasa, E. 2011, *Manajemen Pendidikan Karakter*, Jakarta: Bumi Aksara
- Nasution, Harun. 1985. *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya* Jilid I. Jakarta: UI Press, Cetakan V.
- Strike, Kenneth A. 1985, *The Ethics of Teaching*, New York: Teaching College Press
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. 2001. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. Edisi 3 Cet. I.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Ya'qub, Hamzah. 1988. *Etika Islam: Pembinaan Akhlaqulkarimah (Suatu Pengantar)*. Bandung: CV Diponegoro. Cet. IV.

STUDI KOMPARASI METODE *ARITHMETIC CODING* DAN *HUFFMAN CODING* DALAM ALGORITMA ENTROPY UNTUK KOMPRESI CITRA DIGITAL

Hari Antoni Musril*

Abstract: Nowadays, there are many methods of data compression available. Most of them can be classified into one of the two big categories, i.e., statistical based and dictionary based. An Example of dictionary based coding is Lempel Zip Welch. The example of statistical based coding are Huffman coding and Arithmetic coding, as the newest algorithm. This paper describes the principles of Arithmetic coding along with its advantages compared to Huffman coding method. In this final paper conducted compression of digital image by use of Arithmetic Coding and Huffman Coding. The test image which have been selected compressed use Minerva software, first image compressed by Arithmetic Coding, then same image compressed by Huffman Coding. Afterwards by using facility exist in Minerva software will getting time use for compression, compression ratio, and image size measure result of compression. As the final conclusion, the algorithm is outstanding for the use of data compression matters. The number of bit coding of arithmetic is less than that of Huffman coding. The modification with the numerical integer is capable of dealing with the limitations of the encoder and decoder equipments over to long floating point processing. Due to the less number of the bit codings, and can be implemented. At Arithmetic Coding getting big compression ratio and image size measure result of compression which is smaller to be compared to Huffman Coding, but time required by Huffman Coding quicker compared to Arithmetic Coding.

Keywords: Arithmetic Coding, Huffman Coding, data compression, algorithm

* Dosen STAIN Sjech. M. Djamil Djambek Bukittinggi

PENDAHULUAN

Pengolahan citra secara digital mulai diminati pada awal tahun 1921, pada saat pertama kalinya sebuah foto berhasil ditransmisikan secara digital melalui kabel laut dari kota New York ke kota London (*Bartlane Cable Picture Transmission System*). Keuntungan utama yang dirasakan pada saat itu adalah pengurangan waktu pengiriman foto dari sekitar 1 minggu menjadi kurang dari 3 jam. Foto tersebut dikirim dalam bentuk kode digital dan kemudian diubah kembali oleh *pointer telegraph*.¹

Perkembangan teknologi digital memperlihatkan kemajuan yang sangat pesat. Data digital selain mudah dalam penyebarannya melalui jaringan internet, juga mudah dan murah dalam penggandaan serta penyimpanannya. Perkembangan ini juga berhubungan erat dengan ketersediaan media penyimpanan yang dibutuhkan untuk menyimpan data tersebut. Kebutuhan ini disebabkan karena data yang disimpan semakin lama semakin banyak, dan ukuran data yang besar.

Teknologi kompresi data merupakan suatu teknologi yang bertujuan untuk memaksimalkan keterbatasan ruang penyimpanan. Tujuan utama dari diciptakannya teknologi ini adalah untuk efisiensi ruang dan waktu, dimana kedua elemen inilah yang menjadi titik fokus para pengguna komputer untuk dimaksimalkan.

Kompresi citra bertujuan untuk meminimalkan jumlah bit yang diperlukan dalam merepresentasikan citra. Kompresi citra dikembangkan untuk memudahkan penyimpanan dan pengiriman citra. Teknik kompresi yang ada sekarang memungkinkan citra dikompresi sehingga ukurannya menjadi jauh lebih kecil daripada ukuran citra asli.

Berdasarkan output, kompresi data dikelompokkan menjadi teknik kompresi data secara *lossless* dan *lossy*. Kompresi tipe *lossy* adalah kompresi dimana terdapat data yang hilang selama proses kompresi, akibatnya kualitas data yang dihasilkan jauh lebih rendah daripada kualitas data asli. Sementara itu, kompresi tipe *lossless* tidak menghilangkan informasi setelah proses kompresi terjadi, akibatnya kualitas citra hasil kompresi tidak menurun. Pada tulisan ini akan memfokuskan proses kompresi dengan tipe *lossless*.²

Tipe kompresi secara *lossless* terdiri dari beberapa algoritma di antaranya *run length encoding*, *entropy encoding*, dan *adaptive dictionary based*. Tulisan ini akan menggunakan algoritma *entropy* sebagai teknik kompresi

citra. Algoritma *entropy* terdiri dari *arithmetic coding* dan *huffman coding*, akan dilakukan perbandingan antara kedua metode tersebut.

Perumusan Masalah

Rumusan masalah pada tulisan ini adalah :

1. Bagaimana proses kerja kompresi citra digital dengan metode *arithmetic coding* dan *huffman coding* berlangsung ?,
2. Bagaimana implementasi metode *arithmetic coding* dan *huffman coding* pada kompresi citra digital ?,
3. Bagaimana kualitas hasil kompresi citra digital dengan metode *arithmetic coding* dan *huffman coding* ?.

Batasan Masalah

Dari perumusan masalah tersebut di atas, maka dalam tulisan ini akan dibatasi pada permasalahan-permasalahan sebagai berikut :

1. Meneliti mengenai proses kompresi citra digital dengan metode *arithmetic coding* dan *huffman coding*,.
2. Meneliti proses pengimplementasian metode *arithmetic coding* dan *huffman coding* dalam melakukan kompresi citra digital,
3. Meneliti kualitas hasil kompresi citra digital dengan menggunakan metode *arithmetic coding* dan *huffman coding*.

KAJIAN TEORITIS

Citra

Citra merupakan istilah lain untuk gambar, sebagai salah satu komponen multimedia yang memegang peranan sangat penting sebagai bentuk informasi visual.

Proses pengolahan data dapat dilakukan oleh komputer, baik berupa mikrokomputer sederhana atau komputer biasa, tergantung jumlah data dan jenis pengolahan. Proses penampilan data merupakan salah satu yang penting karena bagaimanapun juga citra digital hasil olahan harus dapat dinilai oleh mata manusia melalui sebuah penampilan.³

Citra dapat didefinisikan sebagai fungsi intensitas cahaya dua dimensi $f(x,y)$, dimana x dan y merupakan koordinat spasial, nilai f pada suatu titik (x,y) sebanding dengan kecerahan (*brighthness*) yang biasanya dinyatakan dalam tingkatan abu - abu (*gray-level*) dari citra di titik tersebut.⁴

Nilai $f(x,y)$ sebenarnya adalah hasil kali dari:⁵

1. $i(x,y)$ = jumlah cahaya yang berasal dari sumbernya (*illumination*), intensitasnya antara 0 sampai tidak berhingga.
2. $r(x,y)$ = derajat kemampuan obyek memantulkan cahaya (*reflection*), nilainya antara 0 dan 1.

Citra dapat dibedakan atas citra analog dan citra digital. Citra analog adalah citra yang masih dalam bentuk sinyal analog, seperti pengambilan gambar oleh kamera atau citra tampilan di layar ataupun monitor (sinyal video).⁶

Citra Digital

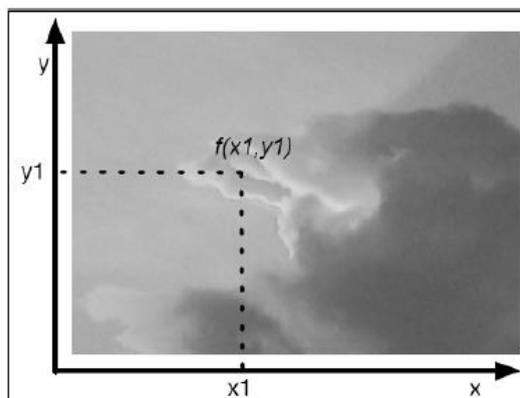
Citra digital adalah citra dengan $f(x,y)$ yang nilainya didigitalisasikan (dibuat diskrit) baik dalam koordinat spasialnya maupun dalam *gray level*-nya. Sebuah citra diubah ke bentuk digital agar mudah diolah atau disimpan dalam memori komputer atau media lain.

Secara teoritis citra dapat dikelompokkan menjadi empat kelas citra, yaitu : kontinu-kontinu, kontinu-diskrit, diskrit-kontinu, diskrit-diskrit. Penlabelan kontinu berarti nilai yang digunakan adalah tidak terbatas dan tidak terhingga, sedangkan label diskrit menyatakan terbatas dan berhingga. Suatu citra digital merupakan representasi dua dimensi *array* sampel diskrit suatu citra kontinu $f(x,y)$. Amplitudo setiap sampel dikuantisasi untuk menyatakan bilangan hingga bit. Setiap elemen *array* dua dimensi disebut suatu *pixel* (*picture element*).

Ranah nilai intensitas dalam suatu citra ditentukan oleh alat digitalisasi yang digunakan untuk menangkap dan menkonversi citra analog ke citra digital (*A/D Converter*). Perolehan citra digital ini dapat dilakukan secara langsung oleh kamera digital maupun dengan menggunakan *A/D Converter*. Untuk mengubah citra kontinu menjadi citra digital diperlukan proses pembuatan kisi-kisi arah horizontal dan arah vertikal, sehingga diperoleh gambar dalam bentuk *array* dua dimensi. Proses ini disebut sebagai proses digitalisasi/*sampling*.

Citra diskrit dihasilkan dari melalui proses digitalisasi terhadap citra kontinu. Sedangkan citra kontinu dihasilkan dari sistem optik yang menerima sinyal analog. Beberapa sistem optik dilengkapi dengan fungsi digitalisasi sehingga ia mampu menghasilkan citra diskrit, misalnya kamera

digital dan *scanner*. Citra diskrit disebut juga sebagai citra digital, seperti gambar 1 di bawah ini.



Gambar 1. Citra Digital

Digitalisasi dari koordinat spasial citra disebut dengan *image sampling*, sedangkan digitalisasi dari *gray-level* citra disebut dengan *gray-level quantization*.

Citra sering diasosiasikan dengan kedalaman *pixel*-nya. Jadi, citra dengan kedalaman 8 bit disebut juga citra 8-bit (atau citra 256 warna). Pada kebanyakan aplikasi, citra hitam-putih dikuantisasi pada 256 level dan membutuhkan 1 *byte* (8 bit) untuk representasi setiap *pixel*-nya ($G = 256 = 2^8$).⁸ Citra biner (*binary image*) hanya dikuantisasi pada dua level: 0 dan 1. Tiap *pixel* pada citra biner cukup direpresentasikan dengan 1 bit, yang mana bit 0 berarti hitam dan bit 1 berarti putih.⁷

Pengolahan Citra

Pengolahan citra adalah pemrosesan citra, khususnya dengan menggunakan komputer, menjadi citra yang kualitasnya lebih baik. Pengolahan citra bertujuan memperbaiki kualitas citra agar mudah diinterpretasi oleh manusia atau mesin (dalam hal ini komputer). Teknik-teknik pengolahan citra mentransformasikan citra menjadi citra lain.⁸ Jadi, masukannya adalah citra dan keluarannya juga citra, namun citra keluaran mempunyai kualitas lebih baik daripada citra masukan. Termasuk ke dalam bidang ini juga adalah pemampatan citra (*image compression*).

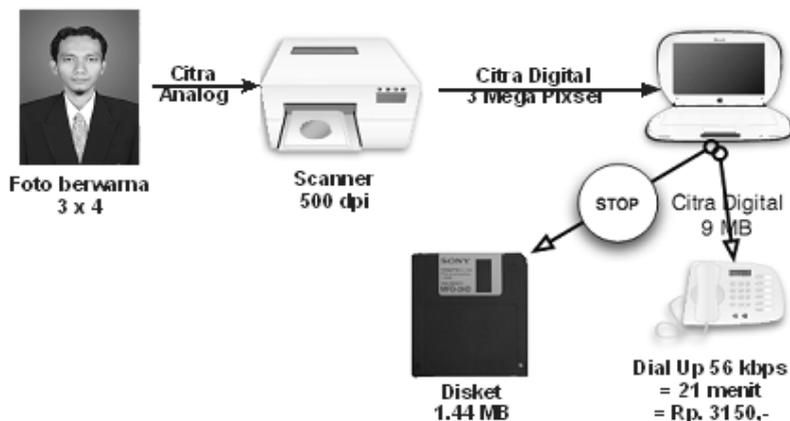
Pengolahan citra digital dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Representasi dan pemodelan citra
2. Peningkatan kualitas citra
3. Restorasi citra
4. Analisis citra
5. Rekonstruksi citra
6. Kompresi citra
7. Kompresi Citra Digital

Kompresi citra adalah aplikasi kompresi data yang dilakukan terhadap citra digital dengan tujuan untuk mengurangi redundansi dari data-data yang terdapat dalam citra sehingga dapat disimpan atau ditransmisikan secara efisien. Kompresi citra bertujuan untuk meminimalkan jumlah bit yang diperlukan untuk merepresentasikan citra. Kompresi berarti memampatkan/mengecilkan ukuran. Prinsip umum yang digunakan pada proses pemampatan citra adalah mengurangi duplikasi data di dalam citra sehingga memori yang dibutuhkan untuk merepresentasikan citra menjadi lebih sedikit daripada representasi citra semula.⁹

Apabila sebuah foto berwarna berukuran 3 inci x 4 inci diubah ke bentuk digital dengan tingkat resolusi sebesar 500 *dot per inch* (dpi), maka diperlukan $3 \times 4 \times 500 \times 500 = 3.000.000$ dot (*pixel*). Setiap *pixel* terdiri dari 3 byte dimana masing-masing byte merepresentasikan warna merah, hijau, dan biru. Sehingga citra digital tersebut memerlukan *volume* penyimpanan sebesar $3.000.000 \times 3 \text{ byte} + 1080 = 9.001.080$ *byte* setelah ditambahkan jumlah *byte* yang diperlukan untuk menyimpan *format* (*header*) citra.

Citra tersebut tidak bisa disimpan ke dalam disket yang berukuran 1.4 MB. Selain itu, pengiriman citra berukuran 9 MB memerlukan waktu lebih lama. Untuk koneksi internet *dial-up* (56 kbps), pengiriman citra berukuran 9 MB memerlukan waktu 21 menit. Untuk itulah diperlukan kompresi citra sehingga ukuran citra tersebut menjadi lebih kecil dan waktu pengiriman citra menjadi lebih cepat. Citra yang belum dikompres disebut citra mentah (*raw image*). Sementara citra hasil kompresi disebut citra terkompresi (*compressed image*). Proses pengiriman dan penyimpanan citra tersebut diilustrasikan pada gambar 2 berikut ini.



Gambar 2. Proses Konversi Citra Analog Ke Citra Digital Beserta Pengirimannya

Kriteria Pemampatan Citra

Kriteria yang digunakan dalam mengukur metode pemampatan citra adalah:¹⁰

1. Waktu pemampatan dan penirmampatan (*decompression*)

Waktu pemampatan citra dan penirmampatannya sebaiknya cepat. Ada metode pemampatan yang waktu pemampatannya lama, namun waktu penirmampatannya cepat. Ada pula metode yang waktu pemampatannya cepat tetapi waktu penirmampatannya lambat. Tetapi ada pula metode yang waktu pemampatan dan penirmampatannya cepat atau keduanya lambat.

2. Kebutuhan memori.

Memori yang dibutuhkan untuk merepresentasikan citra seharusnya berkurang secara berarti. Ada metode yang berhasil memampatkan dengan persentase yang besar, ada pula yang kecil. Pada beberapa metode, ukuran memori hasil pemampatan bergantung pada citra itu sendiri. Citra yang mengandung banyak elemen duplikasi (misalnya citra langit cerah tanpa awan, citra lantai keramik) umumnya berhasil dimampatkan dengan memori yang lebih sedikit dibandingkan dengan memampatkan citra yang mengandung banyak objek (misalnya citra pemandangan alam).

3. Kualitas pemampatan (*fidelity*)

Informasi yang hilang akibat pemampatan seharusnya seminimal mungkin sehingga kualitas hasil pemampatan tetap dipertahankan. Kualitas pemampatan dengan kebutuhan memori biasanya berbanding terbalik. Kualitas pemampatan yang bagus umumnya dicapai pada proses pemampatan yang menghasilkan pengurangan memori yang tidak begitu besar, demikian pula sebaliknya. Dengan kata lain, ada timbal balik (*trade off*) antara kualitas citra dengan ukuran hasil pemampatan.

4. Format keluaran

Format citra hasil pemampatan sebaiknya cocok untuk pengiriman dan penyimpanan data. Pembacaan citra bergantung pada bagaimana citra tersebut direpresentasikan (atau disimpan). Pemilihan kriteria yang tepat bergantung pada pengguna dan aplikasi. Kompresi citra dikembangkan untuk memudahkan penyimpanan dan pengiriman citra. Teknik kompresi yang ada sekarang memungkinkan citra dikompresi sehingga ukurannya menjadi jauh lebih kecil daripada ukuran asli.

Teknik Pemampatan

Teknik pemampatan citra dapat diklasifikasikan ke dalam dua kelompok besar, yaitu :

1. *Lossless*, yaitu pemampatan yang dilakukan tidak menghilangkan kandungan asal data, seperti membuang atau merubah kandungan asal selama terjadinya pemampatan. Kategori ini banyak digunakan dalam pemampatan data teks. Metode *lossless* cocok untuk kompresi citra yang mengandung informasi penting yang tidak boleh rusak akibat kompresi. Misalnya kompresi citra hasil diagnosa medis. Contoh teknik dengan menggunakan metode pemampatan *lossless* adalah: *Run Length Encoding*, *Entropy Encoding (Huffman, Arithmetic)*, dan *Adaptive Dictionary Based (LZW)*.¹¹
2. *Lossy*, yaitu pemampatan yang dilakukan dengan membuang sedikit kandungan asal dari data, dimana data tersebut banyak terjadi penumpukan nilai atau adanya nilai yang tidak dibutuhkan (mengandung nilai yang tidak mempunyai makna), seperti bingkai gambar, ruang kosong dan lain-lain. Contoh pemampatan ini digunakan pada data gambar (*image*) atau suara.

Algoritma *Entropy Coding*

Entropy coding adalah sebuah skema *lossless* kompresi berbasis pada properti statistik dari citra atau aliran informasi yang dikompres. Meskipun *entropy coding* diimplementasikan secara berbeda untuk tiap-tiap standar, dasar dari skema *entropy coding* adalah dengan menyandikan pola yang paling sering muncul dengan jumlah bit yang paling kecil. Dengan cara ini, data dapat dimampatkan dengan faktor tambahan dari 3 atau 4.

Entropi secara umum dapat diinterpretasikan jumlah rata-rata minimum dari jumlah pertanyaan ya/tidak untuk menentukan harga spesifik dari variable x . Dalam konteks bahasan, *entropi* merepresentasikan batas bawah (*lower bound*) dari jumlah rata-rata bit per satu nilai input yaitu rata-rata panjang *code word* digunakan untuk mengkode input.¹²

Metode *Arithmetic Coding*

Arithmetic coding merupakan metode untuk kompresi data *lossless* yang menggunakan variabel jumlah bit. Jumlah bit yang digunakan untuk menyandikan setiap simbol bervariasi sesuai dengan kemungkinan kemunculan simbol tersebut.

Arithmetic Coding menggantikan satu deretan simbol input dengan sebuah bilangan *floating point*. Apabila semakin panjang dan semakin kompleks pesan yang dikodekan, maka akan semakin banyak bit yang diperlukan untuk keperluan tersebut.¹³

Output dari *arithmetic coding* adalah sebuah angka yang lebih kecil dari 1 dan lebih besar atau sama dengan 0. Angka tersebut secara unik dapat di-*decode* sehingga menghasilkan deretan simbol yang dipakai untuk menghasilkan angka tersebut.

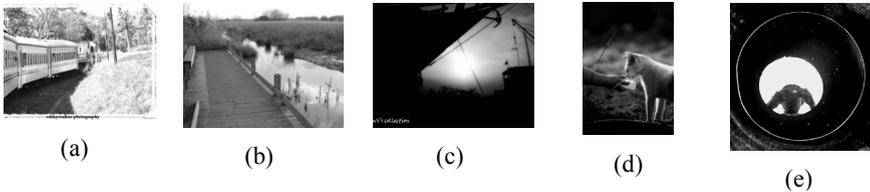
Metode *Huffman Coding*

Metode *huffman coding* merupakan salah satu metode yang terdapat pada teknik *entropy coding*. Dalam *huffman coding*, panjang blok dari keluaran sumber dipetakan dalam blok berdasarkan panjang variabel. Cara seperti ini disebut sebagai *fixed to variable-length coding*. Ide dasar dari cara *huffman* ini adalah memetakan mulai simbol yang paling banyak terdapat pada sebuah urutan sumber sampai dengan yang jarang muncul menjadi urutan biner¹⁴. Dalam *variable-length coding*, sinkronisasi merupakan suatu masalah. Ini berarti harus terdapat satu cara untuk memecahkan urutan biner yang diterima ke dalam suatu *codeword*.

EKSPERIMEN DAN ANALISIS HASIL

Citra Uji

Dalam tulisan ini dilakukan pengujian kompresi terhadap citra uji. Agar hasil pengujian dapat dibandingkan hasilnya, maka citra yang diuji tidak dapat satu buah citra saja. Berikut ini ditampilkan lima citra yang akan diuji. Citra uji tersebut berformat *BMP* dengan kapasitas (ukuran) citra yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya, dapat dilihat pada gambar 3 berikut ini.

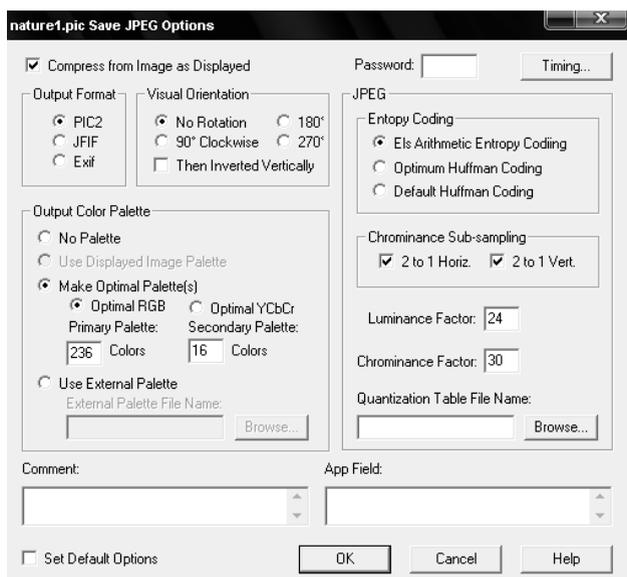


Gambar 3. Citra Uji

Proses Kompresi

Proses Kompresi Arithmetic Coding

Pada proses kompresi *arithmetic coding* menggunakan software Minerva, kita harus memilih tipe algoritma kompresi, seperti yang ada pada gambar 4 berikut ini :

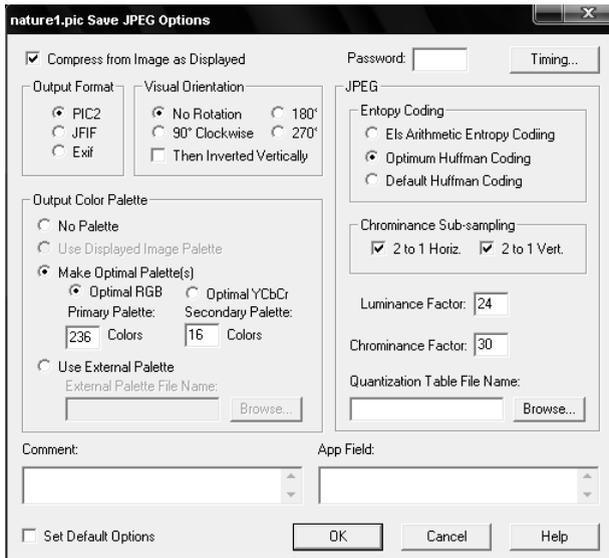


Gambar 4. Pemilihan Kompresi Arithmetic Coding

Untuk melakukan kompresi citra dengan metode *arithmetic coding* kita memilih pilihan tipe kompresi *arithmetic entropy coding*. Setelah melakukan pemilihan dan pengaturan pada menu yang ada, selanjutnya klik tombol “OK”. Pada proses kompresi ini akan diperlihatkan rasio kompresi, waktu yang dibutuhkan untuk melakukan kompresi, dan ukuran citra hasil kompresi.

Proses Kompresi Huffman Coding

Pada proses kompresi *huffman coding* menggunakan software Minerva, kita harus memilih tipe algoritma kompresi, seperti yang ada pada gambar 5 berikut ini.



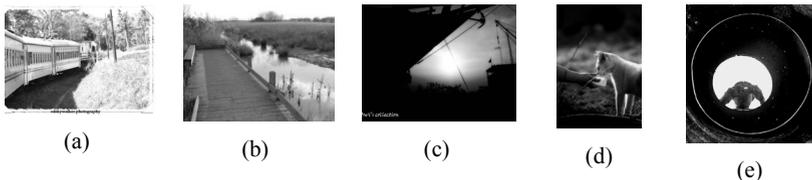
Gambar 5. Pemilihan Kompresi Huffman Coding

Untuk melakukan kompresi citra dengan metode *huffman coding* kita memilih pilihan tipe kompres *huffman coding*. Setelah melakukan pemilihan dan pengaturan pada menu yang ada, selanjutnya klik tombol “OK”. Pada proses kompresi ini akan diperlihatkan rasio kompresi, waktu yang dibutuhkan untuk melakukan kompresi, dan ukuran citra hasil kompresi.

Hasil Kompresi

Hasil Kompresi Arithmetic Coding

Citra digital yang telah dikompresi menggunakan metode *arithmetic coding* dapat dilihat pada gambar 6 berikut ini.



Gambar 6. Hasil Kompresi Citra dengan Arithmetic Coding

Dimana citra hasil kompresi yang dihasilkan jika dilihat secara kasat mata kita tidak dapat melihat perbedaan dengan citra aslinya. Hasil kompresi terhadap citra uji di atas dapat kita lihat besar ukuran filenya, kecepatan kompresi, dan rasio kompresinya pada tabel berikut ini.

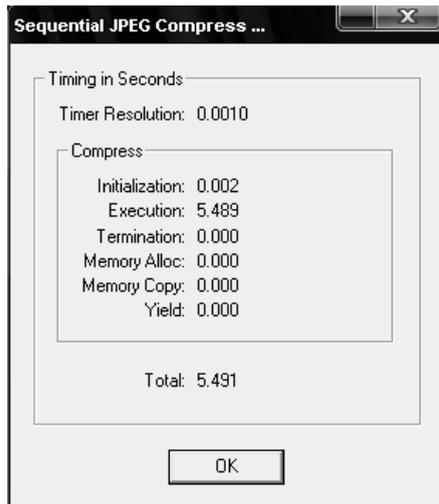
Tabel 1. Ukuran Hasil Kompresi Arithmetic Coding

Nama Citra	Ukuran Asli	Ukuran Setelah Kompresi	Kecepatan kompresi	Rasio kompresi
(a)	1.16 Mb	64 Kb	5.491 detik	19 : 1
(b)	2.25 Mb	86 Kb	5.497 detik	27 : 1
(c)	550 Kb	12 Kb	5.480 detik	48 : 1
(d)	995 Kb	21 Kb	0.008 detik	46 : 1
(e)	1.41 Mb	47 Kb	0.013 detik	31 : 1

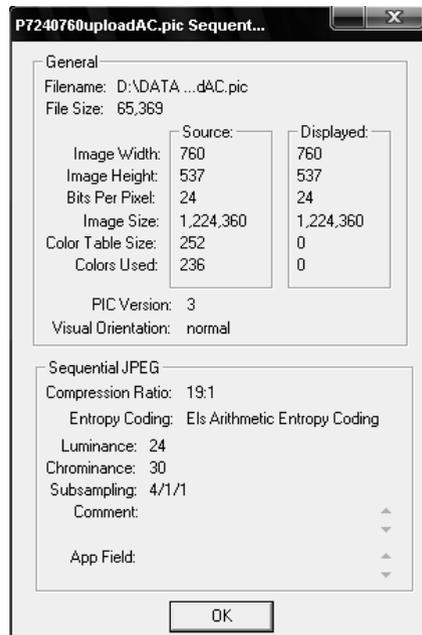
Dari data pada tabel di atas dapat kita lihat bahwa metode *arithmetic coding* mampu melakukan kompresi citra digital dengan tingkat rasio yang tinggi, sehingga menghasilkan citra terkompresi dengan ukuran yang kecil.

Dari sini dapat dilihat citra yang terkompresi kalau dilihat dengan mata kita sendiri tidak terlihat adanya perbedaan dari citra aslinya, walaupun ukuran file dan data awal dari citra tersebut sudah jauh berkurang dibandingkan citra aslinya.

Keterangan yang didapatkan pada tabel di atas diperoleh berdasarkan informasi yang direkam oleh *software Minerva* yang digunakan. Gambar 7 dan 8 berikut ini secara berurutan memperlihatkan waktu kompresi, rasio kompresi, dan ukuran file hasil kompresi terhadap citra *a*.



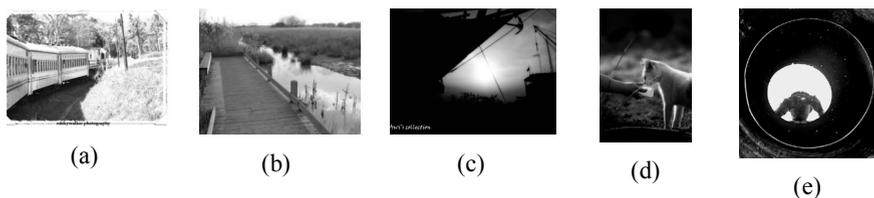
Gambar 7. Waktu Proses Kompresi Arithmetic Coding citra Uji a



Gambar 8. Ukuran Hasil kompresi, Rasio kompresi Arithmetic Coding Citra Uji a

Hasil Kompresi Huffman Coding

Citra digital yang telah dikompresi menggunakan metode *huffman coding* dapat dilihat pada gambar 9 berikut ini.



Gambar 9. Hasil Kompresi Citra dengan Huffman Coding

Dimana citra hasil kompresi yang dihasilkan jika dilihat secara kasat mata kita tidak dapat melihat perbedaan dengan citra aslinya. Hasil kompresi terhadap citra uji di atas dapat kita lihat besar ukuran filenya, kecepatan kompresi, dan rasio kompresinya pada tabel berikut ini.

Tabel 2. Ukuran Hasil Kompresi Huffman Coding

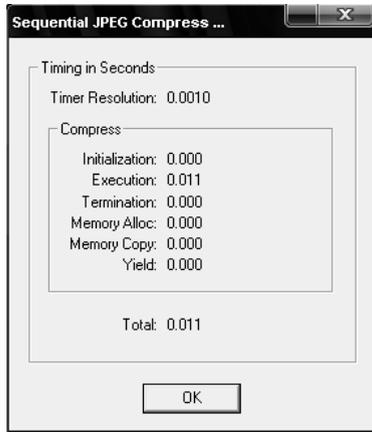
Nama citra	Ukuran asli	Ukuran Setelah kompresi	Kecepatan kompresi	Rasio kompresi
(a)	1.16 Mb	70 Kb	0.011 detik	17 : 1
(b)	2.25 Mb	95 Kb	0.017 detik	25 : 1
(c)	550 Kb	14 Kb	0.004 detik	42 : 1
(d)	995 Kb	24 Kb	0.006 detik	41 : 1
(e)	1.41 Mb	52 Kb	0.010 detik	28 : 1

Dari data pada tabel di atas dapat kita lihat bahwa metode *huffman coding* mampu melakukan kompresi citra digital dengan waktu yang relatif singkat, sehingga waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan citra terkompresi lebih singkat.

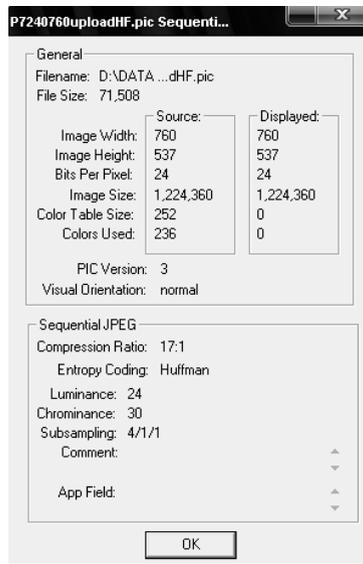
Dari sini dapat dilihat citra yang terkompresi kalau dilihat dengan mata kita sendiri tidak terlihat adanya perbedaan dari citra aslinya, walaupun ukuran file dan data awal dari citra tersebut sudah jauh berkurang dibandingkan citra aslinya.

Keterangan yang didapatkan pada tabel di atas diperoleh berdasarkan informasi yang direkam oleh *software Minerva* yang digunakan. Gambar 10

dan 11 berikut ini secara berurutan memperlihatkan waktu kompresi, rasio kompresi, dan ukuran file hasil kompresi terhadap citra *a*.



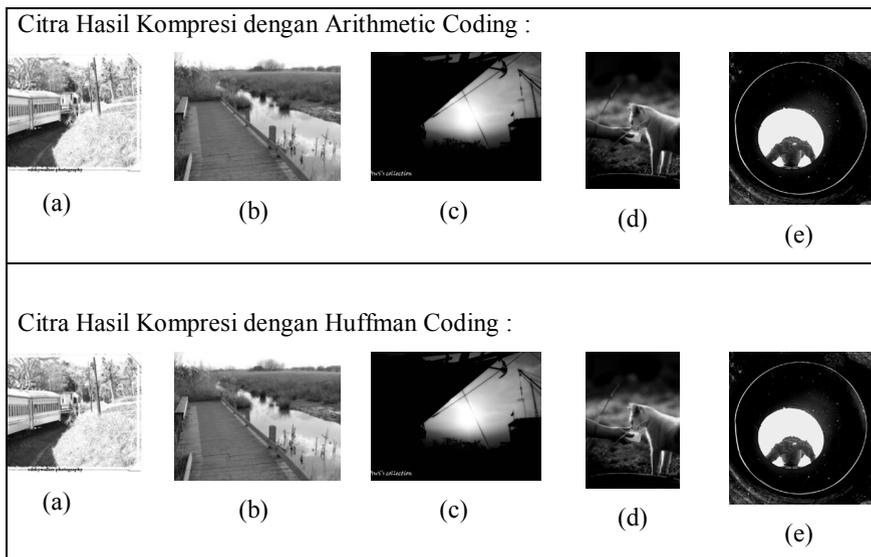
Gambar 10. Waktu Proses Kompresi Huffman Coding citra Uji *a*



Gambar 11. Ukuran Hasil kompresi, Rasio kompresi Huffman Coding Citra Uji *a*

Perbandingan Hasil Kompresi

Setelah dilakukan kompresi terhadap masing-masing citra uji dengan menggunakan teknik kompresi *arithmetic coding* dan *huffman coding* dapat kita teliti hasilnya pada gambar 12 berikut ini.



Gambar 12. Perbandinga Hasil Kompresi Citra Arithmetic Coding dengan Huffman Coding

Pada tabel 3 berikut ini akan diperlihatkan hasil perbandingan antar *arithmetic coding* dengan *huffman coding* terhadap citra uji yang telah ditentukan sebelumnya.

Tabel 3. Perbandingan Ukuran Arithmetic Coding dengan Huffman Coding

Nama citra	Ukuran asli	Arithmetic Coding			Huffman Coding		
		Ukuran	Kecepatan	Rasio	Ukuran	Kecepatan	Rasio
(a)	1.16 Mb	64 Kb	5.491 detik	19 : 1	70 Kb	0.011 detik	17 : 1
(b)	2.25 Mb	86 Kb	5.497 detik	27 : 1	95 Kb	0.017 detik	25 : 1
(c)	550 Kb	12 Kb	5.480 detik	48 : 1	14 Kb	0.004 detik	42 : 1
(d)	995 Kb	21 Kb	0.008 detik	46 : 1	24 Kb	0.006 detik	41 : 1
(e)	1.41 Mb	47 Kb	0.013 detik	31 : 1	52 Kb	0.010 detik	28 : 1

Dari tabel di atas dapat kita ketahui bahwa hasil kompresi terhadap citra uji dengan menggunakan metode *arithmetic coding* memiliki ukuran citra terkompresinya lebih kecil dibandingkan metode *huffman coding*, sedangkan dari segi waktu pelaksanaan proses kompresinya metode *huffman coding* lebih cepat dari pada metode *arithmetic coding*. Untuk rasio kompresi, metode *arithmetic coding* lebih besar dibandingkan metode *huffman coding*.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan untuk kompresi citra digital dengan menggunakan metoda *arithmetic coding* dan *huffman coding* dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Algoritma *arithmetic coding* ini cukup baik dipakai untuk kompresi data,
2. Algoritma ini akan lebih optimal dibandingkan dengan *huffman coding* apabila ada data atau simbol yang memiliki probabilitas besar,
3. Banyaknya simbol dan frekuensi masing-masing simbol menentukan nilai entropi suatu data,
4. Berdasarkan hasil penelitian, waktu kompresi *huffman coding* lebih cepat dibandingkan dengan *arithmetic coding*,
5. Pada kompresi dengan *arithmetic coding*, data hasil kompresi lebih kecil (lebih efisien) dibandingkan *huffman coding*.

SARAN

Dari penelitian yang dilakukan, maka dapat disarankan beberapa hal untuk pengembangan penelitian ini berikutnya. Saran-saran yang bisa diberikan adalah sebagai berikut :

1. Untuk melakukan perhitungan dengan algoritma *arithmetic coding* sebaiknya menggunakan perhitungan bilangan integer karena perhitungan integer jauh lebih cepat dari perhitungan *floating point*,
 2. Implementasi *arithmetic coding* harus memperhatikan kemampuan *encoder* dan *decoder*, yang pada umumnya mempunyai keterbatasan jumlah *mantissa* (angka di belakang koma). Hal ini dapat menyebabkan kesalahan apabila suatu *arithmetic coding* mempunyai kode dengan *floating point* yang sangat panjang. []
-

ENDNOTES

- 1 Marvin, CH Wijaya dan Priyono, Agus. *Pengolahan Citra Digital Menggunakan Matlab*. (Bandung: Informatika 2007)
- 2 <http://www.datacompression.info/>
- 3 Fajri. *BAB II Pengolahan Citra Digital*. <http://www.fajri/>
- 4 *Ibid*
- 5 Adang Suhendra, *Catatan Kuliah Pengantar Pengolahan Citra*. Data text.
- 6 Rafael C. Woods Gonzales, Richard E. *Image Processing Using Matlab*.
- 7 Rafael C. Woods Gonzales, Richard E. 2002. *Digital Image Processing Second Edition*. New Jersey: Prentice Hall.
- 8 Mumi. A, dan Setiawan, S. *Pengantar Pengolahan Citra*. (Jakarta: PT. Elexmedia. 1992)
- 9 Satish Kumar. *Introduction To Image Compression*.
- 10 A. Ferron Erhardt, *Theory and Applications of Digital Image Processing*.
- 11 Kaplan, I. 2002. *Lossless Image Compression*.
- 12 Rinaldi Munir. *Pengolahan Citra Digital dengan Pendekatan Algoritmik*. (Bandung: Informatika 2004)
- 13 Petrus Santoso, *Studi Kompresi Data dengan Metode Arithmetic Coding*. 2001
- 14 Herry Sujaini dan Yessi Mulyani. *Algoritma Run-Length Half-byte & Huffman untuk Pemampatan File*. (Bandung: t.p. 2000)

DAFTAR PUSTAKA

- Marvin, CH Wijaya dan Priyono, Agus. 2007. *Pengolahan Citra Digital Menggunakan Matlab*. Informatika Bandung.
- Fajri. *BAB II Pengolahan Citra Digital*. <http://www.fajri/>
- Gonzales, Rafael C. Woods, Richard E. *Image Processing Using Matlab*.
- Suhendra, Adang, *Catatan Kuliah Pengantar Pengolahan Citra*. Data text.
- Gonzales, Rafael C. Woods, Richard E. 2002. *Digital Image Processing Second Edition*. New Jersey: Prentice Hall.
- Munir, Rinaldi. 2004. *Pengolahan Citra Digital dengan Pendekatan Algoritmik*. Bandung: Informatika.
- Erhardt, A. Ferron. *Theory and Applications of Digital Image Processing*. <http://www.dip-seminaronline.com/english/>
- Kumar, Satish. *Introduction To Image Compression*. <http://www.lee.et.todressen.de/2001>
- Gonzales, Rafael C. Woods, R.E. 2002. *Digital Image Processing Second Edition*. New Jersey: Prentice Hall inc. Upper Sadle River.
- <http://id.wikipedia.org/wavelet>
- Kaplan, I. 2002. *Lossless Image Compression*. <http://www.datacompression.info/>

<http://www.cl.cam.ac.uk/>

Murni, A, dan Setiawan, S. 1992. *Pengantar Pengolahan Citra*. Jakarta: PT. Elexmedia.

Santoso, Petrus. 2001. *Studi Kompresi Data dengan Metode Arithmetic Coding*.
<http://puslit.petra.ac.id/journals/electrical/> 14. 2001

Sujaini, Herry dan Yessi Mulyani. 2000. *Algoritma Run-Length Half-byte & Huffman untuk Pemampatan File*. Bandung.

Rohmah, Ratnasari Nur. 2004. *Perancangan dan Implementasi Arsitektur Client/Server untuk Pengiriman Citra Digital Kedokteran Foto Sinar-X Terkompresi melalui Jaringan Komputer dengan Kualitas Lossy-to-lossless pada Region of Interest (ROI)*. Tesis Magister Teknik Elektro Institut Teknologi Bandung.

PERSEPSI DAN HARAPAN WARGA BINAAN NARKOBA TENTANG PEMBINAAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB PAYAKUMBUH DAN IMPLIKASINYA TERHADAP BIMBINGAN DAN KONSELING

Hidayani Syam*

***Abstract:** Nowadays, most diverges are found at the correctional facility such as unnatural death, corruption, less health services, tortures and unhealthy environment. This research is aimed to express the perception and the expectation of citizens' guiding drugs toward mental awareness guidance, social guidance and autonomy guidance at correctional facility Clas IIB Payakumbuh. This research is done by using quantitative method. The population of this research is the citizen' guiding drugs which amount 53 people in correctional facility Clas IIB Payakumbuh while the sample is all of the population in this research. Questionnaire with Likert scale is used as instrument which spread to all of citizens. Then the data is analyzed by using SPSS version 11.5. The result shows that the perception of citizens' guiding drugs about the introduction and interpretation of mental awareness, social guidance and autonomy guidance at correctional facility are categorized good enough and the expectation of citizens' guiding drugs about the introduction and interpretation of mental awareness, social guidance and and autonomy guidance at correctional facility get good guidance. That is why the advisor and staff at correctional facility are suggested to increase their monitoring, guiding, and services of guidance program at correctional facility Clas IIB Payakumbuh especially guidance division of citizens' guiding complaint, holding money changing program, socialize the human rights and cooperate to reinforce the human rights and formed anti discrimination, anti tortures and violence at correctional facility.*

***Keywords:** Perception and expectation*

* Dosen STAIN Sjech. M. Djamil Djambek Bukittinggi

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Sebagai salah satu sumber daya manusia, warga binaan merupakan manusia biasa yang mendapatkan hukuman berdasarkan putusan hakim, mengisyaratkan bahwa penjatuhan pidana bagi seseorang melalui palu sang hakim pada hakikatnya tidaklah sebagai suatu perbuatan balas dendam oleh negara, melainkan sebagai imbalan atas tindak pidana yang telah dilakukannya, dan diharapkan akan menghasilkan kesadaran untuk di hari yang akan datang melalui pemberian pengayoman serta pemasyarakatan di dalam lembaga pemasyarakatan. Tidak dapat dibayangkan bagaimana seorang warga binaan pemakai atau ketergantungan pada narkotika dan psikotropika harus mendekam bersama-sama warga binaan yang sehat. Pemerintah seharusnya tidak menempatkan tersangka kasus narkoba dimasukkan ke rumah tahanan, namun sepatutnya ditempatkan di rumah sakit, rumah tahanan khusus narkoba atau di panti rehabilitasi.

Masalah penyalahgunaan narkoba merupakan masalah kompleks yang memerlukan upaya penanggulangan secara komprehensif yang melibatkan kerja sama multidisipliner, multisektor, dan peran masyarakat secara aktif, berkesinambungan dan konsisten. Maraknya penyalahgunaan narkoba dari kota-kota besar sampai ke kota-kota kecil di seluruh wilayah Indonesia, mulai dari tingkat sosial ekonomi atas sampai tingkat sosial ekonomi menengah bawah. Penelitian yang telah dilakukan oleh BNN menunjukkan bahwa satu setengah persen populasi penduduk Indonesia berarti 3,2 juta orang dengan kisaran 2,9 juta sampai 3,6 juta orang terlibat penyalahgunaan narkoba, laki-laki 79 % dan perempuan 21 %. Selain itu 15 ribu orang tiap tahun meninggal karena narkoba.¹

Tabel 1. Kasus Narkoba Tahun 2006-2008 (April) di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Payakumbuh

Kasus	2006	2007	April 2008
Narkotika	152	166	429
Psikotropika	30	114	216
Jumlah Warga binaan	182	280	645

Sumber: Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Payakumbuh, April 2008

Data di atas menunjukkan bahwa terjadi peningkatan kasus narkoba yang cukup signifikan tiap tahunnya. Desakan untuk membangun lembaga pemasyarakatan khusus narkoba di kota Payakumbuh nampaknya sudah diperlukan. Ini mengingat tingginya kasus narkoba yang terjadi di kota ini, kurun beberapa waktu belakangan. Dengan dimilikinya lembaga pemasyarakatan khusus narkoba, setidaknya mempermudah pengontrolan terhadap pelaku yang ditahan. Keberadaan lembaga pemasyarakatan narkoba mutlak didirikan sebagai persyaratan negara yang menghargai hukum dan hak asasi manusia (HAM). Apalagi korban narkoba tidak bisa disamakan dengan korban pidana umum lainnya, memerlukan pembinaan dan penanganan khusus, seharusnya pelaku narkoba tersebut tidak digabung dengan pidana lain. Karena itu hasil pembinaan sampai sekarang ini belum maksimal. Tidak heran bila masih ditemukan peredaran narkoba di lembaga pemasyarakatan, karena kita memang tidak punya lembaga pemasyarakatan khusus narkoba. Apalagi lembaga pemasyarakatan sekarang daya tampungnya sudah *overload*.²

Warga binaan narkoba berbeda dengan kasus warga binaan yang lain. Warga binaan narkoba adalah mereka yang kedapatan secara hukum menyalahgunakan, mengkonsumsi dan menyebarkan bahan-bahan terlarang melebihi kapasitas yang dibolehkan oleh Dinas Kesehatan dan hukum yang berlaku. Semestinya warga binaan narkoba mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan warga binaan yang lain.

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran empiris tentang persepsi dan harapan warga binaan terhadap pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Payakumbuh, sedangkan tujuan khususnya memperoleh gambaran mengenai:

Persepsi warga binaan narkoba terhadap: a) pengenalan pembinaan mental/kesadaran, pembinaan sosial dan pembinaan kemandirian, dan b) interpretasi pembinaan mental/kesadaran, pembinaan sosial dan pembinaan kemandirian di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Payakumbuh

Harapan warga binaan narkoba terhadap: a) pengenalan pembinaan mental/kesadaran, pembinaan sosial dan pembinaan kemandirian, dan b) interpretasi pembinaan mental/kesadaran, pembinaan sosial dan pembinaan kemandirian di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Payakumbuh.

KAJIAN PUSTAKA

Persepsi Warga Binaan Narkoba

Banyak pengertian persepsi yang di berikan oleh para ahli, "*Perception is the giving of meaning to the discrete, meaningless stimuli that initially arouse awareness. The meaning that an individual gives to any stimulus depends upon the manner in which that person patterns*".³

Persepsi juga terkait dengan kegiatan komunikasi atau juga interaksi dimana seseorang terkait dengan lingkungannya. Keberhasilan dari petugas pembinaan dalam mendidik dan membina warga binaan berhubungan dengan pembinaan yang diberikannya kepada warga binaan. Persepsi seorang warga binaan terhadap pelayanan bimbingan dan konseling dapat dipengaruhi oleh adanya suatu stimulus yang diberikan oleh pembina.

Harapan Warga Binaan

Expectancy is the strength of a person's belief about whether a particular outcome is possible. Jadi harapan adalah suatu keinginan, impian dan pengharapan terhadap sesuatu yang baik akan terjadi.⁴

Pada umumnya harapan seseorang dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dan pengalamannya, kondisi lingkungannya serta keterampilan hidup yang dimilikinya. Persepsi dan harapan warga binaan sangat erat hubungannya, warga binaan yang mempunyai persepsi bagus tentang pembinaan, ia cenderung memiliki harapan bagus agar mendapatkan pembinaan yang lebih baik dari petugas pembinaan. Sedangkan para warga binaan yang telah memiliki persepsi bagus juga menginginkan pembinaan yang lebih baik lagi.

Bentuk-bentuk Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Payakumbuh

Sebagai tempat pelaksanaan pidana rumah tahanan dan tempat untuk membina para warga binaan, lembaga pemasyarakatan saat ini dihuni sebanyak 645 orang warga binaan, sesuai dengan hasil penelitian dengan pembagian golongan warga hunian yang keseluruhan warga binaan itu mempunyai status yang berbeda baik itu dari segi latar belakang, banyaknya hukuman maupun sebab terjadinya pidana terhadap masing-masing warga binaan. Berdasarkan penelitian di lapangan bahwa bentuk pembinaan

dan pengayoman yang diberikan kepada warga binaan di lembaga pemasyarakatan ada 3 (tiga) bentuk yakni:

1. Pembinaan Mental/Kesadaran

Pembinaan mental/kesadaran ini merupakan bentuk pembinaan yang paling awal diberikan di lembaga pemasyarakatan, hal ini dilakukan karena melalui pembinaan mental ini diharapkan sebagai dasar untuk menempa seseorang yang telah sempat terjerumus ke lembah perbuatan jahat dan umumnya orang menjadi jahat karena mentalnya sudah turun, oleh sebab itu mental harus diperbaiki terlebih dahulu. Adapun pembinaan mental yang diberikan di lembaga pemasyarakatan yaitu:

2. Pembinaan kesadaran beragama.

Pembinaan ini dilakukan dengan tujuan untuk mengembalikan kesadaran diri warga binaan sebagai makhluk Tuhan yang berkewajiban untuk beriman dan bertaqwa kepadaNya. Bagi LP Klas IIB Payakumbuh pembinaan kesadaran beragama merupakan program utama yang harus ditingkatkan kuantitas dan kualitasnya. Adapun bentuk-bentuk kegiatan yang dilakukan seperti: ceramah agama, shalat berjamaah, membaca al-Qur'an, mengikuti perlombaan MTQ, mengadakan peringatan hari besar Islam dll. Pembinaan jiwa keagamaan sangat penting dalam mengembalikan warga binaan kepada jalan yang benar, karena pembinaan agama yang dilakukan secara baik dan teratur akan menumbuh kembangkan kesadaran warga binaan terhadap keberadaannya sebagai makhluk Tuhan.

3. Pembinaan kemampuan intelektual

Pembinaan ini dilakukan untuk meningkatkan kecerdasan warga binaan dalam bentuk non-formal. Program ini dilakukan khusus pada warga binaan yang buta huruf dalam bentuk paket-paket pengajaran seperti paket A, paket B dsb, hanya saja pelaksanaan pembinaan kemampuan intelektual ini masih bersifat insidental.

Pembinaan Sosial/Pengintegrasian

Pembinaan pengintegrasian dengan masyarakat, dilakukan dengan tujuan agar setelah warga binaan lepas atau habis masa tahanannya akan bisa kembali kepada lingkungan keluarga dan masyarakat dengan baik, serta masyarakat juga menerima kehadiran mereka dengan baik pula, dalam kaitannya untuk memulihkan kesatuan dan hubungan antara warga binaan dengan masyarakat. Pembinaan ini diberikan oleh karena adanya prasangka

bahwa para warga binaan telah di singkirkan dari masyarakat. Sehingga supaya mereka tidak merasa dipisahkan dari masyarakat, maka dalam pembinaan sosial ini diupayakan untuk memberikan motivasi bagaimana cara hidup dan bermasyarakat yang baik, oleh sebab itu diberikan kesempatan kepada warga binaan tersebut agar lebih luas berkecimpung dengan masyarakat luar.

Pembinaan Kemandirian

Pembinaan kemandirian bertujuan sebagai bekal bagi warga binaan untuk mengaktualisasikan potensi dirinya dengan pembinaan kemandirian yang dilakukan selama berada di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Payakumbuh, sehingga dengan program tersebut warga binaan bisa menjalani hidup dengan baik sebagai anggota keluarga maupun warga masyarakat sehingga dapat mencegah dirinya untuk berperilaku menyimpang, melanggar aturan, nilai-nilai dan undang-undang yang berlaku. Adapun bentuk pembinaan kemandirian adalah sebagai berikut:

1. Pembinaan keterampilan mesin dan elektronika, merupakan proses pembinaan kemandirian yang dilakukan terhadap warga binaan di seluruh Indonesia. Akan tetapi hal ini belum dapat diterapkan di LP Klas IIB Payakumbuh karena kekurangan sarana dan prasarana.
2. Pembinaan keterampilan industri kecil, telah mulai dilakukan dalam bentuk pertukangan dan meubel. Mereka diharapkan terampil sebagai modal dasar ketika kembali pada masyarakat.
3. Pembinaan keterampilan bakat seperti musik dan olah raga. Adalah pembinaan yang rutin dilakukan dalam LP Klas IIB Payakumbuh setiap hari seperti, tenis meja, volly ball, badminton, sepak takraw, catur dll. Sedangkan untuk seni musik mereka telah memiliki seperangkat alat musik yang sederhana seperti organ tunggal, gitar, seruling dll.

Keterampilan yang di berikan kepada warga binaan sebagai bekal untuk kembali ke tengah-tengah masyarakat dan bentuk keterampilan yang diberikan juga di sesuaikan dengan kondisi serta perkembangan yang ada.

Implikasi Pembinaan terhadap Bimbingan dan Konseling

Bimbingan merupakan suatu proses pemberian bantuan baik kepada individu maupun kelompok yang di lakukan dengan berbagai cara dan in-

teraksi sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Ada lima fungsi penting dalam bimbingan yaitu: 1) fungsi pemahaman, 2) fungsi pencegahan, 3) fungsi pengentasan, 4) fungsi pemeliharaan, 5) fungsi pengembangan.⁵

*“Konseling adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara konseling oleh seorang ahli yang disebut konselor kepada individu yang sedang mengalami sesuatu masalah (disebut klien) yang bermuara pada teratasinya masalah yang dihadapi klien”.*⁶

Namun demikian tidak semua manusia mampu mengenal segala kemampuan dirinya. Mereka ini memerlukan bantuan orang lain agar dapat mengenal dirinya sendiri, lengkap dengan segala kemampuan yang dimilikinya, dan bantuan ini dapat diberikan oleh bimbingan dan konseling. Suatu hal yang dapat disimpulkan disini bahwa bimbingan dan konseling pada dasarnya bertujuan untuk membantu memecahkan berbagai permasalahan yang dialami oleh setiap individu dalam kehidupannya.

Sementara itu indikator dari fungsi pemahaman ini sebagai berikut:⁷

1. Fungsi Pemahaman, di antaranya:
 - a. Pemahaman tentang klien
 - b. Pemahaman tentang masalah (perlu dibantu atau tidak)
 - c. Pemahaman tentang lingkungan yang lebih luas (keadaan rumah, hubungan antar teman, lingkungan sekolah, lingkungan fisik, hak dan tanggung jawab klien terhadap sekolah, aturan-aturan pengajaran, hubungan klien-pembina).
2. Fungsi Pencegahan

Dalam pelaksanaan fungsi pencegahan secara operasional konselor perlu menampilkan kegiatan dalam rangka pelaksanaan fungsi pencegahan kegiatan antara lain dapat berupa program-program nyata secara garis besar, program-program tersebut dikembangkan dan disusun dan diselenggarakan melalui tahap-tahap. Fungsi Pencegahan diarahkan dalam bentuk berikut ini:

- a. Mendorong perbaikan lingkungan
- b. Meningkatkan kemampuan individu untuk hal-hal yang diperlukan dan mempengaruhi perkembangan dan kehidupan.
- c. Meningkatkan kemampuan individu untuk hal-hal yang diperlukan dan mempengaruhi perkembangan dan kehidupan.

- d. Mendorong individu untuk tidak melakukan sesuatu yang akan memberi efek resiko besar, dan melakukan sesuatu yang akan memberi manfaat.
- e. Menggalang dukungan kelompok terhadap individu yang bersangkutan.

3. Fungsi Pengentasan

Fungsi pengentasan bertujuan agar permasalahan dapat teratasi dengan baik. Fungsi pengentasan dilaksanakan dengan : (1) tidak menggunakan unsur-unsur fisik yang diluar diri klien, (2) menggunakan kekuatan-kekuatan yang berada dalam diri klien sendiri.⁸

- a. Langkah-langkah pengentasan masalah dilakukan secara perorangan, ketersediaan berbagai bahan, dan keterampilan kekuatan-kekuatan yang berada di dalam diri klien sendiri.
- b. Pengentasan masalah berdasarkan diagnosis.
- c. Diagnosis mental/psikologis yaitu pemahaman tentang kondisi mental/ psikologi klien dengan kemampuan dasar, bakat, kecenderungan minat, keinginan dan harapannya, kematangan emosionalnya, sikap dan kebiasaannya.
 - 1) Sosio-emosional/hubungan sosial klien
 - 2) Diagnosis instrumental (aspek fisik) seperti: kesehatan, fisik lingkungan, sarana dan prasarana, dan pemahaman situasi.
- d. Pengentasan masalah berdasarkan teori konseling.

4. Fungsi Pemeliharaan dan Pengembangan

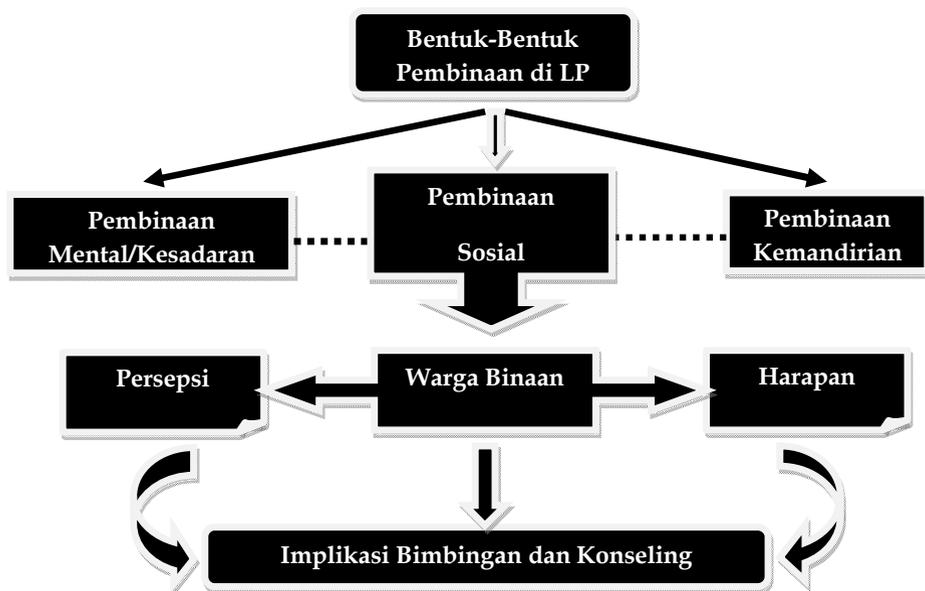
Fungsi pemeliharaan dan pengembangan, adalah fungsi yang menciptakan lingkungan yang kondusif, yang memfasilitasi perkembangan klien. Konselor dan personel di lembaga pemasyarakatan lainnya bekerjasama merumuskan dan melaksanakan program bimbingan dan konseling secara sistematis dan berkesinambungan dalam upaya membantu klien mencapai tugas-tugas perkembangannya.

Teknik bimbingan yang dapat digunakan disini adalah pendapat, (*brain storming*), *home room*, dan karyawisata. Perbaikan (penyembuhan), yaitu fungsi bimbingan yang bersifat kuratif. Fungsi ini berkaitan erat dengan upaya pemberian bantuan kepada klien yang telah mengalami masalah, baik menyangkut aspek pribadi, sosial, belajar, maupun karir. Teknik yang dapat digunakan adalah konseling dan *remedial teaching*.

Pelaksanaan fungsi-fungsi di atas merupakan tanggung jawab yang harus diemban seorang konselor dalam memberikan layanan untuk memecahkan masalah klien dan untuk perkembangan kepribadian klien. Seorang konselor yang baik akan dapat melaksanakan kinerjanya dengan baik. Pelayanan fungsi-fungsi tersebut dapat diperuntukan bagi semua klien, yang dapat mengantarkan pada pengembangan kepribadian klien yang lebih optimal.

Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran yang dapat digambarkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



METODOLOGI PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Bentuk deskriptif yang digunakan pada penelitian untuk mengumpulkan sejumlah data secara kuantitatif. Sedangkan metode penelitian yang digunakan dianalisis dengan rumus persentase. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan informasi mengenai persepsi dengan harapan warga binaan terhadap pembinaan.

Instrumen penelitian untuk mengukur variabel persepsi dan harapan warga binaan narkoba menggunakan angket tertutup dengan model skala likert, karena model ini dianggap paling sesuai untuk menanyakan pendapat atau wawasan seseorang terhadap suatu objek. Untuk alternatif jawaban terdiri dari 5 kategori, yaitu: sangat sesuai dengan pendapat saya (SS), sesuai dengan pendapat saya (S), kurang sesuai (KS), tidak sesuai (TS) dan sangat tidak sesuai (STS).

Tabel 2. Kisi-Kisi Instrumen Penelitian

Aspek	Indikator	Item	Jml
1	2	3	4
1. Pengenalan tentang Pembinaan	1.1 Pembinaan Mental/Kesadaran:		14
	a. Mental	1, 2, 3, 4	
	b. Kesadaran Beragama	5, 6, 7, 8, 9	
	c. Kemampuan Intelektual	10, 11, 12, 13, 14	
	1.2 Pembinaan Sosial/Pengintegrasian		
	a. Norma-norma Hidup	15, 16, 17, 18	13
	b. Kegiatan Sosial	19, 20, 21, 22, 23,24,25,26,27	
	1.3 Pembinaan Kemandirian:		5
	a. Keterampilan Mesin dan elektronika	28	
	b. Keterampilan Industri kecil	29	
	c. Keterampilan Bakat	30, 31, 32	

2. Interpretasi tentang Pembinaan	2.1 Pembinaan Mental/Kesadaran:		4
	a. Mental	33	
	b. Kesadaran Beragama	34, 35	
	c. Kemampuan Intelektual	36	
	2.2 Pembinaan Sosial/Pengintegrasian		3
	a. Norma-norma Hidup	37, 38	
	b. Kegiatan Sosial	39	
	1.3 Pembinaan Kemandirian:		5
	a. Keterampilan Mesin dan elektronika	40	
	b. Keterampilan Industri kecil	41, 42	
	c. Keterampilan Bakat	43, 44	

Uji coba instrumen

Instrumen yang telah tersusun terlebih dahulu diuji cobakan untuk mendapatkan instrumen yang sah dan andal (valid dan reliabel). Skor respon persepsi dan harapan warga binaan narkoba bergerak dari 1 sampai 5, sehingga dengan n butir pernyataan dalam skala akan diperoleh rentang skor (1xn) sampai (5xn). Sementara respon harapan warga binaan narkoba terhadap pembinaan bergerak dari 1 sampai 5, dengan n butir skala akan diperoleh rentang skor (1xn) sampai (5xn).

Pengujian Validitas dan Reliabilitas Instrumen

Untuk memperoleh instrumen yang dapat menunjukkan tingkat ketepatan mengukur tingkat persepsi dan harapan warga binaan narkoba tentang pembinaan, maka digunakan uji validitas instrumen. Perhitungan reliabilitas instrumen dengan rumus *Alpha Cronbach*. Berdasarkan hasil uji coba didapat hasil **0,865**. Kalau hasil analisis itu dibandingkan dengan kriteria

reliabilitas yang dikemukakan oleh Anastasy, yaitu 0,80-an sampai 0,90-an, maka angket tersebut sudah memenuhi standar reliabilitas.¹⁰

Teknik Analisis Data

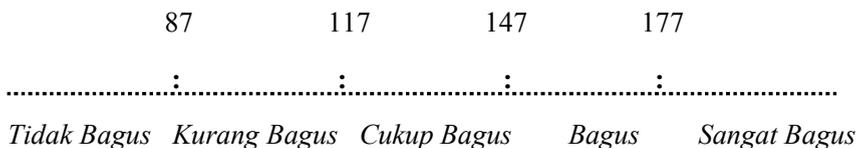
Perhitungan angka-angka dengan menggunakan program SPSS versi 11.5. Adapun langkah analisis data sebagai berikut: Deskripsi data dilakukan untuk mendeskripsikan data tentang persepsi dan harapan warga binaan narkoba tentang pembinaan. Pada penelitian ini terdiri atas 44 butir item, masing-masing berkisar mulai dari 1-5. Dengan demikian skor terkecil yang mungkin diperoleh oleh subjek pada skala tersebut 44 (yaitu 44×1) dan skor terbesar adalah 220 (yaitu 44×5), dan mean teoritisnya adalah $M = 44 \times 3 = 132$. Maka rentangan skala skor sebesar 176 ($220 - 44$) itu dibagi dalam enam satuan diviasi standar sehingga diperoleh $176/6 = 30$ (dibulatkan). Angka 30 ini merupakan estimasi besarnya satuan deviasi standar populasi (SD) yang digunakan untuk membuat kategori normatif skor subjek. Norma kategorisasi yang dapat digunakan adalah:

- | | |
|---|--------------------------------------|
| 1. $X \leq (M - 1.5 \text{ SD})$ | kategori tidak bagus |
| 2. $(M - 1.5 \text{ SD}) < X \leq (M - 0.5 \text{ SD})$ | kategori kurang bagus |
| 3. $(M - 0.5 \text{ SD}) < X \leq (M + 0.5 \text{ SD})$ | kategori cukup bagus |
| 4. $(M + 0.5 \text{ SD}) < X \leq (M + 1.5 \text{ SD})$ | kategori bagus |
| 5. $(M + 1.5 \text{ SD}) < X$ | kategori sangat bagus. ¹¹ |

Dengan harga $SD = 30$ dan $M = 132$, maka diperoleh kategori-kategori persepsi dan harapan sebagai berikut:

- | | |
|---|-----------------------|
| 1. $X \leq [132 - (1.5 \times 30)]$ | kategori tidak bagus |
| 2. $[132 - (1.5 \times 30)] < X \leq [132 - (0.5 \times 30)]$ | kategori kurang bagus |
| 3. $[132 - (0.5 \times 30)] < X \leq [132 + (0.5 \times 30)]$ | kategori cukup bagus |
| 4. $[132 + (0.5 \times 30)] < X \leq [132 + (1.5 \times 30)]$ | kategori bagus |
| 5. $[132 + (1.5 \times 30)] < X$ | kategori sangat bagus |

Yang dapat diilustrasikan sebagai:



HASIL PENELITIAN

Persepsi Warga Binaan Narkoba

Pengenalan terhadap Pembinaan Mental/Kesadaran

Terdiri dari 32 item pernyataan dengan skor maksimal sebesar 160 dan skor minimal 32, dapat dicari mean teoritis adalah 96 dan deviasi standar populasinya adalah 21 (dibulatkan).

Tabel 3. Deskripsi Persepsi Warga Binaan Narkoba terhadap Pengenalan Pembinaan

Jenis Pembinaan	N	Pengenalan tentang Pembinaan									
		SB		B		CB		KB		TB	
		f	%	F	%	f	%	f	%	f	%
Mental	53	0	0	23	12.19	30	87.81	0	0	0	0
Sosial	53	0	0	21	39.62	32	60.38	0	0	0	0
Kemandirian	53	1	1.89	47	88.68	5	9.43	0	0	0	0

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa persepsi warga binaan narkoba terhadap pengenalan pembinaan seperti: pembinaan mental/kesadaran, pembinaan sosial/pengintegrasian, dan pembinaan kemandirian secara umum cukup bagus. Hal ini diduga merupakan pengaruh terbatasnya infrastruktur serta paradigma petugas rumah tahanan yang belum berubah bisa jadi penyebab penderitaan bagi warga binaan. Ini berarti bahwa tujuan akhir dari sistem pemasyarakatan adalah bersatunya kembali warga binaan pemasyarakatan dengan masyarakat, sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab, sehingga keberadaan mantan warga binaan di masyarakat nantinya diharapkan mau dan mampu untuk ikut membangun masyarakat dan bukan sebaliknya justru menjadi penghambat dalam pembangunan.

Tabel 4. Deskripsi Persepsi Warga Binaan Narkoba terhadap Interpretasi Pembinaan

Jenis Pembinaan	N	Interpretasi tentang Pembinaan									
		SB		B		CB		KB		TB	
		f	%	f	%	f	%	f	%	f	%
Mental	53	0	0	23	43.39	26	49.05	4	7.56	0	0
Sosial	53	0	0	22	41.50	25	47.16	5	9.43	1	1.91
Kemandirian	53	2	3.77	27	50.94	24	45.29	0	0	0	0

Dalam penelitian ini secara keseluruhan hasil temuan menunjukkan bahwa persepsi warga binaan narkoba terhadap interpretasi pembinaan seperti: pembinaan mental/kesadaran, pembinaan sosial/pengintegrasian dan pembinaan kemandirian berada pada kualifikasi cukup bagus, hal ini disebabkan persepsi mempunyai peranan penting dalam mendorong warga binaan narkoba untuk melakukan tindakan karena keinginan warga binaan narkoba untuk berbuat atau tidak berbuat sering didasarkan kepada yang dipahami dan diyakininya. Persepsi menentukan cara warga binaan narkoba bertingkah laku. Ada banyak faktor-faktor yang mempengaruhi setiap warga binaan dalam mengekspresikan persepsinya tergantung pada bagaimana pembina memberikan makna terhadap apa yang diterima oleh panca indera warga binaan. UU 12/1995 tentang Pemasarakatan telah menggariskan 6 (enam) prinsip dasar dalam melakukan pembinaan dan bimbingan terhadap narapidana, diantaranya narapidana mendapatkan pembekalan, mendapatkan perlakuan dan pelayanan yang sama, pendidikan kepribadian, memperlakukan narapidana sebagai manusia, tidak lagi mendapatkan penderitaan selain pembatasan ruang gerak, dan tetap berhubungan dengan keluarga dan masyarakat.

Harapan Warga Binaan Narkoba

Pengenalan terhadap Pembinaan Mental/Kesadaran

Terdiri dari 32 item pernyataan dengan skor maksimal sebesar 160 dan skor minimal 32, dapat dicari mean teoritis adalah 96 dan deviasi standar populasinya adalah 21 (dibulatkan).

Tabel 5. Deskripsi Harapan Warga Binaan Narkoba terhadap Pengenalan Pembinaan

Jenis Pembinaan	N	Pengenalan tentang Pembinaan									
		SM		M		CM		KM		TM	
		f	%	f	%	f	%	f	%	f	%
Mental	53	2	3.77	42	79.24	9	16.99	0	0	0	0
Sosial	53	2	3.77	42	79.24	9	16.99	0	0	0	0
Kemandirian	53	10	18.86	29	54.72	14	26.42	0	0	0	0

Setiap manusia memiliki harapan-harapan tertentu yang ingin diwujudkan dalam kehidupannya. Harapan itu timbul karena manusia memiliki dorongan-dorongan dari dalam dirinya. Manusia mempunyai harapan karena adanya tenaga penggerak dalam dirinya yang meliputi: a) Dorongan kodrat, yaitu keadaan atau pembawaan alamiah manusia yang telah ada pada dirinya sebagai pemberian Tuhan, b) Dorongan kebutuhan hidup, manusia senantiasa berupaya memenuhi kebutuhan-kebutuhan untuk mendatangkan kepuasan bagi dirinya. Ketidakmampuan manusia memenuhi kebutuhan hidupnya akan mendatangkan permasalahan dalam dirinya. Warga binaan narkoba memiliki harapan agar pembinaan yang diberikan oleh Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Payakumbuh sesuai dengan harkat dan martabat manusia yaitu tanpa kekerasan, penindasan dan penyiksaan, maksudnya adalah memberikan perlakuan dan pembinaan sesuai dengan hakikat manusia yang diciptakan oleh Allah paling sempurna dibandingkan dengan makhluk yang lain. Walau bagaimanapun warga binaan narkoba juga memiliki hati nurani sama dengan manusia yang lain, jadi sepatasnyalah mendapatkan perlakuan yang sama dengan yang lain.¹²

Tabel 6. Deskripsi Harapan Warga Binaan Narkoba terhadap Interpretasi Pembinaan

Jenis Pembinaan	N	Interpretasi tentang Pembinaan									
		SM		M		CM		KM		TM	
		f	%	f	%	f	%	f	%	f	%
Mental	53	9	16.98	34	64.15	10	18.87	0	0	0	0
Sosial	53	8	15.10	35	66.03	10	18.87	0	0	0	0
Kemandirian	53	22	41.50	24	45.28	7	13.22	0	0	0	

Dalam penelitian ini secara keseluruhan hasil temuan menunjukkan bahwa harapan warga binaan narkoba terhadap interpretasi pembinaan seperti: pembinaan mental/kesadaran, pembinaan sosial/pengintegrasian dan pembinaan kemandirian berada pada kualifikasi mengharapkan pembinaan yang baik. Hal ini sah-sah saja terjadi karena warga binaan narkoba mengharapkan pembinaan yang lebih baik lagi sesuai dengan Undang-undang No.12 Tahun 1995. Kelebihan jumlah penghuni (*over capacity*) di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan (Lapas) menimbulkan permasalahan yang sangat kompleks. Yaitu mulai dari resiko pekerjaan bagi petugas, sanitasi hunian yang jauh dari sehat, perawatan napi yang terabaikan hingga terjadi tawuran antar blok. Permasalahan tersebut di atas harus dicari solusinya. Mengurangi tingkat kepadatan penghuni Lapas Payakumbuh merupakan pertimbangan utama dari pembangunan Lapas baru, Lapas baru dibangun dengan keadaan yang lebih bagus dan kamar lebih banyak. Melalui kenyamanan yang diberikan maka pada akhirnya napi dapat introspeksi diri untuk kembali ke jalan yang benar serta bertaubat tidak mengulangi perbuatan yang mengakitkannya menjadi penghuni lapas.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai persepsi dan harapan warga binaan narkoba tentang pembinaan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Persepsi warga binaan narkoba tentang: a) pengenalan pembinaan, dan b) interpretasi pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Payakumbuh pada umumnya berada pada kategori cukup bagus.
2. Harapan warga binaan narkoba tentang: a) pengenalan pembinaan, dan b) interpretasi pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Payakumbuh pada umumnya warga binaan mengharapkan pembinaan yang baik kepada semua warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Payakumbuh.

Implikasi

1. Peran pembina di lembaga pemasyarakatan tidak hanya mengawasi ruang gerak warga binaan, tapi yang paling penting adalah mengayomi serta memasyarakatkan warga binaan yang dianggap sebagai orang buangan, oleh lembaga pemasyarakatan diupayakan kembali menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa serta dapat diharapkan berperan aktif dan produktif dalam pembangunan, dan bagi dirinya dapat berbahagia

di dunia dan akhirat. Pencapaian tujuan yang dimaksud dilakukan oleh pihak lembaga pemasyarakatan serta dengan bentuk-bentuk pembinaan, pengayoman yakni pembinaan mental, sosial dan keterampilan.

2. Di dalam pelaksanaan pengayoman warga binaan di lembaga pemasyarakatan, yang berorientasi pada masa depan yang cerah dapat diwujudkan, yakni: mempercepat kesadaran warga binaan, mempersiapkan kembali ke masyarakat, dan memberikan bekal untuk hidup bermasyarakat.
3. Prayitno, (2006:6) menjelaskan ada 9 jenis kegiatan layanan bimbingan dan konseling yang dapat diberikan oleh konselor/pembina, namun yang bisa dilaksanakan sesuai dengan penelitian ini di antaranya adalah sebagai berikut :

- a. Layanan Orientasi

Layanan BK yang memungkinkan klien memahami lingkungan yang baru dimasuki, untuk mempermudah dan memperlancar berperannya klien di lingkungan yang baru itu. Pemberian layanan orientasi ini didasarkan pada anggapan bahwa memasuki lingkungan baru bukanlah hal yang selalu dapat berlangsung dengan mudah dan menyenangkan bagi setiap orang, apalagi di lembaga pemasyarakatan terdiri dari berbagai macam latar belakang manusia yang berbeda, berbagai macam permasalahan, dan berbagai peraturan baru yang mengikat warga binaan.

- b. Layanan Informasi

Layanan BK yang memungkinkan klien menerima dan memahami berbagai informasi yang dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dan pengambilan keputusan untuk kepentingan klien.

- c. Layanan Konseling Perorangan

Layanan BK yang memungkinkan klien mendapatkan layanan langsung tatap muka (secara perorangan) dengan konselor dalam rangka pembahasan dan pengentasan masalah pribadi yang dideritanya.

- d. Layanan Bimbingan Kelompok

Layanan BK yang memungkinkan sejumlah klien secara bersama-sama melalui dinamika kelompok memperoleh berbagai bahan dari nara sumber tertentu dan/atau membahas secara bersama-sama pokok bahasan (topik) tertentu yang berguna untuk menunjang

pemahaman dan kehidupan mereka sehari-hari dan/atau untuk pengembangan diri baik sebagai individu maupun sebagai klien, dan untuk pengambilan keputusan dan/atau tindakan tertentu.

e. Layanan Konseling Kelompok

Layanan BK yang memungkinkan klien memperoleh kesempatan untuk pembahasan dan pengentasan masalah yang dialaminya melalui dinamika kelompok; masalah yang dibahas itu adalah masalah-masalah pribadi yang dialami oleh masing-masing anggota kelompok.

Selain dari kegiatan layanan, seorang konselor juga dapat melaksanakan kegiatan pendukung. Kegiatan layanan tersebut di atas akan dipermudah, lancar dan ditingkatkan keberhasilannya oleh kegiatan pendukung. Kegiatan ini bisa dilaksanakan tanpa kontak langsung dengan warga binaan kasus narkoba. Kegiatan pendukung yang perlu dilakukan adalah:

- a. Aplikasi instrumen bimbingan dan konseling yaitu, kegiatan mengumpulkan data tentang diri klien dan lingkungannya, melalui aplikasi berbagai instrumen, baik tes maupun non-tes.
- b. Penyelenggaraan himpunan data yaitu, kegiatan menghimpun data yang relevan dengan pengembangan klien, yang diselenggarakan secara berkelanjutan, sistematis, kompherensif, terpadu, dan bersifat rahasia.
- c. Konferensi kasus yaitu, kegiatan membahas permasalahan klien dalam pertemuan khusus yang dihadiri oleh pihak-pihak yang dapat memberikan data, kemudahan dan komitmen bagi terentaskannya masalah klien, yang bersifat terbatas dan tertutup.
- d. Kunjungan rumah yaitu, kegiatan memperoleh data, kemudahan dan komitmen bagi terentaskannya masalah klien melalui pertemuan dengan orang tua atau keluarganya.
- e. Tampilan kepustakaan yaitu, kegiatan menyediakan berbagai bahan pustaka yang dapat digunakan klien dalam pengembangan pribadi, kemampuan sosial, kegiatan belajar, dan karir/jabatan.
- f. Alih tangan kasus yaitu, kegiatan untuk memindahkan penanganan masalah klien ke pihak lain sesuai keahlian dan kewenangannya.¹³

Pada umumnya karakteristik hubungan konseling terhadap warga binaan narkoba adalah: 1) konseling sebagai suatu kegiatan bantuan. Bantuan yang dimaksudkan di sini bukanlah bantuan materi atau tenaga berdasarkan balas kasihan, akan tetapi merupakan bantuan profesional dengan memperhatikan berbagai pendekatan dan teknik konseling, 2) kerahasiaan dalam konseling. Masalah klien adalah masalah yang sangat pribadi dan kadang-kadang sulit diungkapkan kepada orang lain. Jika klien datang dengan sukarela kepada konselor untuk mengungkapkan masa lalu dan permasalahannya, konselor dituntut untuk menyimpan rahasia itu secara bijaksana. Karena itu konselor perlu memperhatikan etika konseling. 3) konseling mendorong terjadinya perubahan. Proses konseling yang dilakukan diharapkan mampu membawa klien ke arah yang lebih berarti. Perubahan yang terjadi dapat berupa dalam cara berpikir, memandang suatu pokok masalah, sikap atau perilaku, dalam menilai seseorang yang tidak terlepas dari persoalan yang sedang dihadapi. Melalui konseling, konselor dapat membantu klien lebih mengenal dan memahami diri dan lingkungannya secara efektif, dan 4) meningkatkan hubungan antar-perorangan. Setelah diberikan pelayanan konseling, diharapkan klien dapat meningkatkan hubungan dengan orang lain sehingga kehidupan efektif sehari-hari yang terganggu dapat kembali seperti biasa menjadi efektif sehari-hari.

Saran

1. Petugas, pembina dan kepala lembaga pemasyarakatan Klas IIB Payakumbuh agar lebih meningkatkan pelayanan dalam melaksanakan program pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Payakumbuh khususnya bagian pembinaan dalam mengayomi dan memasyarakatkan warga binaan narkoba;
2. Menkumham dan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Payakumbuh agar meningkatkan pengawasan, menyediakan sarana pengelolaan pengaduan/keluhan bagi warga binaan, mengadakan program bebas peredaran uang, sosialisasi HAM dan mengembangkan kerjasama pengatan HAM, dan membentuk anti diskriminasi, anti penyiksaan dan kekerasan di lembaga pemasyarakatan.

3. Peneliti lain untuk lebih meningkatkan kesadaran minat untuk meneliti dan dapat berguna dalam menghadapi masalah, terutama masalah yang berkaitan dengan disiplin ilmu yang diterjuni (bimbingan dan konseling). []

ENDNOTES

- ¹ BNN. *Advokasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba*. (Jakarta: Badan Narkotika Nasional, 2007), h.24
- ² Sahardjo. 2007. *Pohon Beringin Pengayoman: Rumah Pengayoman Sukamiskin*, (Online). <http://library.usu.ac.id/download-fl/pidana-berlin.pdf>.diakses 25 April 2008
- ³ Elliot, S.N., Kratochwill.T.R., Littlefield, j., & Travers, J.F. 2000. *Educational Psychology: Effective Teaching, effective learning*. (Singapore: McGraw-Hill Bookco,2000), p.225
- ⁴ Steers, Richard M & Lyman W. Porter. 1987. *Motivation & Work Behavior*. Fourth Edition. (Singapore: Mc Graw- Hill Book Compan, 1987)
- ⁵ Prayitno dan Erman Amti. *Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling*. Jakarta: P2MPT Ditjen Dikti Depdikbud, 1994), h. 199
- ⁶ Prayitno, *Pengembangan Potensi Mahasiswa*. (Padang: UNP, 2004), h. 106
- ⁷ Prayitno. *Spektrum dan Keprofesian Konseling*. (Padang: UNP, 2006)
- ⁸ *Ibid*
- ⁹ *Ibid*
- ¹⁰ Agus Irianto. *Statistik: Konsep dasar dan aplikasinya*. (Jakarta: Kencana, 2004)
- ¹¹ Azrul Azwar. *Pengantar Ilmu Kesehatan Lingkungan*. (Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 1995), h. 108
- ¹² Zakiah Darajat. *Remaja Harapan dan Tantangan*. (Jakarta: Ruhama, 1995), h. 62

DAFTAR PUSTAKA

- Azwar, Azrul. 1995. *Pengantar Ilmu Kesehatan Lingkungan*. Jakarta: Mutiara Sumber Widya
- Amriel, Reza Indragiri. 2008. *Psikologi Kaum Muda Pengguna Narkoba*. Jakarta: Salemba Humanika
- Arikunto, Suharsimi. 1990. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta
- Baltus, R.K. 1983. *Personal Psychology for Life and Work*. New York: MC Graw Hill
- BNN. 2007. *Advokasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba*. Badan Narkotika Nasional, Jakarta
- Chaplin. J.P. 1999. *Kamus Lengkap Psikologi*. (Edisi 5). Jakarta: Grafindo Persada.

- Colhoun, James and Joan Ross Acocello. 1978. *Psychology of Adjustment and Human Relationship*. New York: Mc Grow-Hill
- Hawari, Dadang. 2002. *Penyalahgunaan dan Ketergantungan Napza*. Jakarta: FKUI
- Darajat, Zakiah 1995. *Remaja Harapan dan Tantangan*. Jakarta: Ruhama.
- Depdikbud. 1985. *Penanggulangan penyalahgunaan Narkoba, Obat dan Zat Berbahaya*. Jakarta: P2K
- _____ 1990. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Depdiknas. 2006. *Panduan Pelayanan Bimbingan dan Konseling Berbasis Kompetensi*. Jakarta: Balitbang
- Depsos. 2003. *Narkoba, Permasalahan, Dampak dan Pencegahannya*. Jakarta: Depsos
- Ditjen Pemasarakatan. 2008. *Praktik dan Perlakuan yang Tidak Menyenangkan di dalam Lapas (makalah) disajikan pada lokakarya Nasional. 4 April*. Ditjen Pemasarakatan Hukum dan HAM.
- Elliot, S.N., Kratochwill.T.R., Littlefield, j., & Travers, J.F. 2000. *Educational Psychology: Effective Teaching, effective learning*. Singapore: McGraw-Hill Bookco
- Fatwa, AM.. 2007. *Pemerintah Harus Memperhatikan Kondisi Narapidana*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR-RI
- Gay, L.R. 1987. *Educational Research*. Columbus: Charles E. Merrill Oublishing Company
- Ghozali, Imam. 1996. *Masalah Takut dan Harapan*. Surabaya: Bengkul Indah
- Hamalik, Oemar. 2000. *Psikologi Belajar Mengajar*. Bandung: Sinar Algresindo
- Hukum Ham. 2008. *Pembinaan bagi Tahanan dan Warga Binaan: Depan tentang Depkumham Situs Unit Utama*, (Online). Vol.2 No 1 (<http://www.Pembinaan bagi Warga binaan>), diakses 21 September 2007
- Irianto, Agus. 2004. *Statistik: Konsep dasar dan aplikasinya*. Jakarta: Kencana
- Jacobs, Ary. D., L.C., dan Razafieh. *Pengantar Penelitian Pendidikan*. Terjemahan oleh Arief Furchan. 1982. Surabaya: Usaha Nasional
- Lindzey, Gardner & Calvin S.Hall., Richard F. Thompson. 1978. *Psychology*. New York: Worth Publishers. Inc
- Lembaga Bantuan Hukum. 2007. *Realita Kebijakan Pemasarakatan*. Jakarta: LBH Jakarta
- Martono, Lydia Harlina & Satya Joewana. 2006. *Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Berbasis Sekolah*. Jakarta: Balai Pustaka

- Mardani. 2008. *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*. Jakarta: Grafindo Persada
- Majalah Pemasarakatan. Jakarta, terbitan 23 April 1983
- Munandir, Sulaiman. 1991. *Ilmu Sosial Dasar Teori dan Konsep*. Bandung: Eresco
- Oxford Learners Pocket Dictionary. 1995. *Dictionary*. New York: Oxford University Press
- Prayitno dan Amti, Erman. 1994. *Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling*. Jakarta: P2MPT Ditjen Dikti Depdikbud
- _____. 2004. *Pengembangan Potensi Mahasiswa*. Padang: UNP
- _____. 2006. *Spektrum dan Keprofesian Konseling*. Padang: UNP
- Pandjaitan, Petrus Irwan. 2003. *Penderitaan Warga Binaan dan Sistem Pemasarakatan*. Opini. Sinar Harapan
- Prayitno, Elida dkk. 2002. *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Klien SLTP dan SLTA Melalui Bimbingan dan Konseling*. Padang: Balitbang
- Smith, Ronald E. & Irwin G. Sarason. 1987. *Psychology the Frontiers of Behavior*. second Edition. New York: University of Washington Harper & Row Publisher
- Sahardjo. 2007. *Pohon Beringin Pengayoman: Rumah Pengayoman Sukamiskin*, (Online). <http://library.usu.ac.id/download-fl/pidana-berlin.pdf>.diakses 25 April 2008
- Sarlito, Sarwono W. 1979. *Teori Umum Psikologi Sosial*. Jakarta: Rajawali
- Steers, Richard M & Lyman W. Porter. 1987. *Motivation & Work Behavior*. Fourth Edition. Singapore: Mc Graw- Hill Book Company.
- Slameto. 2003. *Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya*. Jakarta: Rineka Cipta
- Undang-Undang No. 12 Tahun 1995. *Pengayoman serta Pemasarakatan Warga Binaan di Lembaga Pemasarakatan*, Menkeh RI
- Willy, Heriadi. 2005. *Berantas Narkoba Tak Cukup Hanya Bicara*. Yogyakarta: Kedaulatan Rakyat
- Yusuf, A. Muri. 2005. *Metodologi Penelitian (Dasar-Dasar Penyelidikan Ilmiah)*. Padang: UNP

ANALISIS BISNIS INDUSTRI GARMEN INDONESIA DALAM KONDISI KRISIS KEUANGAN GLOBAL

Jon Kenedi*

The Purpose of this research is to identify the reason of decreasing in demand of Indonesian garmen industry business in Global Finance Crisis. The other purpose this research find strategy to anticipate decreasing in demand of Indonesian garmen industry business in the same situation. This study used library research method. And then this research found: (1) Decreasing consumer income as impact of global finance crisis result decreasing in demand of Indonesian garmen industrial product, (2) Because of garmen industrial product demand is elastic, decreasing in consumer income given bigger impact to decrease their demand, (3) Indonesian garmen industrial product have many potential developed. This research also recommended that Indonesian Government and company owner doing product, price and promotion strategy in synergy.

Keyword: garmen industry, global finance crisis, decreasing demand.

LATAR BELAKANG MASALAH

Industri garmen telah menjadi salah satu industri andalan nasional semenjak zaman orde baru sampai orde reformasi saat ini yang memberikan banyak manfaat. Industri ini telah menjadi salah satu andalan ekspor nasional dan menghasilkan devisa yang berlipat ganda bagi negara. Dari segi pendapatan negara, perkembangan industri ini telah memberikan sumber pemasukan pajak yang besar bagi negara. Dan yang paling penting, industri garmen menyerap banyak tenaga kerja karena bersifat padat karya, sehingga memberikan solusi terhadap masalah pengangguran yang melanda negara sehingga merupakan salah satu industri *pioneer* yang mendukung kestabilan ekonomi nasional.

* Dosen STAIN Sjech. M. Djamil Djambek Bukittinggi

Secara bisnis, industri ini mempunyai beberapa keunggulan dibandingkan dengan industri lain. Keunggulan pertama, industri ini mempunyai pasar yang stabil karena permintaan terhadap industri ini selalu ada karena merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia. Kedua, industri ini mempunyai pasar yang sangat “*gemuk*” karena banyaknya jumlah penduduk dunia-untuk pasar dalam negeri saja peluangnya mencapai 234 juta calon konsumen yang akan membeli produk industri pakaian jadi (garmen). Ketiga produk industri ini sebahagian merupakan alat pemenuhan gaya hidup sehingga transaksi untuk produk ini tidak hanya satu kali atau dua kali dalam satu tahun, tetapi bisa lebih sering sesuai dengan selera dan pendapatan konsumen. Terakhir produk industri garmen mempunyai margin yang besar terutama untuk garmen untuk pemenuhan gaya hidup.

Dari segi kualitas, produk garmen Indonesia mempunyai kualitas yang lebih baik bila dibandingkan dengan produk garmen asing sehingga diminati oleh beberapa negara tujuan ekspor tradisional seperti Amerika Serikat, Eropa dan Arab Saudi. Walaupun akhir-akhir ini harga produk garmen Indonesia kalah bersaing dengan produk yang sama dari Cina, namun permintaan terhadap produk garmen Indonesia tidaklah menurun secara berarti. Ini menunjukkan bahwa produk garmen Indonesia mempunyai posisi tawar yang kuat di mata konsumen garmen dunia.

Namun demikian, dengan terjadinya krisis keuangan global telah memukul industri garmen Indonesia karena permintaan dari Amerika Serikat sebagai negara sumber krisis menurun tajam, sedangkan Amerika Serikat merupakan negara utama tujuan ekspor Indonesia sehingga menarik untuk dianalisis dalam bentuk makalah dengan judul “*Analisis Bisnis Industri Garmen Indonesia dalam Kondisi Krisis Keuangan Global*”.

Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Apa penyebab terjadinya kemunduran permintaan terhadap produk industri garmen Indonesia?
2. Bagaimana strategi untuk mengatasi penurunan permintaan produk industri garmen Indonesia?

Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi penyebab terjadinya kemunduran permintaan terhadap produk industri garmen Indonesia.
2. Menemukan strategi untuk mengatasi penurunan permintaan produk industri tekstil Indonesia.

KERANGKA TEORI

Tujuan utama operasi perusahaan adalah untuk meningkatkan kemakmuran pemegang saham.¹ Untuk mencapai hal tersebut maka perusahaan harus memperoleh laba yang maksimal. Dengan laba maksimal perusahaan mampu bertumbuh dan melakukan ekspansi yang akan memberikan peluang untuk menghasilkan laba yang lebih besar.

Agar bisa memperoleh laba, perusahaan harus berproduksi pada tingkat dimana $total\ revenue\ (TR) > total\ cost\ (TC)$. Laba maksimal diperoleh bila selisih antara TR dan TC adalah yang terbesar atau pada saat $marginal\ revenue\ (MR) = marginal\ cost\ (MC)$ dari suatu perusahaan.² Untuk memperoleh laba, maka barang yang dihasilkan perusahaan harus mempunyai permintaan, karena dengan adanya permintaan berarti perusahaan mempunyai pendapatan yang akan digunakan untuk menutupi biaya-biaya yang dikeluarkan. Sisa dari biaya yang dikeluarkan tersebutlah yang akan menjadi laba suatu perusahaan.

Permintaan adalah sejumlah barang dan jasa yang diminta pada berbagai tingkat harga. Secara umum ada tujuh faktor yang mempengaruhi permintaan terhadap suatu barang,³ yaitu:

1. Harga barang itu sendiri.
2. Harga barang lain yang berhubungan.
3. Pendapatan masyarakat.
4. Jumlah penduduk.
5. Kebijakan pemerintah dalam pemerataan pendapatan.
6. Ramalan harga pada masa yang datang.
7. Selera konsumen (*taste*).

Harga barang itu sendiri merupakan faktor utama yang mempengaruhi permintaan terhadap suatu barang. Hal ini sesuai dengan hukum permintaan (*demand's law*) yang menyatakan bahwa apabila harga suatu barang meningkat maka permintaan terhadap barang tersebut akan menurun dan sebaliknya bila harga suatu barang menurun maka permintaan terhadap barang tersebut mengalami kenaikan, dengan asumsi faktor-faktor lain dianggap tetap.

Selain harga barang itu sendiri, harga barang lain yang berhubungan juga berpengaruh terhadap permintaan terhadap suatu barang. Sifat hubungan suatu barang dalam kaitannya dengan pengaruh harga terhadap permintaan terhadap suatu barang ada dua yaitu barang substitusi dan barang komplementer. Pada barang substitusi, bila harga suatu barang meningkat maka permintaan terhadap barang substitusinya juga akan meningkat karena masyarakat mencari barang pengganti barang yang harganya mengalami peningkatan harga. Pada barang komplementer, bila harga suatu barang mengalami peningkatan maka permintaan terhadap barang komplementernya mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena naik turunnya permintaan terhadap barang komplementer mengikuti naik turunnya permintaan terhadap barang yang dilengkapinya.

Pendapatan masyarakat memberikan pengaruh yang positif terhadap permintaan terhadap suatu barang dan jasa, artinya bila pendapatan masyarakat meningkat maka permintaan masyarakat terhadap suatu barang juga meningkat sebaliknya bila pendapatan masyarakat menurun maka permintaan terhadap suatu barang dan jasa juga akan menurun, dengan anggapan harga suatu barang dan jasa tersebut tetap.

Jumlah penduduk berpengaruh terhadap permintaan. Makin banyak jumlah penduduk makin banyak jumlah barang yang diminta sebaliknya makin sedikit jumlah penduduk makin sedikit jumlah permintaan. Namun demikian, penduduk yang banyak ini diasumsikan mempunyai pendapatan, karena bila penduduk tersebut tidak punya pendapatan maka ia tidak mempunyai kemampuan untuk melakukan permintaan sehingga tidak berpengaruh terhadap permintaan. Dengan demikian walaupun jumlah penduduk meningkat tetapi mereka tidak punya pendapatan maka tidak akan mempengaruhi permintaan.

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi permintaan adalah kebijaksanaan pemerintah dalam pemerataan pendapatan. Bila pemerintah melakukan kebijaksanaan untuk pemerataan pendapatan maka akan berpengaruh terhadap permintaan suatu barang. Bila sebelum dilakukan kebijaksanaan pemerataan maka penduduk yang berpenghasilan rendah tidak mampu melakukan permintaan terhadap suatu barang. Namun setelah pemerintah melakukan pemerataan pendapatan (melalui berbagai instrumen seperti pajak, subsidi, *transfer payment* dan lain-lain) maka masyarakat yang sebelumnya tidak mempunyai pendapatan, telah mempunyai pendapatan

sehingga mampu melakukan permintaan terhadap barang dan jasa yang dihasilkan suatu perusahaan.

Permintaan juga dipengaruhi oleh ramalan harga pada masa yang datang. Bila masyarakat meramalkan bahwa pada masa yang akan datang akan terjadi kenaikan harga, masyarakat cenderung melakukan permintaan terhadap barang dan jasa pada saat ini sehingga permintaan terhadap barang dan jasa menjadi meningkat. Sebaliknya bila masyarakat meramalkan bahwa harga akan turun pada masa yang akan datang maka masyarakat cenderung menunggu penurunan harga tersebut sehingga ia menunda permintaan terhadap barang dan jasa, akibatnya permintaan terhadap barang dan jasa akan menurun. Hal ini disebabkan karena masyarakat bertindak rasional yaitu untuk menghindari kenaikan harga lebih tinggi lagi jika mereka meramalkan harga akan naik dan mengarpakan dapat membeli lebih murah bila mereka meramalkan harga akan turun.

Berkaitan dengan selera, permintaan terhadap suatu barang akan meningkat bila spesifikasi barang tersebut sesuai dengan selera masyarakat. Sebaliknya bila spesifikasi barang tersebut tidak sesuai dengan selera masyarakat maka permintaan terhadap barang mengalami penurunan.

Selain faktor-faktor di atas, permintaan suatu barang juga dipengaruhi oleh strategi pemasaran. Salah satu strategi pemasaran tersebut bauran pemasaran (*marketing mix*). *Marketing Mix* mempunyai beberapa komponen,⁴ yaitu: 4Ps dan & 4Cs. Komponen dari 4P adalah Product (*produk*), Price (*harga*), Place (*tempat*), dan Promotion (*promosi*). Sedangkan 4Cs terdiri atas *customer needs and wants* (kebutuhan dan keinginan pembeli, *cost to the consumer* (biaya bagi pembeli), *Convenience* (kemudahan memperoleh) dan *Communication* (komunikasi).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif induktif dalam menganalisis keberadaan industri garmen Indonesia di tengah krisis keuangan global. Metode Penelitian yang digunakan adalah *library research* (riset perpustakaan) terhadap literatur yang relevan untuk menganalisis masalah penelitian, seperti buku teori yang relevan, jurnal dan artikel.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS MASALAH

Industri garmen merupakan suatu industri yang mempunyai keunggulan dibandingkan dengan industri lainnya. Keunggulan pertama, industri ini

mempunyai pasar yang stabil karena permintaan terhadap industri ini selalu ada karena merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia. Kedua, industri ini mempunyai pasar yang sangat “gemuk” karena banyaknya jumlah penduduk dunia-untuk pasar dalam negeri saja peluangnya mencapai 234 juta calon konsumen yang akan membeli produk industri pakaian jadi (garmen) Indonesia. Ketiga produk industri ini sebahagian merupakan alat pemenuhan gaya hidup sehingga transaksi untuk produk ini tidak hanya satu kali atau dua kali dalam satu tahun, tetapi bisa lebih sering sesuai dengan selera dan pendapatan konsumen. Terakhir produk industri garmen mempunyai margin yang besar terutama untuk garmen untuk pemenuhan gaya hidup.

Secara kualitas produk industri garmen Indonesia memiliki keunggulan dibandingkan dengan produk industri sejenis dari Negara lain. Ini terbukti dari kemampuan produk industri garmen Indonesia untuk bertahan di pasar dunia terutama di pasar Negara tujuan ekspor tradisional Indonesia, yaitu: Amerika Serikat, Negara-negara Eropa dan Arab Saudi-walaupun harga produk industri garmen Indonesia memiliki harga yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan produk industri tekstil Cina yang membanjiri pasar tekstil dunia termasuk pasar domestik. Hal ini terlihat dari volume penjualan produk industri garmen Indonesia yang tidak mengalami penurunan yang berarti.

Krisis keuangan global yang bermula dari Amerika Serikat, telah menghancurkan perekonomian dunia terutama Negara-negara yang mengandalkan ekspornya ke Amerika Serikat. Negara-negara yang mengandalkan ekspornya ke Amerika Serikat mengalami kemunduran permintaan karena kontraksi ekonomi yang dialami Amerika Serikat. Kontraksi ekonomi tersebut telah menyebabkan penurunan pendapatan penduduk Amerika Serikat sehingga kemampuan untuk membeli barang dan jasa juga menurun. Dengan demikian permintaan terhadap produk-produk yang diekspor oleh negara lain juga menurun. Akibat selanjutnya, Negara-negara yang mengandalkan ekspornya ke Amerika Serikat juga mengalami penurunan penerimaan yang berimplikasi pada penurunan daya beli masyarakatnya secara makro.

Berdasarkan uraian di atas maka untuk pemasaran produk industri garmen Indonesia juga mengalami hal yang sama yaitu mengalami penurunan permintaan. Penurunan permintaan ini dapat dilihat dari dua sisi,

yaitu: pertama, dari sisi permintaan domestik dan dari sisi permintaan ekspor.

Dengan terjadinya krisis keuangan global banyak sedikitnya telah mempengaruhi permintaan agregat di dalam negeri dimana permintaan agregat mengalami penurunan dari yang direncanakan dalam skenario perekonomian Indonesia. Penurunan permintaan agregat ini disebabkan oleh perlambatan pertumbuhan ekonomi karena penurunan penerimaan ekspor Indonesia. Penurunan ekspor telah dipicu oleh penurunan beberapa komoditi unggulan ekspor Indonesia di pasar dunia sebagai dampak krisis keuangan global. Komoditi unggulan yang mengalami penurunan permintaan tersebut, seperti minyak bumi, batu bara, CPO (*crude palm oil*) dan produk turunannya telah menurunkan permintaan masyarakat yang bekerja di sektor tersebut, sehingga juga menurunkan permintaan masyarakat terhadap produk-produk industri termasuk produk Industri garmen.

Dari segi permintaan ekspor, dengan terjadinya penurunan ekspor negara-negara mitra dagang Amerika Serikat maka penerimaan negara-negara tersebut juga mengalami penurunan. Negara-negara mitra dagang Amerika Serikat tersebut juga merupakan Negara-negara tujuan ekspor produk Indonesia, sehingga dengan penurunan penerimaan Negara-negara tersebut juga berpengaruh terhadap penurunan permintaan produk-produk tekstil Indonesia.

Ditinjau dari teori permintaan, maka ada dua faktor yang mempengaruhi permintaan yang berkaitan langsung dengan kasus pengaruh krisis keuangan global terhadap produk Industri garmen Indonesia, yaitu: pendapatan masyarakat dan harga barang lain yang relevan.

Pengaruh pendapatan masyarakat terhadap permintaan adalah bila pendapatan masyarakat mengalami penurunan maka permintaan masyarakat juga akan turun, dan begitu pula sebaliknya. Dengan penurunan pendapatan Negara-negara masyarakat baik domestik maupun luar negeri, telah menurunkan permintaan terhadap produk industri garmen Indonesia. Penurunan permintaan produk industri garmen mengalami permintaan yang lebih besar apabila terjadi penurunan permintaan. Hal ini disebabkan karena industri garmen mempunyai elastisitas permintaan pendapatan yang elastis. Hal ini terjadi karena produk industri garmen merupakan walaupun sudah termasuk kebutuhan primer, namun bagi sebagian masyarakat yang berpendapatan rendah masih merupakan kebutuhan sekunder sehingga

permintaannya dapat dapat menurun drastis bila pendapatan masyarakat menurun.

Pengaruh harga barang substitusi pada industri garmen adalah bila terjadi penurunan pendapatan masyarakat, maka penurunan pendapatan masyarakat juga menurunkan permintaan terhadap produk industry garmen juga mengalami penurunan yang sangat besar. Hal ini terjadi karena industry garmen mempunyai elastic permintaan silang yang elastis. Hal ini terjadi karena produk industry garmen mempunyai barang pengganti yang sangat dekat. Oleh karena itu bila terjadi penurunan pendapatan mesyarakat maka terjadi penrunan permintaan yang sangat besar terhadap produk industri garmen.

Strategi pemasaran yang relevan dilakukan oleh industri garmen dalam kaitan dengan aplikasi *marketing mix* adalah strategi produk, strategi promosi, strategi harga, *Customer needs and wants* (kebutuhan dan keinginan pembeli, *Cost to the consumer* (biaya bagi pembeli), *Convenience* (kemudahan memperoleh) dan *Communication* (komunikasi).

Dalam strategi produk, industri garmen Indonesia harus menciptakan produk yang memiliki kualitas tinggi sehingga memberikan nilai lebih (*value added*) kepada konsumen bila dibandingkan apabila mereka mengkonsumsi produk garmen negara lain. Hal ini akan memberikan kepuasan lebih tinggi kepada konsumen sehingga konsumen akan memilih produk garmen Indonesia, walaupun misalnya harga produk garmen Indonesia lebih tinggi dibandingkan dengan produk sejenis dari Negara lain. Dalam jangka panjang kalau kualitas dapat dipertahankan akan menciptakan kesetiaan pelanggan, sehingga menjamin kelangsungan pasar yang berimplikasi pada keberlanjutan aktifitas industri.

Faktor harga juga sangat mempengaruhi permintaan suatu barang. Sesuai dengan hukum permintaan, maka apabila harga rendah maka permintaan terhadap suatu barang meningkat. Strategi harga merupakan salah satu strategi bersaing dalam *grand strategy* yang dikenal dengan strategi *cost leadership*.⁵ Dalam strategi ini, perusahaan yang menang bersaing -apalagi dalam pasar yang lesu harus bisa menekan biaya produksi seminimal mungkin agar bisa menjual produk dengan harga yang jauh lebih rendah dari pesaing dengan kualitas produk yang lebih tinggi atau minimal sama dengan kualitas produk pesaing. Hal ini telah dilakukan Cina selama ini. Indonesia tentu bisa melakukan hal yang lebih baik dari Cina karena Indo-

nesia mempunyai upah tenaga kerja yang lebih rendah yang didukung oleh sumber daya alam yang melimpah untuk dikembangkan menjadi bahan baku garmen alami.

Promosi juga sangat penting dilakukan karena promosi memberikan beberapa manfaat bagi suatu produk, yaitu: (1) Memperkenalkan produk kepada konsumen baik konsumen asing maupun domestik, (2) Mempertahankan posisi produk di mata konsumen dan (3) Mengedukasi pasar. Dengan ketiga manfaat ini produk akan diterima oleh konsumen karena semakin intensif promosi dilakukan produk akan semakin lekat di benak konsumen melalui proses asosiasi. Oleh karena itu pemerintah dan pengusaha garmen harus bersinergi mengadakan promosi terhadap produk industri garmen Indonesia secara intensif baik di dalam maupun di luar negeri. []

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Penurunan pendapatan masyarakat akibat krisis keuangan global telah mengakibatkan penurunan terhadap permintaan terhadap produk industri garmen Indonesia baik di dalam negeri maupun dari luar negeri.
2. Karena permintaan produk industri garmen bersifat elastis maka penurunan pendapatan masyarakat ini telah menurunkan permintaan yang lebih besar terhadap produk garmen Indonesia.
3. Produk industri garmen Indonesia mempunyai potensi untuk meningkatkan pangsa pasar di tengah krisis keuangan global, karena produk garmen mempunyai berbagai keunggulan seperti: melimpahnya bahan baku industri tekstil sebagai bahan baku garmen di Indonesia, upah tenaga kerja yang masih rendah dan tingginya kreatifitas para perancang Indonesia.

Saran

Dari uraian dan kesimpulan di atas dapat disarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemerintah dan para pengusaha harus mengalihkan tujuan ekspor komoditi produk industri garmen ke Negara-negara lain yang tidak begitu mengalami imbas dampak krisis keuangan global seperti Negara-negara timur tengah.

2. Para pengusaha industri garmen harus menciptakan keunggulan bersaing produk-produk industri garmen Indonesia sesuai dengan selera masyarakat sehingga walaupun masyarakat mengalami penurunan pendapatan, maka permintaan terhadap produk industri garmen dapat dipertahankan.
 3. Pemerintah dan pengusaha garmen harus berusaha menerapkan *marketing mix* secara optimal terutama dalam masalah strategi produk, harga, promosi secara sinergis sehingga produk industri garmen Indonesia disamping mempunyai keunggulan bersaing dari segi harga dan kualitas produk juga menjadi *customize* di mata konsumen. []
-

ENDNOTES

- ¹ Ross, 2000
- ² Sadono Sukirno, *Pengantar Ekonomi Mikro*, Edisi 4, (Jakarta: Raja Grafindo. 2005)
- ³ Sadono Sukirno, *Pengantar Ekonomi Mikro*, Edisi 4, (Jakarta: Raja Grafindo. 2005)
- ⁴ Phillips Kotler, *Manajemen Pemasaran*, Edisi Revisi, (Jakarta: Prenhalindo, 2000)
- ⁵ Potter, 1980

DAFTAR PUSTAKA

- Kotler, Phillips, (2000), *Manajemen Pemasaran*, Edisi Revisi, Prenhalindo, Jakarta.
- Kotler, Phillips dkk 2002, *Manajemen Pemasaran Prespektif Global*, Edisi ke-2, Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Keegan, Warren J. 1999, *Manajemen Pemasaran Global*, Edisi Keenam, Jakarta: PT Indeks.
- Pearce, John A., dan Robinson Jr Richard B, 2001, *Strategic Management, Formulation, Implementation, and Control*, Singapore: Irwin Mc Graw-Hill
- Sekaran, Uma., 2000, *Research Methods For Business*, Third Edition, Singapore: John Wiley & Sons Inc
- Sukirno, Sadono, 2005, *Pengantar Ekonomi Mikro*, Edisi 4, Jakarta: Raja Grafindo.
- Wheelen, T. L., dan Hunger, D. J., 2003, *Strategic Management and Business Policy*, Massachusetts: Addison-Wesley Publishing Company.

EFEKTIFITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA BUKITTINGGI

Nofiardi*

Abstract: Mediation under Section 1 Rule of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 02 Year 2003 on the Court Mediation Procedure. is a dispute resolution through negotiation the parties with the assistance of a mediator. The mediator is a neutral party and not take sides, which works to help the parties in finding a variety of possible disputes. Supreme Court Regulation No. 01 of 2008 on Mediation Procedure in Court is a refinement of the Perma Number 02 of 2003 on Mediation Procedure in Court. Once the importance of mediation, so any case that does not go through mediation procedure based Perma No. 01 of 2008 on Mediation Procedure in the Court of a violation of the provisions of Article 130 or Article 154 of the HIR and RBg resulting decision null and void.

Keywords: Mediation and Divorce

PENDAHULUAN

Peradilan Agama sebagai lembaga Negara yang dijamin keberadaannya menurut Undang-Undang Dasar 1945 dengan tugas pokoknya adalah menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya.

Peradilan Agama dalam menjalankan tugasnya dimulai dari proses penerimaan perkara, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara tersebut melalui majelis hakim dalam persidangan, serta sampai pada tahap pelaksanaan putusan (*eksekusi*), Peradilan Agama harus selalu dalam koridor, bingkai, dan pengawalan hukum acara.¹ Sebab apabila lalai atau bahkan sengaja tidak menerapkan hukum acara yang berlaku, maka akan berakibat fatal dan menjadikan mentah kembali seluruh proses penanganan perkara

* Dosen STAIN Sjech. M. Djamil Djambek Bukittinggi

yang telah berlangsung lama. Dalam hal ini pihak yang paling dirugikan dan diterlantarkan adalah masyarakat pencari keadilan.

Mekanisme pemeriksaan perkara di Pengadilan Agama, langkah yang pertama sekali harus dilaksanakan oleh majelis hakim adalah melakukan proses damai antara kedua belah pihak yang berperkara. Hakim wajib mendamaikan para pihak yang berperkara. Hal ini sesuai dengan Pasal 130 HIR dan Pasal 154 R.Bg yang menghendaki penyelesaian sengketa melalui proses damai.

Belum efektifnya upaya damai dalam persidangan yang mengakibatkan penumpukan perkara di pengadilan, karena begitu banyak para pihak yang berperkara mengajukan upaya hukum baik banding, kasasi dan peninjauan kembali.

Memperhatikan kondisi tersebut, maka Mahkamah Agung Republik Indonesia memberdayakan para hakim menyelesaikan perkara dengan perdamaian yang digariskan dalam Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBg, melalui mekanisme integrasi **mediasi** dalam sistem peradilan.

Secara etimologi, istilah mediasi berasal dari bahasa Latin, *mediare*, yang berarti berada di tengah. Makna ini menunjukkan pada peran yang ditampilkan oleh pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa diantara para pihak. "Berada di tengah" juga bermakna mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Ia harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan dari pihak yang berperkara.²

Menurut Michael Noone dalam buku berjudul "Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, dan Arbitrase" oleh Jimmy J. Sembiring menyatakan bahwa mediasi adalah: "*The commonsense idea that the intervention of the parites, of an experienced, to independent and trusted person can be expected to help the parties settle their quarrel by negotiating in collaborative rather than adversarial way*".³ Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa dengan perantaraan pihak ketiga, yakni pihak yang memberi masukan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka. Berbeda dengan arbitrase harus ditaati para pihak, layaknya putusan pengadilan. Sedangkan pada mediasi, tidak terdapat kewajiban masing-masing pihak untuk mentaati apa yang disarankan oleh mediator.⁴

Pengertian mediasi secara lebih kongkrit dapat ditemukan dalam Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui proses perundingan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Mediator adalah pihak yang bersifat netral dan tidak memihak, yang berfungsi membantu para pihak dalam mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (selanjutnya disebut Perma) Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan merupakan penyempurnaan terhadap Perma Nomor 02 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Dalam Pasal 11 Perma Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan disebutkan bahwa setelah para pihak hadir pada sidang pertama, hakim mewajibkan para pihak pada hari itu juga atau paling lama 2 (dua) hari kerja berikutnya untuk berunding guna memilih mediator termasuk biaya yang mungkin timbul akibat pilihan penggunaan mediator bukan hakim. Para pihak segera menyampaikan mediator pilihan mereka kepada ketua majelis hakim, dan ketua majelis hakim segera memberitahu mediator terpilih untuk melaksanakan tugasnya. Jika dalam masa 2 (dua) hari sejak sidang pertama, para pihak tidak dapat sepakat memilih mediator yang dikehendaki maka para pihak wajib menyampaikan kegagalan mereka memilih mediator kepada ketua majelis hakim, dan ketua majelis hakim segera menunjuk hakim bukan pemeriksa pokok perkara yang bersertifikat pada pengadilan yang sama untuk menjalankan fungsi mediator. Jika pada pengadilan yang sama tidak terdapat hakim bukan pemeriksa perkara yang bersertifikat, maka Hakim Pemeriksa Pokok Perkara dengan atau tanpa sertifikat yang ditunjuk oleh ketua majelis hakim wajib menjalankan fungsi mediator.

Lebih lanjut pasal 13 menyatakan bahwa dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah para pihak menunjuk mediator yang disepakati, masing-masing pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada satu sama lain dan kepada mediator. Ayat (2) menyatakan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah para pihak gagal memilih mediator, masing-masing pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada hakim mediator yang ditunjuk.⁵

Proses mediasi berlangsung paling lama 40 (empat puluh) hari kerja sejak mediator dipilih oleh para pihak atau ditunjuk oleh ketua majelis hakim. Atas dasar kesepakatan para pihak, jangka waktu mediasi dapat diperpanjang paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak berakhirnya masa 40 (empat puluh) hari. Selama proses mediasi berlangsung, mediator berkewajiban menyiapkan jadwal mediasi, mendorong para pihak secara langsung berperan dalam proses mediasi, dan bila dianggap perlu dapat melakukan *kaukus*.⁶

Mediator berkewajiban menyatakan proses mediasi menemui kegagalan atau mencapai kesepakatan kepada ketua majelis hakim. Mediasi dinyatakan gagal bila para pihak atau salah satu pihak telah dua kali secara berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi sesuai dengan jadwal pertemuan yang telah disepakati, atau telah dua kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi tanpa alasan yang sah.⁷

Jika para pihak mencapai kesepakatan perdamaian, maka para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang dicapai dan ditandatangani oleh para pihak dan mediator. Para pihak yang telah mencapai kesepakatan damai, wajib menghadap kepada hakim pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memberitahukan kesepakatan perdamaian. Para pihak dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada hakim untuk dikuatkan dalam akta perdamaian.⁸

Jika para pihak tidak mencapai kesepakatan perdamaian dalam masa 40 (empat puluh) hari sejak para pihak memilih mediator, maka mediator wajib menyampaikan secara tertulis bahwa proses mediasi telah gagal, dan memberitahukan kegagalan mediasi kepada hakim. Segera setelah menerima pemberitahuan tersebut, hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku.⁹

Begitu pentingnya mediasi, sehingga setiap perkara yang tidak menepuh prosedur mediasi berdasarkan Perma Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan di atas merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 130 HIR dan atau Pasal 154 RBg yang mengakibatkan **putusan batal demi hukum**.¹⁰

Dalam pemeriksaan perkara perceraian di Pengadilan Agama Bukittinggi, tentunya juga harus memediasi para pihak yang mengajukan perceraian di Pengadilan Agama tersebut. Penelitian ini tentang efektifitas mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Bukittinggi dalam

rangka mengurangi angka perceraian dan penumpukan perkara di pengadilan.

KERANGKA TEORITIK

Gugatan dan Permohonan

Menurut Mardani gugatan ialah surat yang diajukan oleh penggugat kepada Ketua Pengadilan Agama yang berwenang, yang memuat tuntutan hak yang didalamnya mengandung sengketa dan merupakan dasar landasan pemeriksaan perkara dan pembuktian kebenaran suatu hak.¹¹ Sedangkan permohonan ialah surat yang didalamnya berisi tuntutan hak perdata oleh pihak yang berkepentingan terhadap suatu hal yang tidak mengandung sengketa, sehingga badan peradilan yang mengadili dianggap suatu proses peradilan yang bukan sebenarnya.

Dalam surat gugatan harus ada beberapa unsur yang terkandung di dalamnya. Unsur-unsur gugatan merupakan bagian-bagian yang harus ada di dalam surat gugatan. Jika salah satu unsur itu tidak ada, maka gugatan tidak akan diterima sebagai gugatan oleh Pengadilan Agama.

Unsur-unsur gugatan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Identitas para pihak dan kedudukannya dalam perkara
Identitas para pihak dalam surat gugatan harus memuat nama, gelar atau alias atau julukan, bin/binti, umur, agama, pekerjaan, tempat tinggal terakhir dan statusnya sebagai penggugat atau tergugat.
Namun yang sangat penting dalam identitas para pihak ini adalah nama, umur, dan tempat tinggal para pihak secara lengkap. Ketentuan ini merupakan salah satu syarat formil surat gugatan sebagaimana diatur dalam pasal 67 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
2. Posita (*Position*)
Posita adalah fakta atau hubungan hukum yang terjadi antara kedua belah pihak. Posita merupakan dalil-dalil kongkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar dan alasan dari tuntutan.
3. Petitum
Petitum atau tuntutan adalah sesuatu yang diminta atau yang diharapkan oleh penggugat agar diputus oleh hakim. Petitum disebut juga dengan tuntutan hukum yang diminta penggugat untuk dijatuhkan pengadilan kepada tergugat.

4. Pemeriksaan Perkara di Persidangan

Setelah majelis hakim menilai bahwa panggilan kepada penggugat/pemohon dan tergugat/termohon telah disampaikan secara resmi dan patut, maka tahapan berikutnya adalah melaksanakan pemeriksaan perkara.

Mekanisme pemeriksaan perkara di Pengadilan Agama yang dilakukan di depan sidang pengadilan secara sistemik harus melalui beberapa tahapan berikut ini, yaitu:

Pertama: Melakukan perdamaian, pada sidang upaya perdamaian dapat muncul dari hakim, penggugat/tergugat atau pemohon/termohon. Hakim harus aktif dan sungguh-sungguh untuk mendamaikan para pihak. Apabila ternyata upaya damai tidak berhasil, maka sidang dapat dilanjutkan pada tahap berikutnya.

Kedua: Pembacaan surat gugatan, Pada tahap ini pihak penggugat/pemohon berhak meneliti ulang apakah seluruh materi (dalil gugatan dan petitum) sudah benar dan lengkap.

Ketiga: Jawaban tergugat/termohon. Pihak tergugat/termohon diberi kesempatan untuk membela diri dan mengajukan segala kepentingannya terhadap penggugat/pemohon melalui majelis hakim dalam persidangan.

Keempat: Replik dari penggugat/pemohon. Penggugat/pemohon dapat menegaskan kembali gugatannya atau permohonannya yang disangkal oleh tergugat/termohon dan juga mempertahankan diri atas serangan-serangan tergugat/termohon.

Kelima: Duplik dari tergugat/termohon. Tergugat/termohon menjelaskan kembali jawabannya yang disangkal oleh penggugat. Replik dan duplik dapat diulang-ulang sehingga hakim memandang cukup atas replik dan duplik tersebut.

Keenam: Pembuktian. Penggugat/pemohon mengajukan semua alat bukti untuk mendukung dalil-dalil gugatan atau permohonan. Demikian juga tergugat/termohon mengajukan alat bukti untuk mendukung jawabannya (sanggahannya).

Ketujuh: Kesimpulan. Masing-masing pihak baik penggugat/pemohon maupun tergugat/termohon mengajukan pendapat akhir tentang hasil pemeriksaan.

Kedelapan: Putusan Hakim. Hakim menyampaikan segala pendapatnya tentang perkara itu dan menyimpulkannya dalam amar putusan, sebagai akhir persengketaan.¹²

PERDAMAIAN DAN MEDIASI

Setiap permulaan sidang, sebelum pemeriksaan perkara, hakim diwajibkan mengusahakan perdamaian antara para pihak yang berperkara. Jika usaha perdamaian berhasil maka dibuat Akta Perdamaian yang isinya menghukum kedua belah pihak untuk memenuhi isi perdamaian yang telah dibuat.¹³

Akta perdamaian mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan hakim dan dapat dieksekusi. Jika ada pihak yang tidak mau mentaati isi perdamaian, maka pihak yang dirugikan dapat memohon eksekusi kepada Pengadilan Agama. Eksekusi dilaksanakan seperti menjalankan putusan hakim biasa.¹⁴

Berbeda dengan perdamaian yang dilakukan dalam persidangan oleh majelis hakim, mediasi dilakukan di luar persidangan oleh mediator. Kebijakan Mahkamah Agung memberlakukan mediasi ke dalam proses perkara di Pengadilan Agama dapat ditemukan dari pertimbangan-pertimbangan yang dirumuskan dalam konsideran Perma Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Pertimbangan pertama adalah bahwa mediasi merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah, serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan.

Kedua, pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracara di pengadilan dapat menjadi salah satu instrumen efektif mengatasi masalah penumpukan perkara di pengadilan serta memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam penyelesaian sengketa di samping proses pengadilan yang bersifat memutus.

Jika para pihak sendiri dapat menyelesaikan sengketa tanpa harus diadili oleh hakim, maka secara otomatis jumlah perkara yang harus diperiksa hakim di pengadilan berkurang pula. Jika para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui perdamaian, maka jumlah perkara yang naik ke proses banding, kasasi dan peninjauan kembali semakin berkurang, karena perdamaian merupakan hasil dari kehendak bersama para pihak, sehingga

para pihak tidak akan mengajukan upaya perlawanan hukum. Sebaliknya, jika perkara diputus oleh hakim, maka putusan merupakan hasil dari pandangan dan penilaian hakim terhadap fakta-fakta dan kedudukan hukum para pihak. Pandangan dan penilaian hakim belum tentu sejalan dengan pandangan para pihak, terutama pihak yang kalah, sehingga pihak yang kalah selalu mengadakan perlawanan hukum melalui upaya banding, kasasi dan peninjauan kembali. Pada akhirnya semua perkara bermuara ke Mahkamah Agung yang mengakibatkan terjadinya penumpukkan perkara.¹⁵

PERCERAIAN

Dalam Kompilasi Hukum Islam perceraian dijelaskan pada Pasal 117, perceraian ialah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusny perkawinan.

Perceraian merupakan alternatif terakhir, sebagai “pintu darurat” yang boleh ditempuh ketika bahtera kehidupan rumah tangga tidak bisa lagi dipertahankan keutuhan dan kesinambungannya. Sifatnya sebagai alternatif terakhir, Islam mengajarkan agar sebelum terjadinya perceraian ditempuh usaha-usaha perdamaian diantara kedua belah pihak.¹⁶

Bentuk-Bentuk Perceraian

Perceraian menurut hukum Islam pada dasarnya terbagi kepada dua, yaitu perceraian karena kematian dan perceraian sewaktu hidup. Perceraian sewaktu hidup dibagi kepada dua bentuk, adakalanya berbentuk thalak dan adakalanya berbentuk *fasakh*.

Tata cara dan prosedur perceraian dapat dibedakan ke dalam dua macam:

Cerai Thalak

Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang tidak di ubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menyatakan : “Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan isterinya mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar *thalaq*”.

Cerai Gugat

Dalam hukum positif Indonesia yang dimaksud dengan cerai gugat adalah perceraian dengan suatu keputusan pengadilan karena adanya gugat-

an dari isteri atau kuasa hukumnya. Dalam hal ini isteri merasa kerukunan rumah tangganya tidak bisa rukun lagi karena perbuatan suami dan keadaan diri suaminya.

Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat (isteri), kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat.¹⁷

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu suatu pendekatan yang berguna untuk mempelajari fenomena sosial dengan tujuan menjelaskan dan menganalisa perilaku manusia dan kelompok, dari sudut pandang yang sama sebagaimana objek yang diteliti melihat masalah tersebut. Menurut Bogdan dan Taylor dalam Lexy J. Moleong, penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.¹⁸

Sejalan dengan definisi tersebut, Kirk dan Miller mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan pada manusia dalam kawasannya sendiri¹⁹.

Metode penelitian kualitatif dilakukan dalam situasi yang wajar (*natural setting*) dan data yang dikumpulkan umumnya bersifat kualitatif. Oleh sebab itu penelitian ini disebut metode kualitatif. Istilah lainnya adalah *the postpositivistic, etnografic, phenomenological, subjective, case study, qualitative and humanistic*.²⁰

Metode kualitatif lebih berdasarkan pada filsafat fenomenologis yang mengutamakan penghayatan (*verstehen*). Metode kualitatif berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu. Responden dalam metode kualitatif berkembang terus (*snowball*) secara bertujuan (*purposive*) sampai data yang dikumpulkan dianggap memuaskan.

Lokasi Penelitian

Penentuan lokasi dan *setting* penelitian selain dibingkai dalam kerangka teoritis juga dilandasi oleh pertimbangan teknis operasional. Untuk itu, lokasi dan *setting* penelitian dipertimbangkan berdasarkan kemungkinan

dapat tidaknya dimasuki dan dikaji lebih mendalam. Hal ini penting karena betapapun menariknya suatu kasus, tetapi jika sulit dimasuki oleh peneliti, maka akan menjadi suatu kerja yang sia-sia.

Dengan memperhatikan faktor-faktor tersebut, maka peneliti menetapkan bahwa lokasi penelitian adalah di Pengadilan Agama Bukittinggi.

Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui wawancara, dan dokumentasi

Wawancara

Teknik wawancara adalah cara untuk mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung pada informan untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui berbincang-bincang dan berhadapan muka sehingga dapat memberi keterangan pada peneliti.

Lexy J. Moleong menjelaskan bahwa wawancara dilakukan dengan mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian dan lain-lain²¹.

Dalam penelitian ini dilakukan dengan *wawancara pembicaraan informal*.²² Pada jenis wawancara ini pertanyaan yang diajukan sangat bergantung pada pewawancara sendiri, bergantung pada spontanitas dalam mengajukan pertanyaan kepada yang diwawancarai. Hubungan pewawancara dengan yang diwawancarai adalah dalam suasana biasa, wajar, sedangkan pertanyaan dan jawabannya berjalan seperti pembicaraan biasa dalam kehidupan sehari-hari. Sewaktu pembicaraan berjalan, yang diwawancarai malah barangkali tidak mengetahui atau tidak menyadari bahwa ia sedang diwawancarai.

Dokumentasi

Dalam memperoleh data sekunder, dokumentasi dilakukan terhadap arsip-arsip seperti pengumuman, instruksi dan sebagainya yang penulis peroleh untuk menunjang penelitian ini. Disamping itu penulis juga menyeleksi bahan-bahan pustaka, buku-buku ilmiah dan jurnal yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

Metode Analisis Data

Analisis data, menurut Patton dalam Moleong²³ adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar. Dalam hal ini data yang telah terkumpul dari hasil wawancara dan hasil dokumentasi yang terekam dalam kaset diseleksi dan diklarifikasikan sesuai dengan kebutuhan data dan kemudian dianalisis berdasarkan hasil yang diperoleh di lapangan sesuai dengan metode yang digunakan yaitu metode kualitatif dengan menggunakan unit analisis data secara deskriptif.

Penentuan subjek maupun informan penelitian menggunakan pertimbangan *snowball sampling* (berkembang mengikuti informasi atau data yang diperlukan) sehingga memungkinkan melibatkan pihak di luar lokasi penelitian yang di pandang mengerti dan memahami kehidupan individu sebagai anggota masyarakat lokasi penelitian. Di samping itu, peneliti tidak membatasi subjek atau informan penelitian sebelum pengumpulan data dilakukan. Data penelitian direkam dan dicatat melalui teknik pengamatan langsung dan wawancara mendalam tak terstruktur. Dokumentasi juga digunakan sebagai teknik pengumpulan data penunjang.²⁴

TEMUAN PENELITIAN

Sejarah Pembentukan Pengadilan Agama Bukittinggi

Pengadilan Agama Bukittinggi pada awal berdirinya dengan menyewa rumah penduduk pada tahun 1957 berlokasi di Jalan Sudirman Bukittinggi (di samping kantor pos sekarang yang diroboh menjadi Apotek Saiyo), berkantor semenjak tahun 1957 sampai tahun 1971 yang dipimpin oleh Buya Syekh Sulaiman Ar-Rasuli (*Inyik Canduang*), yang berasal dari Canduang Kecamatan IV Angkek Canduang Kabupaten Agam Sumatera Barat. Pada tahun 1971 Pengadilan Agama Bukittinggi pindah ke Jirek di Jalan Veteran sampai tahun 1975 di rumah penduduk. Kemudian Pengadilan Agama Bukittinggi pindah lagi ke Jalan Tanmalaka Ombilin Bawah Nomor 4 Belakang Balok Bukittinggi dari tahun 1997 sampai tahun 2003. Karena lokasi Pengadilan Agama Bukittinggi yang di Belakang Balok berada di kompleks perumahan penduduk, maka Pengadilan Agama Bukittinggi pindah lagi ke kompleks perkantoran Balai Kota Bukittinggi di Jalan Kusuma Bakti Gulai Bancah dari tahun 2003 sampai 16 Agustus 2007. Karena adanya pembangunan gedung

kantor baru Pengadilan Agama Bukittinggi di kompleks perkantoran Balai Kota Bukittinggi, maka untuk sementara Pengadilan Agama Bukittinggi pindah ke Jalan Merapi, kompleks eks APDN dengan sistem pinjaman kepada pemerintah Propinsi Sumatera Barat.

Adapun yang pernah menjabat sebagai Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi adalah sebagai berikut:

1. Buya H. Mansyur dari Pakan Sinayan Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam.
2. Buya Sarbini berasal dari Kapau Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam periode tahun 1968 sampai dengan tahun 1973.
3. Dalai Datuak Sampono Bumi periode dari tahun 1964 sampai dengan tahun 1967.
4. H. Ilyas Hatta berasal dari Matur Kabupaten Agam periode 1967.
5. H. S. Tengku Sulaiman berasal dari Aur Kuning Bukittinggi periode tahun 1973 sampai dengan tahun 1975.
6. Abdul Manaf berasal dari Pakan Sinayan Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam periode tahun 1975 sampai 1976.
7. Dahlan Khatib Kayo berasal dari Bukit Batipuh Kecamatan IV Angkek Canduang Kabupaten Agam periode tahun 1976 sampai dengan 1978.
8. Baharuddin Saleh berasal dari Muaro Labuah Solok periode 1978 sampai dengan 1979.
9. Fakhurozi Harli berasal dari Ogan Komering Hilir periode 1979 sampai dengan 1984.
10. Martius As'ady berasal dari Payakumbuh periode 1985.
11. Ajis Jaman Gani berasal dari Batusangkar.
12. Zul Aidi Sutan Alamsyah berasal dari Siguntur Pesisir Selatan periode 1995 sampai dengan 1999.
13. Darisman berasal dari Palambayan Kabupaten Agam periode tahun 1999 sampai dengan tahun 2004.
14. Pelmizar berasal dari Kamang Kabupaten Agam periode 2004 sampai dengan 2006.
15. M. Nasir berasal dari Kamang Kabupaten Agam periode 2006.
16. Drs. Samsir Suleman, M. Hi berasal dari Malalak Kabupaten Agam periode 2006 sampai dengan tahun 2010.
17. Drs. Dudung, SH, MH berasal dari Jawa Tengah periode 2010 sampai sekarang.

Wilayah Hukum Pengadilan Agama Bukittinggi

1. Wilayah Kota Bukittinggi
2. Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh.
3. Kecamatan Mandiingin Koto Selayan.
4. Kecamatan Guguk Panjang.
5. Wilayah Kabupaten Agam:
6. Kecamatan Palupuh.
7. Kecamatan Tiltang Kamang.
8. Kecamatan Kamang Magek.
9. Kecamatan Baso.
10. Kecamatan IV Angkek.
11. Kecamatan Canduang.
12. Kecamatan Banuhampu Sungai Puar.
13. Kecamatan Sungai Puar.

Prosedur Berperkara dan Upaya Hukum di Pengadilan Agama Bukittinggi

Prosedur Berperkara

- Pertama:* Calon penggugat/pemohon atau kuasanya datang menghadap petugas meja I dengan membawa surat gugatan atau surat permohonan 6 (enam) rangkap ditambah sejumlah pihak tergugat/termohon untuk di input ke dalam SIADPA. Jika calon penggugat/pemohon belum membawa surat gugatan/permohonan dapat meminta bantuan petugas meja I untuk menginput surat gugatan/permohonannya ke dalam SIADPA sampai dengan penandatanganan surat gugatan/permohonannya dihadapan petugas meja I, paling lama 45 menit.
- Kedua:* Petugas meja I menaksir panjar biaya perkara dan dituangkan dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) tiga lembar; lembar pertama putih, lembar kedua kuning, dan lembar ketiga merah, paling lama 5 menit.
- Ketiga:* Petugas meja I menyerahkan surat gugatan/permohonan yang telah ditandatangani oleh calon penggugat/pemohon tersebut dan SKUM kepada calon penggugat/pemohon serta mempersilahkan kepada calon penggugat/pemohon tersebut

- agar membayar panjar biaya perkara ke Bank BRI Cabang Bukittinggi.
- Keempat:* Calon penggugat/calon pemohon membayar panjar biaya perkara ke Bank yang telah ditentukan sejumlah yang tertera pada SKUM dengan slip setoran pada Bank yang bersangkutan.
- Kelima:* Calon penggugat/pemohon menyerahkan surat gugatan/permohonan disertai SKUM dan slip bukti penyetoran panjar biaya perkara yang telah divaliditasi oleh Bank ke kasir Pengadilan Agama Bukittinggi Kelas. IB.
- Keenam:* Kasir mencatat panjar biaya perkara yang tertera pada slip setoran tersebut ke dalam buku jurnal keuangan perkara, menandatangani dan memberi tanda lunas pada SKUM (3 rangkap), membubuhkan nomor perkara dan tanggal penerimaan perkara pada SKUM dan pada surat gugatan/permohonan sesuai dengan nomor dan tanggal hari pencatatan pada jurnal keuangan perkara, paling lama 10 menit.
- Ketujuh:* Kasir setelah menyimpan SKUM lembar kedua (merah) menyerahkan surat gugatan/permohonan beserta SKUM lembar pertama (kuning) dan lembar ketiga (hijau) dan slip setoran panjar biaya perkara kepada calon penggugat/pemohon untuk didaftarkan pada petugas meja II, paling lama 5 menit.
- Kedelapan:* Petugas meja II mencatat perkara tersebut ke dalam buku register perkara, kemudian menyerahkan 1 rangkap surat gugatan/permohonan berikut SKUM lembar pertama (kuning) kepada penggugat/pemohon, paling lama 15 menit. Proses pendaftaran perkara telah selesai, selanjutnya pihak berperkara dapat meninggalkan pengadilan untuk menunggu panggilan sidang oleh jurusita/jurusita pengganti di tempat kediamannya masing-masing.
- Kesembilan:* Petugas meja II memasukkan surat gugatan/permohonan beserta SKUM lembar ke 3 (merah), slip setoran panjar biaya perkara dari Bank, Penetapan Majelis Hakim (PMH), Penetapan Hari Sidang (PHS) yang telah terisi majelis hakim dan tanggal sidangnya dan penunjukkan panitera sidang

kepada panitera muda gugatan/permohonan untuk diteliti kelengkapan dan kebenarannya, paling lambat pukul 16.00 pada hari dan tanggal pendaftaran perkara.

Kesepuluh: Panitera muda gugatan/permohonan menyerahkan berkas perkara yang diterima dari meja II kepada wakil panitera setelah membubuhkan tanda koreksi pada stopmap berkas perkara, paling lambat pukul 16.30 pada hari dan tanggal pendaftaran perkara. (semua berkas perkara setiap pukul 16.30 pada hari pendaftarannya telah berada dan tersimpan di ruang wakil panitera.

Kesebelas: Wakil panitera meneruskan berkas perkara kepada ketua melalui panitera, paling lambat pukul 12.00 pada hari pertama setelah hari pendaftaran.

Keduabelas: Ketua Pengadilan Agama menandatangani PMH dan menyerahkan berkas perkara kepada ketua majelis hakim melalui panitera sidang yang ditunjuk, paling lambat pada hari kedua setelah hari pendaftaran.

Ketigabelas: Ketua majelis hakim yang ditunjuk menandatangani PHS, membagi salinan surat gugatan/permohonan kepada hakim anggota majelis dan memerintahkan kepada jurusita/jurusita pengganti untuk memanggil para pihak berperkara, paling lambat hari ketiga setelah hari pendaftaran.

Keempatbelas: Jurusita/jurusita pengganti memanggil para pihak berperkara pada hari pertama setelah hari perintah memanggil oleh majelis hakim paling lambat tiga hari (tiga hari kerja untuk perkara selain perceraian) sebelum hari sidang perkara dimaksud.

Upaya Hukum

1. Terhadap putusan Pengadilan Agama, para pihak yang berperkara dapat mengajukan perlawanan dan/atau upaya hukum, yaitu dengan mengajukan verzet, banding, kasasi dan peninjauan kembali.
2. Permohonan verzet dan banding dapat diajukan ke Pengadilan Agama selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung sehari setelah putusan dibacakan atau diberitahukan kepada pihak yang tidak hadir dalam sidang pembacaan putusan.
3. Pihak yang banding membayar biaya banding.

4. Panitera memberitahukan adanya permohonan banding kepada pihak terbanding dan turut terbanding.
5. Pihak pembanding membuat memori banding dan pihak terbanding mengajukan kontra memori banding.
6. Panitera memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk memeriksa berkas banding (*inzaage*) di Pengadilan Agama.
7. Berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi selambat-lambatnya satu bulan sejak pengajuan permohonan banding.
8. Panitera menyampaikan salinan putusan kepada para pihak yang berperkara.
9. Apabila para pihak tidak menerima putusan banding, maka para pihak dapat mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung, yang prosedur dan tata caranya hampir sama dengan prosedur dan tata cara pengajuan banding.
10. Apabila para pihak tidak menerima putusan kasasi, atau putusan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT), maka para pihak dapat mengajukan upaya hukum peninjauan kembali ke Mahkamah Agung selambat-lambatnya 180 (seratus delapan puluh) hari setelah putusan diberitahukan atau setelah ditemukan bukti baru (*novum*).
11. Setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk perkara permohonan talak, Pengadilan Agama:
 - a. Menetapkan hari sidang ikrar talak.
 - b. Memanggil pemohon dan termohon untuk menghadiri sidang ikrar talak.
 - c. Jika dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan sidang ikrar talak, suami atau kuasanya tidak melaksanakan ikrar talak di depan sidang, maka gugurlah kekuatan hukum penetapan tersebut dan perceraian tidak dapat diajukan berdasarkan alasan hukum yang sama.
 - d. Setelah pelaksanaan sidang ikrar talak, maka dapat dikeluarkan akta cerai.
12. Setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk perkara cerai gugat, maka dapat dikeluarkan akta cerai.
13. Untuk perkara lainnya, setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka para pihak yang berperkara dapat meminta salinan putusan.

14. Apabila pihak yang kalah dihukum untuk menyerahkan obyek sengketa, kemudian tidak mau menyerahkan secara sukarela, maka pihak yang menang dapat mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Agama yang memutus perkara tersebut.

MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA BUKITTINGGI

Masuknya mediasi ke dalam bagian Hukum Acara Peradilan Agama sejak keluarnya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Begitu pentingnya mediasi, sehingga setiap perkara yang tidak menempuh prosedur mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 130 HIR dan atau Pasal 154 RBg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum.

Sejak berlakunya Perma Nomor 01 tahun 2008 sampai tahun 2011 ini data perceraian yang dicatat oleh Pengadilan Agama Bukittinggi, terus didominasi oleh gugatan isteri (isteri menggugat cerai suaminya), pada tahun 2008 tercatat sebanyak 234 kasus perceraian yang diajukan oleh isteri terhadap suaminya, sedangkan cerai talak atau permintaan cerai dari suami terhadap isterinya hanya 110 kasus. Pada tahun 2009 kasus gugatan cerai oleh isteri sebanyak 244 kasus, juga cukup tinggi dari kasus cerai talak yang diajukan suami yang hanya 141 kasus. Pada tahun 2010, isteri menggugat cerai suaminya sebanyak 297 kasus sedangkan suami mengajukan permohonan untuk menceraikan isterinya menurun dari tahun sebelumnya menjadi 140 kasus. Statistik perkara berjalan Pengadilan Agama Bukittinggi sampai bulan September tahun 2011 sebanyak 574 perkara dengan perincian 470 perkara gugatan dan 104 perkara permohonan.

Faktor penyebab perceraian ini cukup banyak, diantaranya suami tidak mampu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga karena tidak mempunyai pekerjaan tetap, karena kecemburuan yang disebabkan oleh perilaku suami isteri, alat komunikasi yang semakin canggih juga menyebabkan tingkat perceraian semakin meningkat setiap tahunnya.

Penggunaan telepon genggam misalnya, melalui pesan-pesan singkat di dalam alat komunikasi tersebut juga sering menjadi penyebab terjadinya perceraian. Dengan menggunakan alat komunikasi tersebut membuka jalan untuk melakukan perselingkuhan, baik oleh suami atau isteri.

Sejak diwajibkannya mediasi berdasarkan Perma Nomor 01 tahun 2008 sampai tahun 2011 terdapat lebih dari 1.000,- (seribu) kasus perceraian, baik gugatan cerai yang diajukan oleh isteri maupun cerai talak yang diajukan oleh suami. Namun yang berhasil didamaikan melalui mediasi dengan kriteria suami isteri tersebut tidak jadi bercerai kurang dari sepuluh persen tingkat keberhasilannya.

Berdasarkan tingkat keberhasilan di atas penulis berkesimpulan bahwa mediasi di Pengadilan Agama Bukittinggi sejak keluarnya Perma sampai tahun 2011, jika dikaitkan dengan Konsiderans Perma Nomor 01 Tahun 2008, belum efektif.

Ada beberapa faktor belum efektifnya tingkat keberhasilan mediasi sesuai dengan Perma Nomor 01 Tahun 2008:

Kurangnya Peranan Keluarga

Pengalihan tanggungjawab terhadap anak-anak dari saudara laki-laki ibu (*mamak*) kepada ayah secara tidak langsung berpengaruh terhadap budaya/karakter orang Minang. Ketika terjadi pertengkaran dalam perkawinan *anak kemenakan*, biasanya diselesaikan oleh *ninik mamak* dan keluarga kedua belah pihak. Sehingga pertengkaran yang terjadi bisa didamaikan dengan baik oleh keluarga kedua belah pihak. Namun yang terjadi sekarang, ketika terjadi pertengkaran dalam rumah tangga *anak kemenakan*, keluarga kedua belah pihak tidak mau ikut campur dalam menyelesaikannya. Seolah-olah persoalan tersebut adalah persoalan mereka berdua.

Pengadilan Sebagai Jalan Terakhir

Suami atau isteri yang mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama, baik dalam perkara cerai talak dan cerai gugat, sudah bertekad menempuh jalan terakhir di Pengadilan Agama. Karena keinginan yang begitu kuat untuk bercerai dari suami atau isteri sehingga upaya mediasi yang dilakukan di Pengadilan Agama belum efektif. Bahkan tidak jarang diantara suami atau isteri tidak mau untuk menempuh prosedur mediasi.

Faktor Luar

Faktor luar ini juga menjadi penyebab kurang efektif dari segi hasil pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama. Ketika suami atau isteri sudah hampir mau berdamai dengan proses mediasi, namun ada pihak-pihak yang tidak menginginkan perdamaian dalam mediasi tersebut.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bagian ini akan penulis kemukakan tentang kesimpulan dan saran berdasarkan penelitian yang telah dilakukan.

Kesimpulan

Ada beberapa faktor belum efektifnya tingkat keberhasilan mediasi sesuai dengan konsiderans Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 sebagai berikut: *Pertama* Kurangnya Peranan Keluarga, *kedua*, pengadilan dijadikan sebagai jalan terakhir, *ketiga*, karena faktor luar.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian maka beberapa saran yang dapat disampaikan adalah:

1. Peranan keluarga harus dimaksimalkan, khususnya ketika terjadi pertengkaran dalam rumah tangga *anak kemenakan. Ninik mamak* dan keluarga kedua belah pihak sebaiknya mendamaikan dan mencari jalan keluar dalam persoalan tersebut.
2. Pengadilan Agama tidak dijadikan sebagai jalan terakhir. Suami atau isteri yang mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama, baik dalam perkara cerai talak maupun cerai gugat, tidak menjadikan pengadilan sebagai jalan terakhir.
3. Perlunya peranan pihak-pihak yang terkait dalam mendamaikan dan mencari solusi persoalan rumah tangga. []

ENDNOTES

¹ Hukum Acara Peradilan Agama ialah peraturan hukum yang mengatur tentang cara mentaati hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim atau tentang cara bertindak di Pengadilan Agama dan tentang cara hakim melaksanakan hukum sebagaimana mestinya. A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), Cet. ke-2, h. 9

² Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syari'ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta : Kencana, 2009), Cet. ke-1 h. 2

³ Jimmy J. Sembiring, *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, dan Arbitrase)*, (Jakarta: Visi Media 2011), h. 28

⁴ *Ibid.*,

⁵ *Ibid.*,

⁶ *Kaukus* adalah pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak tanpa dihadiri oleh pihak lainnya. Pasal (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

⁷ Pasal 14 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

⁸ Pasal 17 ayat (1), (4) dan (5) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

⁹ Pasal 18 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

¹⁰ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, Pasal (2)

¹¹ Mardani, *op. cit.*, h. 80

¹² Ahmad Mujahidin, *op.cit.*,h. 162

¹³ *Ibid.*,

¹⁴ Mukti Arto, *op.cit.*, h. 93

¹⁵ Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Manfaat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 144

¹⁶ Ahmad Rafiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003) h. 269

¹⁷ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 73 ayat (1), (2), dan (3)

¹⁸ Lexy J. Moleong , *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT Remaja Rosda Karya, 1997) h. 6

¹⁹ *Ibid.*, h. 3

²⁰ Husnaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* , (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006) h. 81

²¹ Lexy J. Moleong, *Op. Cit.*, h. 135

²² *Ibid.*,

²³ *Ibid.*, h. 103

²⁴ Burhan Bungin, *Op. Cit.*, h. 144

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Syahrizal, 2009 *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syari'ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*. Cet. 1 Jakarta: Kencana
- Arto, A. Mukti, 1998 *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Cet. 2. Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
- Bungin, Burhan, 2008 *Metodologi Penelitian Kualitatif, Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
- Faisal, Sanapiah, 2007 *Format-Format Penelitian Sosial*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,

- Harahap, M. Yahya, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2009 *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama*. Buku II, edisi 2009
- Manan, Abdul. 2005. *Penerapan Hukum Acara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Cet.5. Jakarta : Kencana Prenada Media Group
- _____, 2009. *Mimbar Hukum dan Peradilan*. Jakarta: Pusat Pengembangan Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM)
- Mardani, 2009 *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*. Cet. 1. Jakarta : Sinar Grafika
- Mertokusumo, Sudikno, 1985 *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Cet.1. Yogyakarta: Liberty
- Moleong, Lexy, 1997 *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*
- Roihan, Rasyid A. 2005 *Hukum Acara Peradilan Agama*.. Cet. 11. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,
- Rasyid, Chatib dan Syaifuddin, 2009 *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik Pada Peradilan Agama*. Cet.1. Yogyakarta : Ull Press,
- Rofiq, Ahmad, 2003 *Hukum Islam Di Indonesia*. Cet. 6. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *Tentang Peradilan Agama*
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 *Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*.
- Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*.
- Usman, Husnaini dan Purnomo Setiadi Akbar, 2006. *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: PT Bumi Aksara,

PANDUAN PENULISAN ARTIKEL

Jurnal ISLAM & REALITAS SOSIAL

1. Umum: Jurnal ini bersifat terbuka, dalam arti siapa saja boleh mengajukan artikel. Artikel adalah hasil karya sendiri dan belum pernah diterbitkan di media/jurnal lain.
2. Bentuk Artikel: Artikel disampaikan dalam bentuk *hardcopy* (kertas kuarto/A4) disertai dengan media penyimpanan *file* (disket, *flash disk*, CD, dsb) atau dikirimkan sebagai *attachment e-mail* (lebih jelasnya hubungi redaksi). Artikel diserahkan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum bulan penerbitan ke alamat Sekretariat.
3. Seleksi dan Editing: Editor berwenang untuk menyeleksi artikel-artikel, mempersingkat artikel tanpa mengubah makna, serta mengedit bahasa dan poin-poin yang dibakukan untuk penyempurnaan dan konsistensi terbitan.
4. Bahasa dan Abstrak: Artikel bisa dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris. Bila artikel berbahasa Indonesia, maka abstraknya dalam Bahasa Inggris dan sebaliknya. Panjang abstrak sekitar sepertiga halaman kuarto dengan spasi tunggal (1 spasi), *Times New Roman* ukuran 12. Dan juga disertai kata-kata kunci (*keywords*) sebanyak 3-5 kata.
5. Jumlah halaman dan spasi: Jumlah halaman setiap artikel antara 20-30 halaman (5.000-10.000 kata), dengan ketentuan penulisan standar karya ilmiah. Kertas kuarto (A4), spasi ganda (2 spasi), *Times New Roman* ukuran 12, margin 4-3-4-3.
6. Sistematika Penulisan: Untuk artikel kajian analitis memuat: Judul, Penulis, Abstrak, Kata Kunci, Pendahuluan (berisi gambaran ringkas masalah, sedikit kajian teoritik, pendapat alternatif, dan tujuan pembahasan), Pembahasan (bersifat analitik, jika relevan dilengkapi dengan bukti empirik, mengandung pendirian/sikap penulis), Penutup (kesimpulan dan saran), serta Daftar Pustaka.
7. Cara Pengacuan dan Pengutipan: Pengacuan dan pengutipan dibuat dalam bentuk *footnote/endnote*.
8. Pedoman Penulisan Daftar Pustaka:
 - a. Untuk Buku:

Diamond, Larry. 1999. *Developing Democracy: Toward Consolidation*. Baltimore and London: The John Hopkins University Press.
 - b. Artikel dalam Buku:

Edwards, John. 2002. "Sovereignty or Separation? Contemporary Political Discourse in Canada." In [Dalam] *Conversi*, Daniele. *Ethnonationalism in the Contemporary World: Walker Connor and the Study of Nationalism*. London and New York: Routledge.
 - c. Artikel dalam Jurnal:

Törnquist, Olle. 2000. "Dynamics of Indonesian Democratisation." *Third World Quarterly*, Vol. 21, No. 3, pp. 383-423.
 - d. Sumber yang berasal dari Internet:
 - (i) Sumber referensi lengkap:

Collier, Paul, and Hoeffler, Anke. 1999. *Justice-Seeking and Loot-Seeking in Civil War*. Washington DC: The World Bank. <http://www.worldbank.org/research/collier.pdf> (diakses 23 Agustus 2003).
 - (ii) Sumber referensi tidak lengkap:

Aditjondro, George J. *The Political Economy of Violence in Maluku, Indonesia*. <http://www.munindo.brd.de> (diakses September 2001).
9. Penulis diharapkan menyertakan identitas dan alamat lengkap (email dan nomor telepon).